



BUPATI PADANG LAWAS

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
- . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021.
- RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode 1 (satu) Tahun.
- Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) Tahun.
- Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 ialah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun anggaran yaitu Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di daerah.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 merupakan Penjabaran Tahun Kedua dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pedoman Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara Kabupaten Padang Lawas tahun 2021.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 adalah :

- AB I : PENDAHULUAN
- AB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- AB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- AB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021
- AB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021
- AB VI : PENUTUP

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 8

Melaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, sesuai dengan ketersediaan dana pada Tahun 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS



RPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020 NOMOR 27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di mana dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Kedudukan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 merupakan RKPD tahun ke 2 selama periode RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu rencana kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan

tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilaksanakan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2038;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, oleh karena itu isi dan muatan RPJMD tersebut akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah. Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan. Sehingga masing-masing Perangkat daerah memiliki arah pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Penyusunan RKPD juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dengan cara menselaraskan dan mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional dan provinsi adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan

daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya RKPD adalah untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dan Program Strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 adalah sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Padang Lawas disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.



3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, dimana hasilnya dapat menggambarkan tentang pencapaian pembangunan yang telah dicapai pemerintahan Kabupaten Padang Lawas serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi sekarang ini dan kedepannya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang ada.

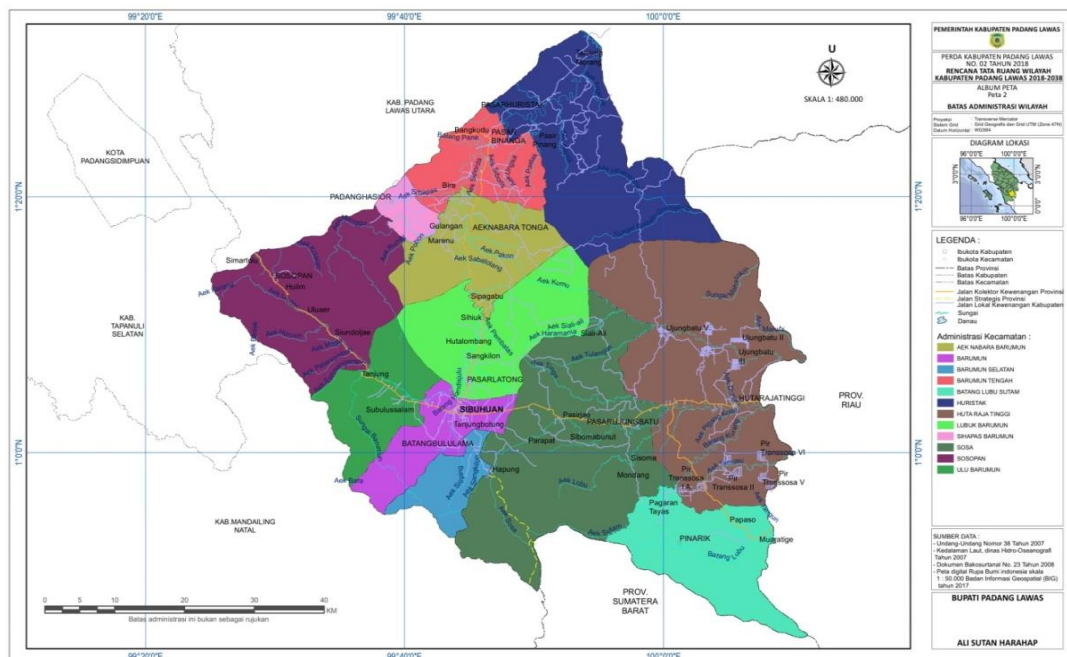
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penetapan Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Barumon Kelurahan Sibuhuan yang terdiri dari 12 kecamatan. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3 892,74 km². Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas



Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Akhir tahun 2019, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Sosa termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Lawas yang paling luas, kemudian Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

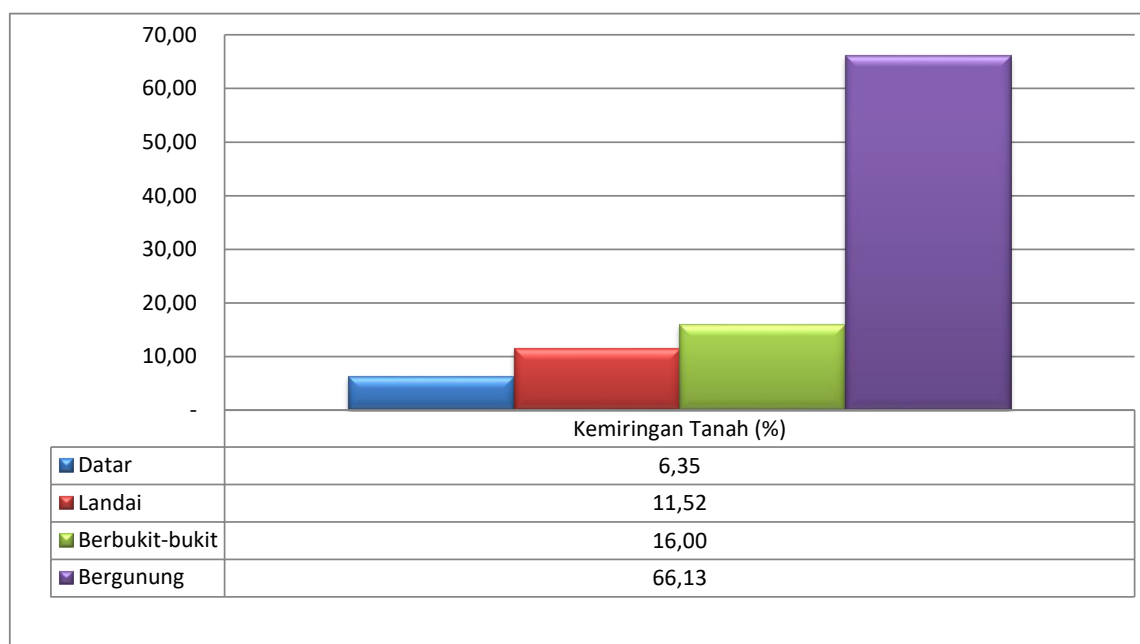
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Distribusi Luas (%)
1.	Sosopan	22	-	407,52	9,63
2.	Ulu Barumun	15	-	241,37	5,71
3.	Barumun	29	1	119,5	2,83
4.	Barumun Selatan	11	-	122,6	2,9
5.	Lubuk Barumun	24	-	300,23	7,1
6.	Sosa	39	-	611,85	14,46
7.	Batang Lubu Sutam	28	-	586	13,85
8.	Hutaraja Tinggi	31	-	408	9,65
9.	Huristak	27	-	357,65	8,46
10.	Barumun Tengah	39	-	443,09	10,47
11.	Aek Nabara Barumun	25	-	487,75	11,53
12.	Sihapas Barumun	13	-	144,43	3,41
Kabupaten Padang Lawas		303	1	4.229,99	100
Provinsi Sumatera Utara		25 Kabupaten	8 Kotamadya	72.981,23	100

Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Wilayah Bagian Timur Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah dengan kategori datar sampai dengan landai adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah bagian barat sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa sungai dan air terjun dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya merupakan daerah konservasi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun. Untuk lebih jelasnya, persentase kemiringan tanah wilayah dapat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.3.
Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas



Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Kabupaten Padang Lawas bervariasi mulai dari 0–1.915 mdpl. Ketinggian permukaan daratan Kabupaten Padang Lawas bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 34,4°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 17,7°C.

2.1.1.4. Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Secara geologis, wilayah Kabupaten Padang Lawas secara umum terdiri atas 3 (tiga) formasi antara lain; formasi pra-tercier, formasi terciar, dan formasi kwarter, memiliki struktur dan batuan yang kompleks. Pada formasi pra-tercier berupa batuan Permokarbon yang merupakan inti dari pegunungan bukit barisan adalah formasi tertua yang ditemukan. Sebahagian dari formasi ini telah ditutupi oleh endapan yang lebih muda dari zaman terciar (sedimen-sedimen) dan zaman kwarter (bahan vulkanis atau endapan alluvium). Formasi pra-tercier ini ditemukan antara lain; Kecamatan Sosa bagian selatan, Kecamatan Barumun bagian selatan, Kecamatan Ulu barumun bagian selatan dan Kecamatan Sosopan bagian selatan.

Formasi Terciari dibedakan atas formasi paleogen dan neogen. Formasi paleogen (tercier tua) ditemukan di wilayah tengah ke barat Kabupaten Padang Lawas, antara lain; Kecamatan Sosa ke sebelah barat, Kecamatan Barumun tepatnya di Kota Sibuhuan, Kecamatan Lubuk Barumun ke sebelah barat, Kecamatan Barumun tengah ke sebelah barat, Kecamatan Ulu barumun ke sebelah timur dan Kecamatan Sosopan ke sebelah timur. Daerah pada terciari ini telah mengalami gejala lipatan okling sehingga banyak tempat-tempat lapisan yang semula datar (endapan) telah menjadi miring ke berbagai arah. Sedangkan formasi neogen (tercier muda) dapat ditemukan antar lain; Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Batang Lubu Sutam, sebahagian Kecamatan Sosa, sebahagian Kecamatan Barumun, sebahagian Kecamatan Lubuk Barumun dan sebahagian Kecamatan Barumun Tengah.

Formasi Kwarter memiliki dua jenis batuan penyusun yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas, yaitu granit dan liparit. Artinya masih terdapat formasi geologi (kwarter) yang menyusun daerah Kabupaten Padang Lawas. Formasi ini ditunjukkan pada wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Sosa, wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Barumun dan wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Ulu Barumun.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan potensial menimbulkan tanah longsor. Kabupaten Padang Lawas memiliki beberapa lokasi rawan bencana longsor, antara lain di sebahagian besar Kecamatan Sosopan. Selain itu, Kondisi struktur geologi yang kompleks tersebut dapat menyimpan bahan tambang dan galian yang cukup potensial dikembangkan seperti timah, batu bara dan bahan bakar fosil.

B. Potensi

1) Sumber energi

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi energi berupa panas bumi berdasarkan peta energi Provinsi Sumatera Utara sebagai energi alternatif bersama dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi minyak bumi dengan cadangan 2000 MSTB yang telah terbukti keberadaannya dan telah mulai diproduksi yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah. Kabupaten Padang Lawas juga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki cadangan batu bara. Terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Cadangan batu bara di wilayah Kabupaten Padang Lawas terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Batang Lubu Sutam.

2) Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Kabupaten Padang Lawas mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah, dan mineral non logam : dolomit, bentonit, marmer, pasir kwarsa, kapur tohor serta bahan galian energi : batu bara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti). Berikut disajikan tabel potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.2.
Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas

No.	Kecamatan	Pertambangan
1	Sosa	Batu Bara
2	Batang Lubu Sutam	Batu Bara, Timah, Emas
3	Hutaraja Tinggi	-
4	Lubuk Barumun	-
5	Ulu Barumun	Batu Bara, Batu Pasir, Timah, Emas
6	Sosopan	Batu Bara, Marmer, Kapur Tohor, Emas, Bentonite
7	Barumun Tengah	Minyak Bumi, Pasir Kuarsa, Laterit
8	Huristak	Laterit, Pasir Kuarsa

Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038



Selain bahan galian tersebut terdapat pula potensi bahan tambang seperti minyak bumi, namun hingga saat ini baru tahap explorasi dan belum dieksploitasi. Hal ini terkait lokasi pertambangan banyak yang berada dikawasan lindung. Untuk masa depan hal ini dapat dipertimbangkan untuk dieksploitasi.

Tabel 2.3.
Potensi Minyak Bumi Tahun 2018

No	Wilayah	Cadangan (Mstb)* Minyak Bumi		
		Terbukti	Mungkin	Harapan
1	Kabupaten Padang Lawas	2	0	0
2	Provinsi Sumatera Utara	34.898	7.602	3.931

*MSTB = Thousand stock tank barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2019

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Padang Lawas terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 2 (dua) DAS dan yang merupakan DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/kota. Secara umum wilayah Padang Lawas terletak di Wilayah Sungai Barumun-Kualu dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yang meliputi DAS Barumun dan DAS Aek Sosa.

Tabel 2.4.
Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis
di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah	Kelas Kekritisian Lahan					Tubuh Air
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Kabupaten Padang Lawas	102.521,64	82.679,32	26.026,61	18.755,46	2.515,11	1.016,07
2	Provinsi Sumatera Utara	1.605.118,20	1.023.269,34	1.015.544,40	538.930,28	235.628,02	141.910,42

Sumber: BPDAS Asahan Barumun (Riview Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumun), Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Lawas memiliki lahan yang tidak kritis yang cukup luas dan Lahan sangat kritis adalah lahan yang sedikit selain dengan Tubuh Air yang juga sangat sedikit.

A. Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas

provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumun – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas kabupaten/kota.

B. Debit Air

Beberapa sungai utama di Kabupaten Padang Lawas memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Barumun, Sungai Sosa, yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu yang merupakan daerah tangkapan air.

2.1.1.6. Klimatologi

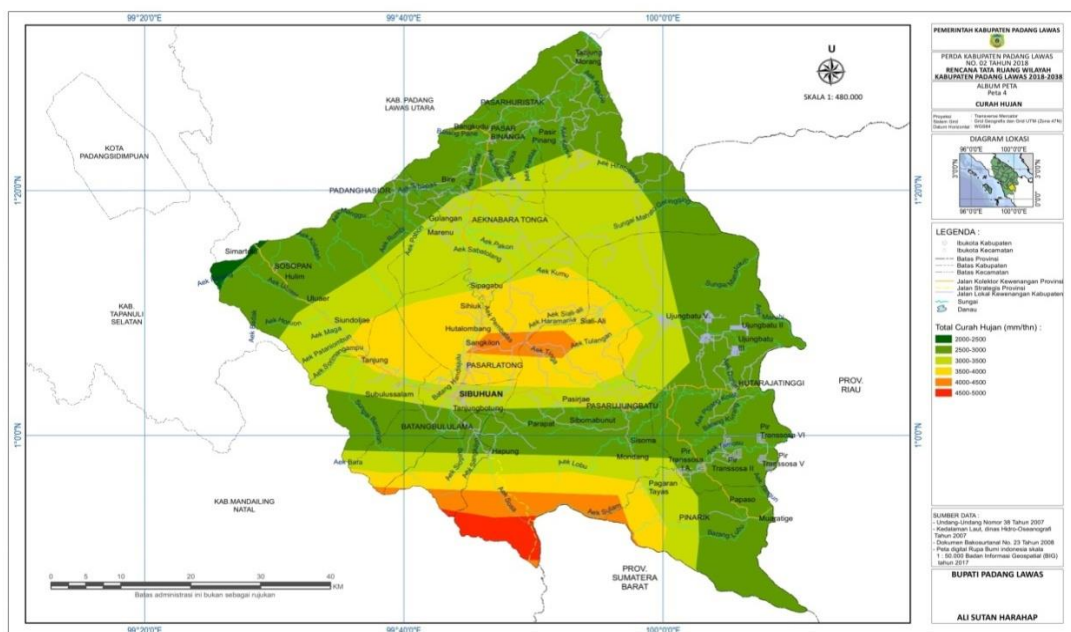
A. Tipe

Iklim di Padang Lawas termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Padang Lawas mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

B. Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 2.033.60 mm, dengan jumlah hari hujan berkisar sebesar 211.00 hari per tahun dan persentase penyinaran matahari 536.00 persen. Penyinaran sinar matahari yang paling tinggi terdapat pada bulan Juli dan yang paling rendah terdapat pada bulan November. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret dan curah hujan terendah terjadi di bulan Juli. Di wilayah Kabupaten Padang Lawas musim kemarau pada umumnya terjadi pada April sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Februari.

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Tabel 2.5.
Curah Hujan, Jumlah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

No	Bulan	Curah	Jumlah	Penyinaran
		Hujan (mm)	Hujan (hari)	Matahari (%)
1	Januari	295,7	20	34
2	Februari	159,8	21	44
3	Maret	320,2	23	59
4	April	240,3	21	32
5	Mei	136,9	13	46
6	Juni	108,4	8	46
7	Juli	17,1	6	79
8	Agustus	229,3	21	39
9	September	88,9	19	28
10	Oktober	149,7	13	60
11	November	127,9	23	25
12	Desember	159,4	23	44

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2020

C. Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu udara di Kabupaten Padang Lawas rata-rata 26,0°C dengan rata-rata kelembaban udara 77 persen. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Padang Lawas yang paling tinggi terdapat pada bulan Februari dan yang paling rendah bulan Juli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1) Hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 Hektar. Kawasan hutan lindung ini terdapat di:

- Kecamatan Barumun dengan luas ± 2.692 ha;
- Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan luas ± 17.047 ha;
- Kecamatan Sosa dengan luas ± 21.422 ha;
- Kecamatan Sosopan dengan luas ± 2.025 ha;
- Kecamatan Ulu Barumun dengan luas ± 605 ha.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Padang Lawas adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air ini umumnya terdapat di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kualuh Barumun dan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan, yang terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumun.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air yang terdapat dibagian hulu daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

3) Kawasan perlindungan setempat

Kabupaten Padang Lawas terdapat dua DAS yaitu DAS Kualuh Barumun dan DAS Rokan. Sungai ini memberi kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya untuk bercocok tanam dan sebagai sumber air minum atau air baku. Kawasan perlindungan setempat yaitu :

- a. Kawasan sempadan sungai, kawasan ini meliputi sungai-sungai yang berada di kabupaten, dengan ketentuan:
 - daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

- b. Kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar mata air juga meliputi ketentuan yang sama dengan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan hutan lindung.

4) **Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya**

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :

a. Kawasan suaka marga satwa;

Kawasan Suaka Alam di wilayah Kabupaten Padang Lawas mempunyai luas sebesar ±31.658 ha. Kawasan Suaka Alam ini terdapat di Kecamatan Barumon, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumon dan Kecamatan Barumon Selatan. Sedangkan kawasan suaka marga satwa yaitu Suaka Marga Satwa Barumon.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- Candi meliputi Candi Simaputung di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Tandihat di Kecamatan Barumon Tengah, Candi Sangkilon di Kecamatan Lubuk Barumon dan Candi Muara Gambaran di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Rumah adat meliputi Bagas Godang Hasahatan di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Janjilobi di Kecamatan Barumon, Bagas Godang Hutaraja Lama di Kecamatan Sosa, Bagas Godang Unte Rudang di Kecamatan Barumon Tengah dan Bagas Godang Huta Nopan di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Kearifan lokal meliputi Makam Parmata Sapihak di Kecamatan Barumon, Makam Sibaso di Kecamatan Sosa, Makam Bujing Sambilan Jogi di Kecamatan Lubuk Barumon, Makam Jired I, II, III di Kecamatan Sosopan, Makam Oppung Soduguron Marga Hasibuan di Lobu Botung Kecamatan Barumon, Makam Padang Mandersa di Kecamatan Lubuk Barumon, Makam Jantan Birong Marga Hasibuan di Kecamatan Sosa, Tagor di Kecamatan Barumon dan Puncak Binubu di Kecamatan Barumon.

5) **Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Padang Lawas terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran lahan dan kawasan rawan bencana angin puting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah CAT (Cekungan Air Tanah) Pekanbaru dan CAT (Cekungan Air Tanah) Pasar Sibuhuan.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :
 - Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Kabupaten Padang Lawas seluas ± 39.249 ha (tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan hektar), tersebar di Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Ulu Barumon;
 - Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas ± 99.511 ha (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas hektar), tersebar di Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Lubuk Barumon dan Kecamatan Sosa.
- b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi :
 - Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas ± 8.782 ha (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektar), tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon dan Kecamatan Lubuk Barumon;
 - Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas ± 17.502 ha (tujuh belas ribu lima ratus dua hektar) tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumon Selatan, Kecamatan Barumon, Kecamatan Ulu Barumon, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Lubuk Barumon;
 - Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan serta didukung prasarana irigasi teknis diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa dan pertanian lahan kering;

- Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas ± 119.848 ha (seratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan hektar) tersebar di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Padang Lawas tersebar diseluruh kecamatan.
- e. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan minyak bumi tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk kawasan pertambangan batu bara di Kabupaten Padang Lawas berada di Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Ulu Barumon, dan Kecamatan Sosopan.
- g. Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.
- h. Kawasan pariwisata Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Objek	Lokasi		Jenis Wisata
		Kecamatan	Desa/ kelurahan	
1	Bagas Godang Hasahatan	Barumon	Hasahatan Julu	Budaya dan Sejarah
2	Bagas Godang Janjilobi	Barumon	Janjilobi	Budaya dan Sejarah
3	Tagor	Barumon	Hasahatan Julu	Budaya dan Sejarah
4	Makam Parmata Sapihak	Barumon	Binabo Jae	Budaya dan Sejarah
5	Puncak Binubu	Barumon	Sigala-gala	Budaya dan Sejarah
6	Bagas Godang Hutaraja Lama	Sosa	Hutaraja Lama	Budaya dan Sejarah
7	Makam Sibaso	Sosa	Ampolu	Budaya dan Sejarah
8	Liang Namuap	Sosa	Parapat	Wisata Ritual
9	Sampuran Soniasa	Sosa	Hapung	Wisata Air
10	Paya Loging	Sosa	Hapung	Wisata Air
11	Danau Cekdam, Conoco	Sosa	Ujung Batu	Wisata Air
12	Paya Agung	Sosa	Harang	Wisata Air
13	Pemandian Aek Lakkut	Sosa	Siborna Bunut	Wisata Air
14	Candi Sangkilon	Lubuk	Sangkilon	Budaya dan



No	Nama Objek	Lokasi		Jenis Wisata
		Kecamatan	Desa/ kelurahan	
		Barumun		Sejarah
15	Makam Bujing Sambilan Jogi	Lubuk Barumun	Siali-ali	Budaya dan Sejarah
16	Candi Nagasaribu I, II, III	Barumun Tengah	Tandihat	Budaya dan Sejarah
17	Bagas Godang Unte Rudang	Barumun Tengah	Unte Rudang	Budaya dan Sejarah
18	Candi Simaputung	Barumun Tengah	Siparahu	Budaya dan Sejarah
19	Air Panas Alam	Ulu Barumun	Paringgonan	Wisata Air
20	Pemandian Aek Siraisan	Ulu Barumun	Siraisan	Wisata Air
21	Batu Nadua	Ulu Barumun	Hutanopan	Wisata Air
22	Danau Sosopan	Sosopan	Sosopan	Wisata Air
23	Air Terjun Lompatan Harimau	Batang Lubu Sutam	Sialamanggis	Wisata Air
24	Danau Baru Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	Sungai Korang	Wisata Air
25	Air Terjun Batu Bintang	Batang Lubu Sutam	Batu Bintang	Wisata Air
26	Air Terjun Sipatabung	Batang Lubu Sutam	Botung	Wisata Air
27	Sampuran Harimau	Sosa	Hapung	Wisata Air
28	Air Terjun Aek Bargot	Sosopan	Aek Bargot	Aek Bargot
29	Candi Muara Gambaran	Batang Lubu Sutam	Manggis	Budaya dan Sejarah
30	Bagas Godang Huta Nopan	Lubuk Sutam	Huta Nopan	Budaya dan Sejarah
31	Makam Jired I, II, III	Sosopan	Pagarambira	Budaya dan Sejarah
32	Makam Oppung Soduguron Marga Hasibuan	Barumun	Sabahotang	Budaya dan Sejarah
33	Makam Padang Mandersa	Lubuk Barumun	Siali-ali	Budaya dan Sejarah
34	Makam Jantan Birong Marga Hasibuan	Sosa	Huta Raja Lama	Budaya dan Sejarah
35	Danau Gayambang	Sosa	Ujung Batu	Wisata Air
36	Makam Oppu Sumindak	Ulu barumun	Paringgonan	Budaya dan Sejarah

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

- i. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas permukiman perkotaan seluas ± 9.262 ha (sembilan ribu dua ratus enam puluh dua hektar) dan permukiman perdesaan seluas ± 17.994 ha (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat hektar) tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Kabupaten Padang Lawas yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan Lokal dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah saling terkoneksi.

Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Padang Lawas ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional sistem perkotaan di Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Tidak terdapat PKN di Kabupaten Padang Lawas;
2. Tidak terdapat PKW di Kabupaten Padang Lawas;
3. Kota Sibuhuan sebagai PKL.

Disamping itu untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Padang Lawas, maka hirarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut dikelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

- Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah;
- Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah;
- Daya tarik-menarik kota, yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya;
- Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didayagunakan;
- Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya;
- Pertimbangan rencana struktur perwilayahan yang sudah ada;

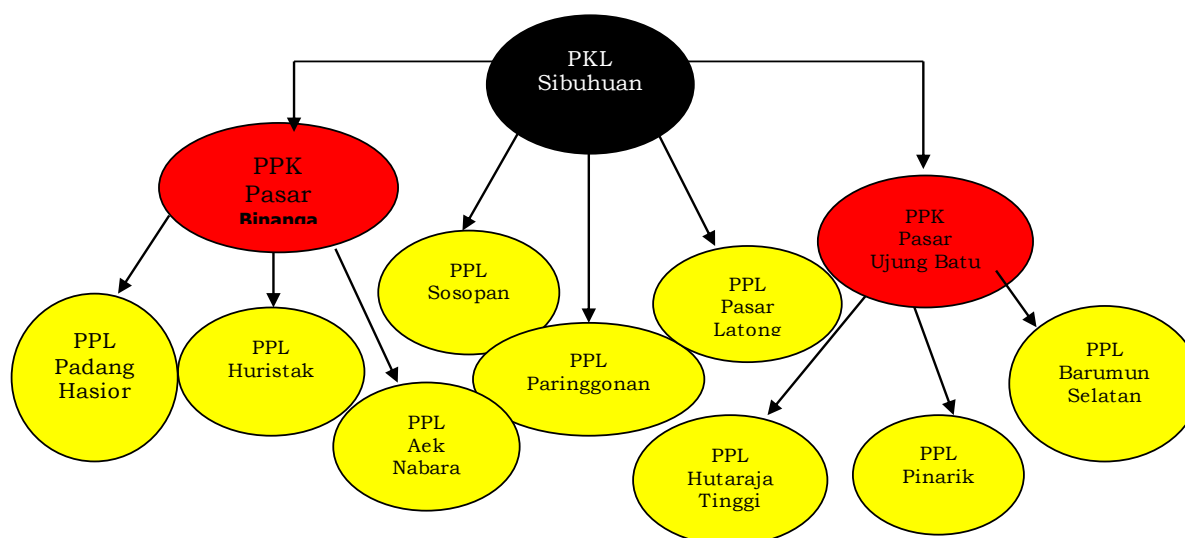
Dengan demikian rencana sistem perkotaan dan wilayah pengembangan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

No	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki/ Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
1	Kota Sibuhuan (Kec. Barumun)	PKL	Sistem Perkotaan	- Sebagai pusat Pemerintahan - Pusat Koleksi dan Distribusi
2	Kota Binanga (Kec. Barumun Tengah)	PPK	Sistem Perkotaan	- Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa - Kota Binanga sebagai simpul transportasi udara
3	Pasar Ujung Batu (Kec. Sosa)	PPK	Sistem Perkotaan	- Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa - Pasar Ujung Batu sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa
4	Kota Sosopan (Kec. Sosopan)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
5	Pasar Paringgonan (Kec. Ulu Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
6	Pasar Latong (Kec. Lubuk Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
7	Kota Huristak (Kec. Huristak)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
8	Kota Hutaraja Tinggi (Kec. Huta Raja Tinggi)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
9	Kota Pinarik (Kec. Batang Lubu Sutam)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa

Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Gambar 2.6.
Ilustrasi Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan puting beliung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dan tabel 2.10 berikut.



Tabel 2.9.
Data Kebakaran Hutan dan Lokasi Hot Spot (Titik Api)
di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 - 2019

No	Wilayah	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Hotspot	Luas Terbakar (Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)	Hotspot	Luas Terbakar (Ha)
1	Kabupaten Padang Lawas	76	6	128	2,355	36	5	27	123,5	16	112,5
2	Provinsi Sumatera Utara	331	146	371	8.217,44	305	817	393	3138,88	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Tabel 2.10.
Wilayah Yang Pernah Terkena Bencana Alam
di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Barumun	Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung
2	Barumun Tengah	Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran Lahan
3	Batang Lubu Sutam	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
4	Huristak	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
5	Hutaraja Tinggi	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
6	Lubuk Barumun	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
7	Sosa	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
8	Sosopan	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan
9	Ulu Barumun	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
10	Barumun Selatan	Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran Lahan
11	Aek Nabara Barumun	Banjir, Longsor, Kebakaran Lahan, Angin Puting Beliung
12	Sihapas Barumun	Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran Lahan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.1.4. Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Aspek demografi atau kependudukan menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas diperkirakan mencapai 281.239 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,19 persen, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sosopan	10.449	10.683	10927	11.158	11 389
2	Ulu Barumun	15.952	16.309	16681	17.034	17 388
3	Barumun	50.097	51.218	52386	53.496	54 607
4	Barumun Selatan	7.714	7.887	8067	8.238	8 409
5	Lubuk Barumun	18.430	18.844	19274	19.682	20 091
6	Sosa	36.134	36.944	37786	38.587	39 389
7	Batang Lubu Sutam	13.639	13.943	14262	14.564	14 866
8	Hutaraja Tinggi	45.019	46.027	47077	48.075	49 074
9	Huristak	22.516	23.021	23586	24.044	24 544
10	Barumun Tengah	20.649	21.112	21592	22.051	22 508
11	Aek Nabara Barumun	12.200	12.473	12757	13.027	13 298
12	Sihapas Barumun	5.204	5.323	5444	5.559	5 676
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		258.003	263.784	269.799	275 515	281 239
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		13.937.797	14.102.911	14.262.147	14 415 391	14 562 549

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2020

Distribusi penduduk terbesar terdapat dalam kelompok umur 0-4 tahun, sementara distribusi penduduk terkecil terdapat dalam kelompok umur 75+ baik dilihat dari jenis kelaminnya.

Tabel 2.12.
Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Distribusi Penduduk (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	19.204	18.610	37.814	13,45
2	5-9	17 985	17 441	35 426	12,60
3	10-14	16 286	15 611	31 897	11,34
4	15-19	12 919	12 586	25 505	9,07
5	20-24	12 564	12 119	24 683	8,78
6	25-29	10 933	10 729	21 662	7,70
7	30-34	9 766	9 817	19 583	6,96
8	35-39	9 091	9 075	18 166	6,46
9	40-44	7 592	7 799	15 391	5,47
10	45-49	6 592	6 913	13 705	4,87
11	50-54	5 451	5 701	11 152	3,97
12	55-59	4 301	4 718	9 019	3,21
13	60-64	3 539	4 046	7 585	2,70
14	65-69	2 324	2 399	4 723	1,68
15	70-74	1 125	1 379	2 504	0,89
16	75+	1 044	1 380	2 424	0,86
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		140 916	140 323	281 239	100
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		7 266 207	7 296 342	14 562 549	100

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

Berikut merupakan tabel populasi penduduk menurut kewarganegaraan berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.



Tabel 2.13.
Populasi Penduduk Menurut Kewarganegaraan Berdasarkan Sensus
Penduduk Tahun 2019 Kabupaten Padang Lawas
Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010

No	Wilayah	Kewarganegaraan	
		WNI	WNA
1	Kabupaten Padang Lawas	225.108	3
2	Provinsi Sumatera Utara	12.930.319	772

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010

Dilihat dari kerukunan umat beragama masyarakat Kabupaten Padang Lawas paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 94,98 persen dan diikuti oleh agama dan Kristen Protestan dengan total sebesar 4,78 persen dan Kristen Katolik dengan total sebesar 0,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14.
Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara (%) Tahun 2019

No	Wilayah	Umat Agama								Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	TT/TD	
1	Kabupaten Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100
2	Provinsi Sumatera Utara	66,09	27,03	3,97	0,11	2,34	0,01	0,04	0,40	100

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010

Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat di Kecamatan Hutaraja Tinggi, diikuti Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Huristak, berikut tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2019 :

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sosopan	5.755	5.634	11 389	102,15
2	Ulu Barumun	8.537	8.851	17 388	96,45
3	Barumun	26.897	27.710	54 607	97,07
4	Barumun Selatan	4.213	4.196	8 409	100,41
5	Lubuk Barumun	10.027	10.064	20 091	99,63
6	Sosa	19.760	19.629	39 389	100,67
7	Batang Lubu Sutam	7.464	7.402	14 866	100,84
8	Hutaraja Tinggi	25.253	23.821	49 074	106,01
9	Huristak	12.396	12.148	24 544	102,04
10	Barumun Tengah	11.220	11.288	22 508	99,40
11	Aek Nabara Barumun	6.573	6.725	13 298	97,74
12	Sihapas Barumun	2.821	2.855	5 676	98,81
Kabupaten Padang Lawas		140.916	140.323	281 239	100,42
Provinsi Sumatera Utara		7 266 207	7 296 342	14 562 549	99,6

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020



Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Hutaraja Tinggi yaitu sebesar 12.327 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 3,98 persen tetapi kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Barumun sebesar 336,39 jiwa/ km².

Tabel 2.16.
Jumlah Rumah Tangga, Rata-Rata Anggota Rumah Tangga,
dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019
di Kabupaten Padang Lawas

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Sosopan	2.590	4,40	26,61
2	Ulu Barumun	3.837	4,53	87,66
3	Barumun	12.093	4,52	336,39
4	Barumun Selatan	1.923	4,37	87,34
5	Lubuk Barumun	4.692	4,28	62,18
6	Sosa	8.895	4,43	57,75
7	Batang Lubu Sutam	3.515	4,23	52,44
8	Hutaraja Tinggi	12.327	3,98	66,18
9	Huristak	5.476	4,48	50,14
10	Barumun Tengah	5.338	4,22	123,83
11	Aek Nabara Barumun	2.890	4,60	51,71
12	Sihapas Barumun	1.354	4,19	115,39
Kabupaten Padang Lawas		64.930	4,33	72,25
Provinsi Sumatera Utara		3 399 821	4,28	200

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB dari tahun 2015 sampai dengan 2019, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sangat masuk akal jika pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi dan industri pengolahan juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang belum ada di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut ini:



Tabel 2.17.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2019
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	3.385,35	53,38	3.559,84	52,93	3.719.940,19	52,32	3.922,76	52,07	4.122,57	51,80
2	Pertambangan & penggalan	31,14	0,49	34,16	0,51	36.899,00	0,52	40,07	0,53	43,17	0,54
3	Industri pengolahan	896,51	14,14	952,44	14,16	1.022.338,96	14,38	1.087,00	14,43	1.155,32	14,52
4	pengadaan Listrik dan gas	16,55	0,26	18,09	0,27	18.932,36	0,27	20,13	0,01	21,28	0,27
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
6	Konstruksi	905,12	14,27	992,67	14,76	1.075.994,76	15,13	1.157,45	15,36	1.241,94	15,60
7	Perdagangan besar dan eceran ,reparasi mobil dan sepeda motor	428,85	6,76	447,41	6,65	477.733,28	6,72	504,54	6,70	528,63	6,64
8	transportasi dan pergudangan	75,44	1,19	79,58	1,18	86.752,88	1,22	92,02	1,22	97,29	1,22
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	64,41	1,02	67,87	1,01	72.751,14	1,02	79,49	1,06	84,30	1,06
10	Informasi dan komunikasi	42,95	0,68	47,20	0,70	50.450,32	0,71	54,59	0,72	58,74	0,74
11	jasa keuangan dan asuransi	52,87	0,83	57,70	0,86	57.737,47	0,81	58,45	0,78	59,33	0,75
13	real estate	183,13	2,89	200,92	2,99	212.111,67	2,98	223,47	2,97	234,73	2,95
	jasa perusahaan	3,30	0,05	3,57	0,05	3.753,64	0,05	3,93	0,05	4,11	0,05
14	administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	195,04	3,08	197,92	2,94	205.855,24	2,90	217,51	2,89	231,29	2,91

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
15	jasa pendidikan	25,84	0,41	27,89	0,41	28,260,15	0,40	29,96	0,40	31,49	0,40
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	33,06	0,52	36,30	0,54	38,493,69	0,54	40,56	0,54	42,66	0,54
17	Jasa lainnya	1,98	0,03	2,13	0,03	2.246,01	0,03	2,36	0,03	2,47	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		6.341,529,34	100	6.725,983	100	7.110.250,8	100	7.534,30	100	7.959,31	100
PDRB Provinsi Sumatera Utara		440.955.852,47	100	463.775.464,88	100	478.531,23	100	512.765,63		539.526,60	

Keterangan :

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020



Perkembangan kontribusi sektor-sektor dalam PDRB tahun 2015 sampai 2019 atas harga berlaku (HB) terjadi penurunan dan kenaikan pada seluruh sektor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.850.744,65	4.229.907,3	4.622.150,3	4.951.640,0	5.249,97
2	Pertambangan & penggalian	40.547,23	46.761,2	50.522,4	55.897,4	61,12
3	Industri pengolahan	1.234.419,97	1.443.989,7	1.633.210,8	1.818.251,9	1.969,80
4	pengadaan Listrik dan gas	14.009,36	15.827,2	18.523,3	20.855,3	22,13
5	pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	1.235.765,40	1.409.641,4	1.572.780,5	1.762.995,2	1.953,25
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	573.913,21	642.521,4	692.198,0	768.920,4	815,01
8	transportasi dan pergudangan	104.120,54	117.859,2	128.501,4	136.917,3	147,44
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	86.410,91	95.610,6	103.764,9	115.036,6	123,78
10	Informasi dan komunikasi	43.943,30	48.886,2	55.276,4	60.876,4	66,67
11	jasa keuangan dan asuransi	72.005,24	84.428,4	88.861,4	92.348,5	93,75
12	real estate	270.534,39	321.537,3	356.624,3	393.887,9	422,37
13	jasa perusahaan	4.580,56	5.254,8	5.738,2	6.175,3	6,62
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	248.669,64	263.659,3	289.109,1	311.697,4	335,85
15	jasa pendidikan	32.097,71	35.424,8	37.080,0	40.284,4	43,45
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	38.073,60	43.810,0	47.107,7	51.783,9	56,50
17	Jasa lainnya	2.690,77	3.195,6	3.559,2	3,84	4,18
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.288.061,90	7.852.526,47	9.704,98	10.595,86	11.371,98
PDRB Provinsi Sumatera Utara		470.221.983,57	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai tertinggi berada pada sektor pengadaan listrik dan gas. Sementara Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Konstan dengan nilai tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel. 2.19.
Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Dan Harga Konstan (Hk)
Tahun 2019 Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	Distribusi	
		Hb (Juta Rupiah)	Hk %
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5 249,97	5,09
2	Pertambangan dan penggalian	61,12	7,74
3	Industri pengolahan	1 969,80	6,29
4	Pengadaan Listrik dan gas	22,13	5,67
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang		-
6	Konstruksi	1 953,25	7,30
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	815,01	4,77
8	Transportasi dan pergudangan	147,44	5,73
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	123,78	6,05
10	Informasi dan komunikasi	66,67	7,60
11	Jasa keuangan dan asuransi	93,75	0,89
12	Real estate	422,37	5,03
13	Jasa perusahaan	6,62	4,43
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	335,85	6,34
15	Jasa pendidikan	43,45	5,13
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	56,50	5,17
17	Jasa lainnya	4,18	4,95
PDRB Kabupaten Padang Lawas		11 371,98	5,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.2.1.2. PDRB perkapita

Berikut adalah tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Padang Lawas :

Tabel 2.20.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019
di Kabupaten Padang Lawas

No.	Wilayah	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	30.435.759	33.388.751	35.971.148	38.458,40	40.435,31
2	Provinsi Sumatera Utara	40.837.732,96	44.799.079,17	47.963.990,87	51.455,53	55.054,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

Tabel 2.21.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019
di Kabupaten Padang Lawas

No.	Wilayah	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	24.579.285	25.498.070	26.353.881	27.346,23	28.300,86
2	Provinsi Sumatera Utara	31.769.043,55	33.125.154,19	34.183.579,22	35.570,71	37.048,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 adalah sebesar 67,59 (kategori sedang) meningkat menjadi 68,16 pada tahun 2019 (kategori sedang), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.22.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No	Wilayah	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	66,98	13,02	8,69	9.100	68,16
2	Provinsi Sumatera Utara	68,95	13,15	9,45	10.649	71,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio). Nilai gini ratio berkisar antara 0 sampai 1 dimana nilai gini ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya antara 0,36–0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, sementara apabila nilai gini ratio diantara 0,20–0,35 menunjukkan ketimpangan yang merata.

Berdasarkan data BPS menunjukkan gini ratio Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu 2015-2019 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Berikut merupakan tabel Gini Coefficient Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 2.23.
Gini Coefficient Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
1	2015	0.2969	0.3360
2	2016	0.3256	0.3190
3	2017	0.2482	0.3150
4	2018	0.2985	0.3150
5	2019	0.2990	0,3170

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin yaitu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami perubahan dari setiap tahunnya, berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas.

Tabel. 2.24.
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019

No	Wilayah	Jumlah (.000 jiwa) / Persentase Penduduk Miskin (%)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%
1	Kabupaten Padang Lawas	9,38	20,34	8,03	22,38	9,38	20,34	8,03	22,38	23,17	8,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Perkembangan Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1,36 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,91 persen, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel. 2.25.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas
Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015–2019

No.	Wilayah	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	0.91	1.36	1.17	1.07	1,64
2	Provinsi Sumatera Utara	1.65	1.77	1.71	1.56	1,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Hal ini merupakan kemampuan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan aktif dalam pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Padang Lawas.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Semangkin besar angka melek huruf berarti semangkin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis yang akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan. Sebab-sebab langsung yang mempengaruhi angka melek huruf dan buta huruf orang dewasa adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar dimasyarakat, sedangkan sebab tidak langsung yang mempengaruhi melek huruf adalah status sosial ekonomi yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan makna buta huruf. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 – 2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, ini dikarenakan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis mengalami peningkatan yang berarti.

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 - 2019
Kabupaten Padang Lawas

No.	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	6.298	12.129	10.211	9.420	6.105
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	6.362	12.291	10.268	9.481	6.105
Angka Melek Huruf Kabupaten Padang Lawas		99	98	99	99	99
Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara		99,52				

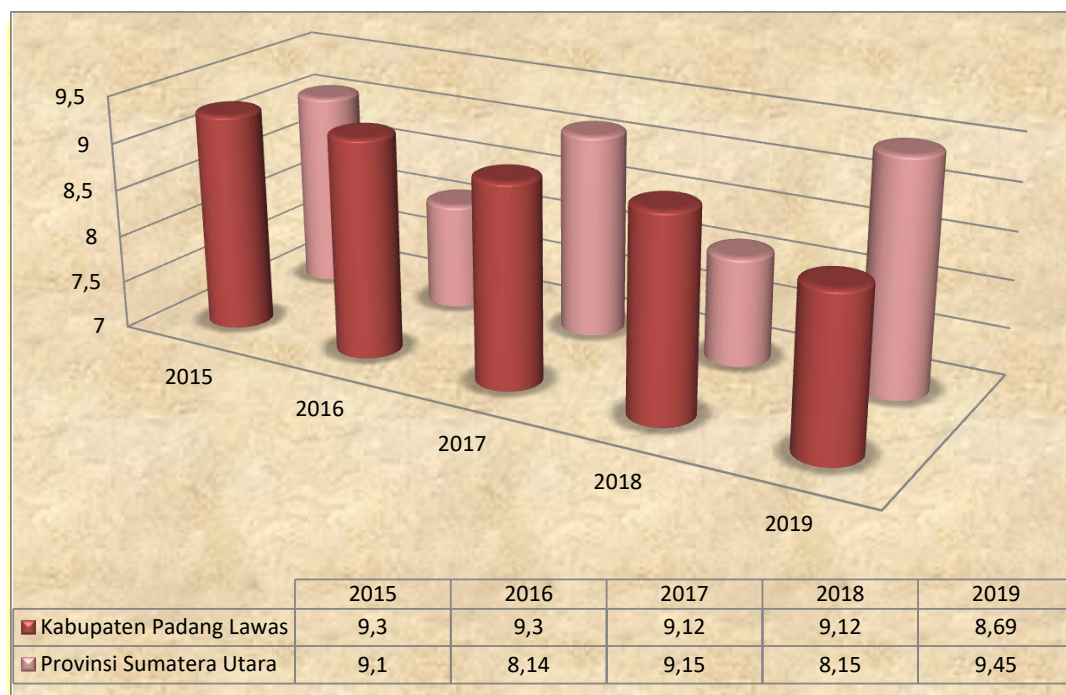
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.2.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 9,1 sementara terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 8,14.

Gambar 2.8.
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2019



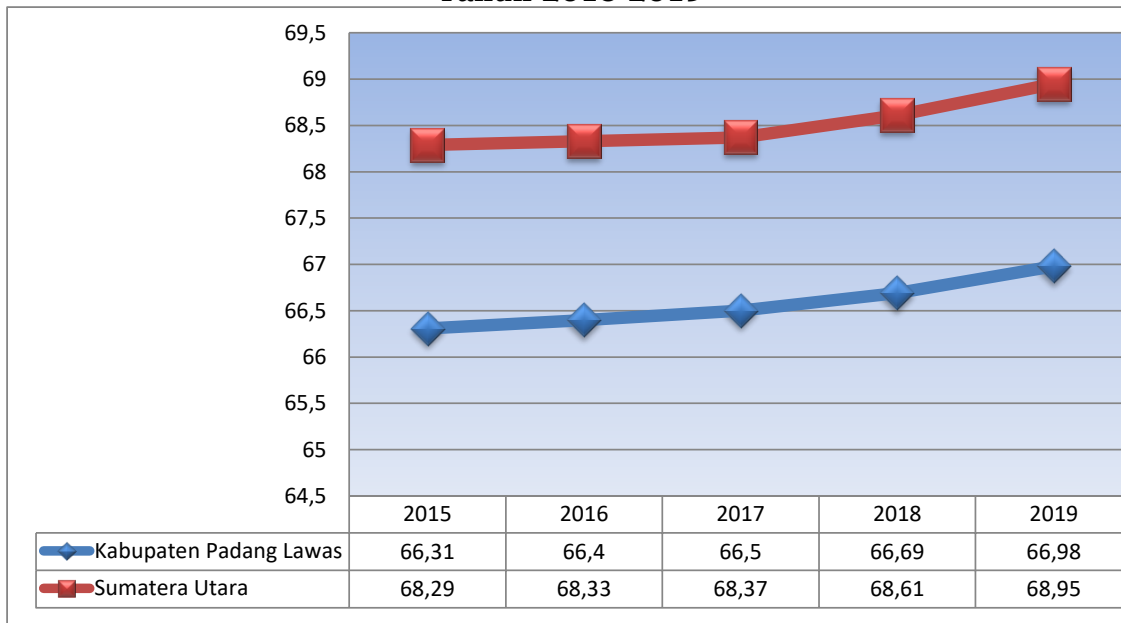
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Perkembangan Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.9.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015-2019

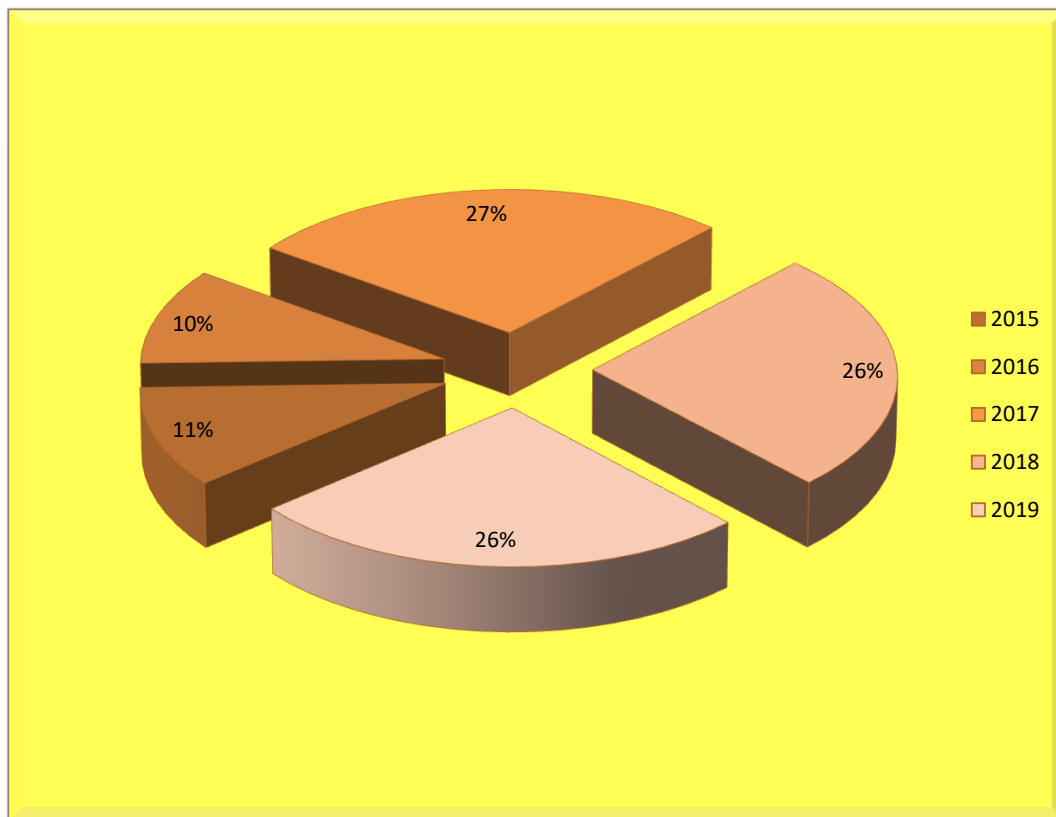


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2019

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun) yang umumnya terjadi pada anak-anak. Gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang. Sedangkan persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Data cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.10.
Cakupan Gizi Buruk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2019

2.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Berikut merupakan tabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (perban) penduduk umur 15 tahun ke atas menurut Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.27.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2019 (%)

No	Wilayah	TPAK					TPT				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	71.87	67.56	70.21	70.05	76.10	5.95	5.55	4.24	4.10	4.24
2	Provinsi Sumatera Utara	67.28	65.99	68.88	71.82	70.19	6.71	5.84	5.60	5.56	5.41

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.2.2.7. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah berusaha secara maksimal agar memperoleh Opini BPK yang baik terhadap kualitas laporan keuangan, sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2019 untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berikut ini adalah hasil perolehan Opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 2.28.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.2.3. Fokus seni budaya dan Olahraga

Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Padang Lawas baru mulai berkembang pada tahun 2015, hal ini dikarenakan minat yang semakin meningkat dari masyarakat sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.29.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015- 2019

No.	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	12	12	12	12	-
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	0	0	0	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	11	14	14	14	24
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	1	1	1	1	3

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019
di Kabupaten Padang Lawas

No.	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Sosopan	1	0	1	0
2	Ulu Barumun	1	0	1	0
3	Barumun	1	0	2	0
4	Barumun Selatan	1	0	1	0
5	Lubuk Barumun	1	0	1	0
6	Sosa	1	0	2	0
7	Batang Lubu Sutamn	1	0	1	0
8	Hutaraja Tinggi	1	0	1	0
9	Huristak	1	0	1	0
10	Barumun Tengah	1	0	1	0
11	Aek Nabara Barumun	1	0	1	0
12	Sihapas Barumun	1	0	1	0
Jumlah		12	0	14	1

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Berikut merupakan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah yang mana angka tertinggi SD/MI berada pada jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun di tahun 2014 sebesar 99,96 kemudian untuk jenjang SMP/MTs angka tertinggi

berada pada jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 92,60 di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2015– 2019 di Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019*)
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Padang Lawas						
1	PAUD/ TK					
1.1.	Jumlah Murid Usia <6 Tahun	4,047	3,838	3,947	3,939	3,939
1.2.	Jumlah Penduduk Usia <6 Tahun	4,147	3,938	4,047	4,112	4,112
1.3.	APS PAUD	97,60	97,50	97,50	96	96
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	36,959	37,168	37,529	32,806	32,806
2.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	35,760	36,843	36,522	37,122	37,122
2.3.	Aps SD/MI	89,80	93,00	93,30	83,97	92,5
3	SMP/MTs					
3.1.	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	6.726	6.641	6.759	10.666	10.666
3.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	4.173	5.334	5.632	13.741	13.741
3.3.	APS SMP/MTs	92,60	90,10	90,1	90,1	92,4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

*) Data Sementara

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Angka partisipasi kasar Kabupaten Padang Lawas tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk tingkat SD setiap tahunnya mengalami penurunan, tingkat SMP pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan, dan tingkat SMA/SMK setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana terdapat pada tabel 2.35 berikut ini.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami perubahan sebagaimana terdapat pada tabel 2.36 berikut ini.



Tabel 2.32.

Angka Partisipasi Kasar

Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

No		Wilayah		Angka Partisipasi Kasar (APK)														
				2015			2016			2017			2018			2019		
				SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK
1	Kabupaten Padang Lawas	114,64	105,93	75,44	112,64	114,64	105,93	75,44	112,64	114,64	105,93	75,44	112,64	112,43	91,30	101,30		
2	Provinsi Sumatera Utara	111,96	103,96	86,79	109,56	111,96	103,96	86,79	109,56	111,96	103,96	86,79	109,56	109,49	90,38	94,04		

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2020

Tabel 2.33.

Angka Partisipasi Murni

Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019

No	Wilayah	Angka Partisipasi Murni (APM)																	
		2015						2016			2017			2018			2019		
		SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK			
1	Kabupaten Padang Lawas	96,65	82,26	56,09	100,41	96,65	82,26	56,09	100,41	96,65	82,26	78,98	65,33	98,75	108,06	112,43			
2	Provinsi Sumatera Utara	93,85	83,57	65,51	94,41	93,85	83,57	65,51	94,41	93,85	83,57	79,12	67,05	97,67	80,26	67,53			

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2020

4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Data rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah, dimana rasio di Kabupaten Padang Lawas pada jenjang pendidikan SD/MI setiap tahunnya adalah sama. Sementara rasio pada jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio tertinggi ada pada tahun 2015. Sedangkan untuk rasio SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Tabel 2.34.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Padang Lawas

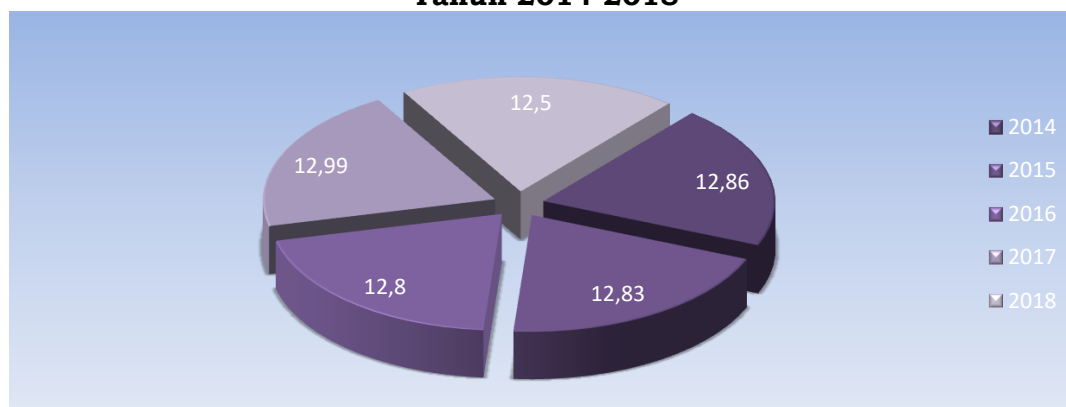
NO.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019*)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	192	196	196	196	205
1.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	37,397	36,84	36,84	36,84	37.997
1.3.	Rasio	0.5	0.5	0.5	0.5	54
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	66	71	75	79	81
2.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	4.173	9.445	5.632	13.741	18.385
2.3.	Rasio	1.09	0.58	0.75	0.75	44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Sumatera Utara						
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	9.49	9.528	9.469	9.532	
1.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	1.729.300	1.754.000	1.735.078	1.746.120	
1.3.	Rasio	182	184	184	184	
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	2.392	2.419	2.525	2.610	
2.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	817.6	843.8	666.883	672.577	
2.3.	Rasio	340	349	348	348	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

5. Angka Usia Harapan Sekolah

Angka usia harapan sekolah Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 mengalami perubahan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 angka usia harapan sekolah sebesar 12,84 dan pada tahun 2019 sebesar 13 sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11.
Angka Usia Harapan Sekolah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020



6. Rasio Guru/Murid

Rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar SD/MI di Kabupaten Padang Lawas setiap tahun mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya. Hal ini serupa dengan yang terjadi juga di Provinsi Sumatera Utara. Sementara rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Padang Lawas juga mengalami perubahan yang fluktuatif disetiap tahunnya begitu juga yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.35.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1.421	1.728	1.512	1.617	1.207
1.2.	Jumlah Murid	33.592	34.26	37.259	32.806	3.353
1.3.	Rasio	23,63	19,82	24,64	20,28	36
2	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah Guru	765	922	565	1.442	645
2.2.	Jumlah Murid	3.866	8.510	6.759	13.741	13.248
2.3.	Rasio	5,05	9,22	11,96	9,52	48
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Utara						
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	89.23	109.204	100.454	100.576	
1.2.	Jumlah Murid	1.785.562	1.745.715	1.735.078	1.746.120	
1.3.	Rasio	20,01	15,98	17,27	17,36	
2	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah Guru	38.637	41.638	40.498	40.512	
2.2.	Jumlah Murid	657.676	662.538	666.883	672.577	
2.3.	Rasio	17,02	15,91	16,46	16,60	
RPJMN Guru/Murid tingkat SD/MI						
RPJMN Guru/Murid tingkat SMP/MTs						

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tahun 2020

Jumlah guru TK/PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Lawas yang terbanyak terdapat pada tahun 2018 sebesar 497 meningkat menjadi 530 Pada tahun 2019. Jumlah guru SD/MI pada tahun 2018 sebesar 1,786 orang meningkat menjadi 1.922 orang pada tahun 2019. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 sebanyak 932 orang meningkat menjadi 1.151 orang pada tahun 2019..

Tabel 2.35.
Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAUD/ TK	346	352	401	497	530
2	SD/ MI	1.752	1.728	1.728	1.786	1922
3	SMP/ MTs	899	909	917	932	1251

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020



Tabel 2.36.
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
I	Pendidikan								
	Pendidikan formal								
	SD/ MI (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah)	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	95%	2018	99,50%	99,50%	99,50%	98,49%	99,96%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2018	0,40%	0,26%	0,21%	0,13%	0,30%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2018	60%	63%	65%	68%	60%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90%	2018	60%	60%	60%	70%	20%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	70%	70%	80%	80%	82%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95%	2018	75%	80%	85%	90%	92%
		Jumlah siswa per kelas	32 siswa/kelas	2018	34	34	34	34	32%
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2018	65%	70%	75%	80%	50%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95%	2018	80%	85%	90%	90%	89%
	SMP/ Mts	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	90%	2018	80%	80%	80%	85%	80%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2018	1,32%	1,28%	1,22%	1,18%	0,30%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2018	65%	70%	70%	75%	70%
		Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80%	2018	35%	40%	40%	40%	50%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	80%	2018	70%	70%	70%	70%	70%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	75%	80%	85%	90%	85%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	90%	2018	85%	90%	95%	100%	95%
		Jumlah siswa per kelas	36 siswa	2018	36	36	36	36	36%
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2018	80%	85%	90%	90%	90%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70%	2018	70%	70%	70%	85%	88%
	Pendidikan Non Formal	Bisa membaca dan menulis	85%	2018	70%	80%	80%	85%	98%
		Orang buta aksara dalam kelompok usia 14 - 44 tahun	< 10%	2018	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,02%



No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
	Kesetaraan SD (program Paket-A)	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/ MI	< 10%	2018	1,44	1,43%	1,34%	1,29%	1,22%
		Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 5%	2018	1,18	0,15%	0,14%	0,12%	0,10%
		Kepemilikan modul	50%	2018	74%	78,50%	79,50%	79,87%	80,50%
		Program paket A oleh peserta didik	<1%	2018	0,14%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95%	2018	98,70%	98,78%	98,80%	99,80%	98,78%
		Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/ MTs) atau Program Paket B	90%	2018	80%	85%	87,00%	88,00%	99,80%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2018	80%	80%	80%	80%	80%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	90%	2018	60%	70%	70%	70%	20%
		Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	-	78%	78%	78%	78%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2018	30%	30%	35%	35%	50%
		Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100%	2018	50%	60%	60%	60%	60%
	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/ MT	<10%	2018	1,32%	1,28%	1,22%	1,18%	0,18%
		Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif	<5%	2018	10%	10%	10%	10%	0,2%
		Kepemilikan Modul	100%	2018	50%	50%	60%	70%	30%
		Program paket B oleh peserta didik	<2%	2018	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	50%	2018	60%	70%	70%	70%	90%
		Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA atau Program Paket C)	50%	2018	60%	70%	70%	70%	80%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90%	2018	80%	80%	80%	90%	70%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan	100%	2018	50%	60%	70%	70%	20%



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
		Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	70%	70%	70%	70%	60%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2018	40%	40%	40%	50%	40%
	Kesetaraan SMA (Program Paket C)	Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/ MA/ SMK	<10%	2018	3,19%	3,08%	2,68%	2,34%	0,80%
		Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5%	2018	20%	20%	20%	20%	1,50%
		Kepemilikan Modul	60%	2018	40%	50%	50%	60%	20%
		Program paket C oleh peserta didik	<5%	2018	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	60%	2018	70%	80%	90%	90%	98,50%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	10%	2018	20%	20%	20%	20%	10%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi	90%	2018	30%	40%	40%	50%	2%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2018	80%	80%	80%	90%	98,50%
		Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	60%	60%	70%	80%	60%
		Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2018	40%	40%	40%	40%	30%
	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencarian	Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang	25%	2018	5%	5%	5%	5%	10%
		Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100%	2018	50%	50%	50%	50%	65%
		Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	10%	2018	1%	1%	1%	1%	1%
		Kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang dibina secara terus menerus	50%	2018	10%	10%	10%	10%	40%



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	20%	2018	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%
		Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek dari kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan	100%	2018	30%	30%	30%	30%	50%
		Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	2018	60%	60%	60%	60%	60%
		Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	100%	2018	85%	90%	90%	95%	98%
		Jumlah kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70%	2018	40%	40%	40%	40%	50%
		Tersedianya data dasar kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui terus menerus	100%	2018	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Taman Kanak-kanak	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program TK/ RA	20%	2018	40%	40%	50%	55%	95%
		Guru yang layak mendidik TK/ RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2018	30%	30%	30%	30%	40%
		TK/ RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90%	2018	70%	75%	78%	78%	79%
		TK/ RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60%	2018	25%	30%	32%	35%	40%
	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65%	2018	55%	60%	60%	60%	70%
		Jumlah Anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal	50%	2018	10%	10%	10%	10%	10%
		Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50%	2018	40%	40%	40%	40%	50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Lawas Tahun 2020

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena kesehatan menjadi salah satu penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Jumlah Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi. Dengan nilai yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 37 jiwa, yang terendah sebesar 3 jiwa di tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 kematian bayi di Kabupaten Padang Lawas berjumlah 10 jiwa.

Tabel 2.37.
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2019

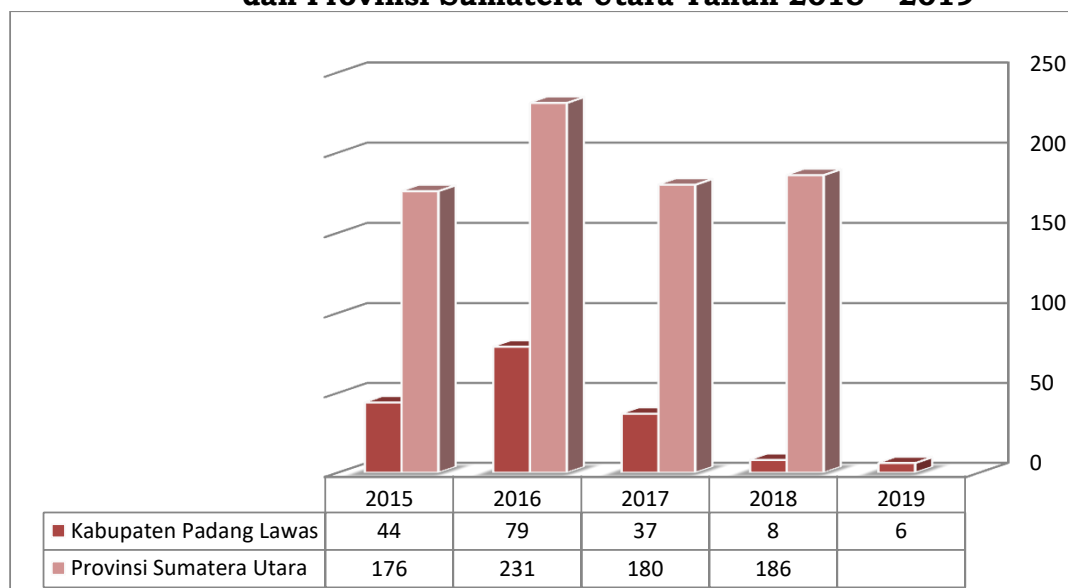
No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	11	6	37	3	10
2	Provinsi Sumatera Utara	874	1069	1066	869	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dapat dilihat pada gambar berikut ini, dimana jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 79 jiwa, dan jumlah terendah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 6 jiwa.

Gambar 2.12.
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

3. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah sakit

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu yang berada di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.38.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Wilayah	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
Kabupaten Padang Lawas	281.239	16	0.057	7	0.026	37	0.13

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Tabel 2.39.
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No	Wilayah	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kabupaten Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	1	0,003	1	0,003	2	0,007
2	Provinsi Sumatera Utara	49	0,0010	3	0,0001	8	0,0002	33	0,0006	164	0,0032	257	0,0050

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020



4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Data Jumlah Dokter yang tersebar diseluruh Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40.
Jumlah Dokter di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kabupaten Padang Lawas	281.239	82	0,029
2	Provinsi Sumatera Utara	14.415.391	4.792	44,87

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang tertangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani adalah perbandingan dari Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu juga. Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2015 – 2019 mengalami fluktuasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2019

No	Wilayah	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	148	300	1174	401	711
2	Sumatera Utara	30,85	66,97	78,38	66	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

6. Cakupan Balita Gizi Buruk

Data cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

No	Wilayah	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	35	34	89	100	83
2	Sumatera Utara	5	3,1	5,2	5,4	1361

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

7. Cakupan Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek



(kerdil) dari standar usianya. Data balita stunting untuk Kabupaten Padang Lawas bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)
1	SOSOPAN	SOSOPAN	646	119	145	264	40,87
2	ULU BARUMUN	PARINGGONAN	1304	44	124	168	12,88
3	BARUMUN	SIBUHUAN	1137	94	194	288	25,33
		TANJUNG BOTUNG	479	82	78	160	33,40
4	BARUMUN SELATAN	BATANG BULU	675	89	99	188	27,85
5	SOSA	PASAR UJUNG BATU	1109	294	285	579	52,21
6	HUTA RAJA TINGGI	HURAGI	1467	372	225	597	40,70
		UPT UJUNG BATU III	147	37	31	68	46,26
		UJUNG BATU I	131	33	21	54	41,22
7	BATANG LUBU SUTAM	PINARIK	1444	14	71	85	5,89
8	LUBUK BARUMUN	LATONG	1056	197	167	364	34,47
9	AEK NABARA BARUMUN	PADANG GARUGUR	1117	61	123	184	16,47
10	BARUMUN TENGAH	BINANGA	844	22	89	111	13,15
		GADING	222	7	32	39	17,57
11	HURISTAK	HURISTAK	1203	157	189	346	28,76
12	SIHAPAS BARUMUN	SIHAPAS	445	9	19	28	6,29
	PADANG LAWAS		13426	1631	1892	3523	26,24

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Data status gizi bayi dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.44.
Status Gizi Bayi Usia 0-59 Bulan berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019

No	Tahun	Persentase				
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk	Sangat Kurus+Kurus
1	2015	11,2	10,5	60,7	17,6	21,7
2	2016	4,0	13,6	76,7	5,6	17,6
3	2017	5,4	8,7	81,8	4,2	14,0
4	2018	0	0	0	0	0
5	2019	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020



Tabel 2.45.
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
II Kesehatan									
Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2018	90	95	74	63	45,0	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2018	70	80	12,5	4,9	51,9	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2018	52	57	87	68,5	42,6	
	Cakupan pelayanan nifas	90%	2018	80	90	88,7	62,8	58,2	
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	2018	70%	80%	22	21	14,9	
	Cakupan kunjungan bayi	90%	2018	80%	90%	81	95	89,3	
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2018	21%	36%	27	27	29,9	
	Cakupan pelayanan anak balita	90%	2018	70	90	74,7	80	80	
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	2018	100%	100%	89	98	98	
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2018	100%	100%	100	100	100	
	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2018	35%	70%	52	98	61	
	Cakupan peserta KB aktif	70%	2018	82%	85%	54	64	81,2	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2018	100%	100%	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2018	100	100	100	100	100	



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab / Kota	100% 100%	2018 2018	100 100%	100 100%	100 100	100 100	100 100
	Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2018	100%	100%	100	100	100
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2018	60	80	71	31	31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020



2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

1) Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46.
Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
Berdasarkan Kondisi Tahun 2015 - 2019

TAHUN	KONDISI JALAN KABUPATEN (Km)				
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
2015	102,55	108,70	475,92	416,94	1104,10
2016	137,04	106,94	458,98	401,14	1104,10
2017	159,17	106,41	446,73	391,80	1104,10
2018	201,52	106,41	434,73	361,45	1104,10
2019	198,06	134,81	378,98	392,23	1104,10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

Tabel 2.47.
Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Tahun 2015 - 2019

NO	KONDISI	JUMLAH JEMBATAN PROVINSI (buah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	28	36	48	73,00	81
2	Kondisi Sedang	20	16	10	10,00	10
3	Kondisi Rusak	21	20	24	14,00	15
4	Kondisi Sedang Dibangun	19	28	23	13,00	11
TOTAL		72	88	100	105	117
Panjang jembatan (m)		2.029,08	2.229,08	2.609,68	2.842,68	3.043,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

1. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Utama dalam pengelolaan Sumber Daya Air khususnya dalam pengelolaan irigasi adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub Bidang Sumber Daya Air yakni terpenuhinya Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70 persen pada tahun 2019.

Rasio jaringan irigasi dalam keadaan baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2015-2019, menunjukkan adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 2.48.
Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan
Dalam Keadaan Optimal Tahun 2015 - 2019

Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
Optimalisasi Layanan Irigasi Permukaan (%)	10	15	22	25	40
Optimalisasi Layanan Jaringan Irigasi Rawa (%)	7	10	15	17	20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Penyediaan Air Baku bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, kebutuhan air rumah tangga (air minum dan air bersih) dan keperluan lainnya. Penyediaan air baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ di Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan optimal selama tahun 2015-2019, menunjukkan adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49.
Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ
Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014-2018				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sarana Air Baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ (Unit) terbangun/terehabilitasi	1	1	2	2	3
Jumlah Embung terbangun	2	1	1	2	4
Jumlah Embung di rehabilitasi	2	3	5	3	4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.1.3.2. Penataan Ruang

1) Telaahan Terhadap RTRW

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Penataan Ruang adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub bidang penataan ruang, yakni persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100 persen pada tahun 2019.

Capai kinerja sub urusan penataan ruang ini masih belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun 2017, fokus penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas adalah masih terkait proses legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.



Oleh karena itu, target untuk memiliki dokumen dan regulasi penataan ruang hingga rencana rinci tata ruang belum dapat terealisasi.

Tabel 2.50.
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
III	Pekerjaan Umum								
	Sumber Daya Air	Tersedianya air baku utk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari			21	35	48	65	77
		Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada			29	31	34	39	43
	Jalan								
	Jaringan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kab/ kota (aksesibilitas)			643	676	710	772	813
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan (mobiltas)			1104	1104	1104	1104	1104
		Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)			211,25	244	265,6	308	332
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman			211,25	244	265,6	308	332
		Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana			102,6	137	159,7	201,5	198,1
	Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			21	35	48	65	75
Sanitasi lingkungan									
Air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai			-	-	-	-	-	



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
III	Pekerjaan Umum				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota			-	-	-	-	-
	Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan			-	-	-	-	-
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan			-	-	-	-	-
	Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun			10.586	16.589	22.489	26.721	30.764
	Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			-	-	-	-	-
	Penataan bangunan dan lingkungan	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab/ Kota							
		Tersedianya pedoman Harga standard Bangunan Gedung Negara di kab/ kota			4.531.000	4.873.000	5.340.000	5.080.000	5.340.000
	Jasa Konstruksi	Penerbitan IJUK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyarikat lengkap			-	-	-	-	-
		Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruktur			-	-	-	-	-
	Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kab/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			-	-	-	-	-
		Terlaksananyaa penjahtingan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap			-	-	-	-	-



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
III	Pekerjaan Umum								
		disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang							
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTRW kab/ kota beserta rencana rincinya			-	-	-	-	-
		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja			-	-	-	-	-
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan			43.650	43.652	43.655	43.657	43.657

2.3.1.4. Perumahan Rakyat

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 648.II/058-3/KPTS/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas, dengan luas sebesar 231,41 Ha, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM ²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM ²)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kel. Pasar Sibuhuan LK. I	Barumun	1	7,24	3.071	3,701	Masyarakat	Sedang
2	Kel. Pasar Sibuhuan LK. II	Barumun	1,5	7,02	3.924	2,616	Masyarakat	Sedang
3	Kel. Pasar Sibuhuan LK. III	Barumun	1,5	7,24	3.189	2,126	Masyarakat	Sedang
4	Kel. Pasar Sibuhuan LK. IV	Barumun	2	7,24	3.146	1,573	Masyarakat	Sedang
5	Kel. Pasar Sibuhuan LK. VI	Barumun	2	4,25	2.030	1,015	Masyarakat	Ringan
6	Binabo Julu	Barumun	7,33	7,33	536	73,12	Masyarakat	Sedang
7	Sibuhuan Julu	Barumun	9,00	9,19	1.640	182,2	Masyarakat	Sedang
8	Hasahatan Jae	Barumun	9,00	3,63	1.873	208,2	Masyarakat	Sedang
9	Siolip	Barumun	8,50	5,08	1.925	2265	Masyarakat	Sedang
10	Simaninggir	Barumun	9,00	5,08	88	9,77	Masyarakat	Sedang
11	Saba Hotang	Barumun	21,66	3,01	765	35,32	Masyarakat	Sedang
12	Bulu Sonik	Barumun	7,00	5,08	781	111,60	Masyarakat	Ringan
13	Hasahatan Julu	Barumun	18,00	7	1.692	94	Masyarakat	Sedang
14	Sigorbus Jae	Barumun	8,50	7,24	230	27,00	Masyarakat	Ringan
15	Janji Lobi	Barumun	12,00	8,91	3.090	25,750	Masyarakat	Sedang
16	Pagaran Bira Julu	Sosopan	24	2,36	719	29,96	Masyarakat	Sedang
17	Pagaran Bira Jae	Sosopan	26	6	1.627	62,58	Masyarakat	Sedang
18	Siundol Jae	Sosopan	22	3,99	912	41,45	Masyarakat	Berat
19	Huta Baru Siundol	Sosopan	29	2,57	719	24,79	Masyarakat	Sedang
20	Aek Bargot	Sosopan	28	0,89	937	33,46	Masyarakat	Berat
21	Handang Kopo	Ulu Barumun	5	4,97	675	135	Masyarakat	Sedang



No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM ²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM ²)		
22	Pagaran Batu	Ulu Barumun	9	2,80	1.147	127,44	Masyarakat	Ringan
23	Siraisan	Ulu Barumun	10,5	2,95	1.920	182,86	Masyarakat	Sedang
24	Tanjung	Ulu Barumun	9	6,1	1.331	147,89	Masyarakat	Ringan
25	Paringgonan	Ulu Barumun	36,70	7,2	3.741	9458	Masyarakat	Sedang
26	Mananti Sosa Jae	Huta Raja Tinggi	5	6,94	3.101	620,20	Masyarakat	Sedang
27	Padang Matinggi	Barumun Tengah	7,65	3,4	190	24,84	Masyarakat	Ringan
28	Gunung Malintang	Barumun Tengah	25,96	4,2	315	12,13	Masyarakat	Sedang
29	Unte Rudang	Barumun Tengah	9,18	1,95	1.185	129,08	Masyarakat	Sedang
30	Bahal Batu	Barumun Tengah	6,75	3,08	212	31,41	Masyarakat	Sedang
31	Sibatu Loting	Barumun Tengah	8,4	8,31	699	83,21	Masyarakat	Sedang
32	Pasar Binanga	Barumun Tengah	15,51	9,08	3.143	202,64	Masyarakat	Sedang
33	Siolit	Barumun Tengah	8,55	8,55	343	40,12	Masyarakat	Sedang
34	Pp Makmur	Barumun Tengah	11,20	11,20	593	52,95	Masyarakat	Sedang
35	Bara-Batu	Barumun Tengah	6,68	5,89	217	32,49	Masyarakat	Sedang
36	Aek Nabara Tonga	Aek Nabara Barumun	9,76	4,5	1.512	50,81	Masyarakat	Sedang
37	Sayur Mahincat	Aek Nabara Barumun	27,18	5,01	598	22	Masyarakat	Sedang
38	Parsombahan	Lubuk Barumun	14	2,5	540	38,57	Masyarakat	Sedang
39	Sidomulio	Barumun Selatan	2,5	2,01	690	276	Masyarakat	Sedang
40	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	17,5	5,86	1.729	98,80	Masyarakat	Sedang
41	Panarian	Barumun Selatan	15	2,05	778	51,87	Masyarakat	Sedang
42	Harang Jae	Sosa	6	3	316	52,67	Masyarakat	Sedang
43	Horuon	Sosa	20	3,02	494	24,70	Masyarakat	Sedang
44	Tanjung	Sosa	4	4,3	300	75	Masyarakat	Sedang
45	Aer Bale	Sosa	25	5,2	667	26,68	Masyarakat	Sedang

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020



Tabel 2.52.

Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
IV	Perhubungan								
	Angkutan Jalan								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99%	2019	23,60	19,67	20,00	23,60	23,60
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	99%	2019	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
		Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	99%	2019	17,65	13,64	25,00	17,65	17,65
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	99%	2019	-	-	-	0	0
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	99%	2019	24,89	24,73	20,81	24,89	24,89
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	99%	2019	-	-	-	0	0
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	99%	2019	-	-	-	0	0
		Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pegujian berkala kendaraan bermotor	99%	2019	-	-	-	0	0



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
		Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRIL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	99%	2019	33,33	50,00	33,33	33,33	33,33
		Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelainan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	99%	2019	16,67	33,33	20,00	16,67	16,67
	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	99%	2019	6,00	5,13	4,17	6	6
Perumahan									
	Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99%	2019	58,859	58,859	60,900	60,900	60,900
		cakupan rumah layak huni terjangkau	99%	2019	12,489	12,489	12,489	12,330	12,330
	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99%	2019	-	-	20%	23%	23%

Sumber Dinas Perumahan, Kauesan Penukiman dan Perhubungan Tahun 2020

*) Data Sementara

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator capaian urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 antara lain adalah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran dan Persentase Penegakan Perda dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Indikator Capaian Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	30	40	50	0	0
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	87,00	90,00	65,00	65,00	70
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	75,00	80,00	78,00	78,00	85
Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	80	70	89	89	90
Persentase Penegakan Perda	85,00	87,00	90,00	90,00	95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

Tabel 2.54.

Realisasi SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Masyarakat

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
V	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat								
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	100%	2018	4,95%	6,06%	8,25%	100%	100%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	100%	2018	100%	100%	100%	100%	100%
	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayananbencana kebakaran kabupaten/ kota	100%	5 Tahun	45	45	45	50	50
		(Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMIK)	100%	5 Tahun	45	45	45	50	50

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.1.6. Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator kinerja urusan sosial di Kabupaten Padang Lawas dapat di lihat dari :

Tabel 2.55.
Indikator Capaian Urusan Sosial
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	2,93	1,58	2,89	1,89	44,17
PMKS yang tertangani (%)	2,93	1,58	2,89	1,89	1,16
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	50	40	5	50	50
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	20,55	-	14,25	13,18	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020


Tabel 2.56.
Realisasi SPM Bidang Sosial

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi					
VI Sosial										
Pelaksanaan Program/ Keg bidang Sosial Skala Kab/ kota										
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesra (PMKS) Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	5%	2014-2018	2,73%	0,00%	1,90%	1,75%	44,17	
	Pelaksanaan kegiatan sosial bagi PMKS Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS skala Kab/ Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2%	2014-2019	0,11%	1,36%	0,92%	0,06%	0,00%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Skala Kab/ kota									
	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kab/ kota	Persentase (%) panti sosial skala kab/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%	2014-2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kab/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%	2014-2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kab/ kota									
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap	30 orang	2014-2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	



No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
	darurat								
	Evaluasi korban bencana skala kab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	30 orang	2014-2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlarut									
	yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kab/ kota								
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/ kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	10%	2014-2020	1,97%	1,91%	2,18%	1,84%	1,16%

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari :

Tabel 2.57.
Indikator Capaian Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3	2	4	2	9
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2	3	4	2	4
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	120	135	154	204	188
Keselamatan dan perlindungan	95	97	98	99	112
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	5.9	6.100	6.187	6.422	4.162
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	64	48	64
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	-	20	140
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11,79	15,13	11,08	9,32	16,03

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Data persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta dari Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58.
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
1	Kabupaten Padang Lawas	2214	1	63	3.33
2	Provinsi Sumatera Utara				

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2020

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.59.
Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah Kekerasan	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan
1	Kabupaten Padang Lawas	17	62.930	0,26 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2020

2.3.2.3. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Indikator urusan pangan Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut ini :

Tabel 2.60.
Indikator Capaian Urusan Pangan
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	185.639,21	194.921,17	204.667,23	214.900,69	224.646,75
Ketersediaan energi (kkl/kap/hr) dan protein perkapita (kap/hr)	1500 dan 51,00	1600 dan 52,00	1700 dan 53,00	1800; dan 54,00	1900; Dan 55
Pengawasan	7	8	9	10	10



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
dan pembinaan keamanan pangan (%)					
pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (rp/kap/thn)	-	-	-	13.576.992.000	3.871.900.000
konsumsi beras (rp/kap/thn)	-	-	-	1.269.268	995.720
konsumsi ikan (rp/kap/thn)	-	-	-	1.938.560	1.523.900
konsumsi daging (rp/kap/thn)	-	-	-	728.000	611.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.4. Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA), urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61.

Banyaknya Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

Wilayah	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kabupaten Padang Lawas	4424	7	8	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Berikut merupakan persentase penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.62.

Tabel Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
1	Status Pencemaran Air Sungai	-	100%	80%	-	75 %
2	Tutupan Lahan (Lahan Kritis)	-	3	-	-	18,75 %
3	Persentase Sampah Kabupaten Yang Tertangani	0,28%	0,31%	0,36%	0,45%	0,06 %
4	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
5	Jumlah Peserta Proper Yang Mencapai Minimal Ranking BIRU	1	2	2	2	2
6	Jumlah Timbunan Sampah Yang Di Daur Ulang	-	-	-	-	-
7	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

Penanganan sampah di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Persentase yang paling besar yakni di tahun 2019 sedangkan yang paling rendah di tahun 2015. Dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Persentase Penanganan Sampah Tertangani
Di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2019

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	0,28	0,31	0,36	0,45	0,48
2	Provinsi Sumatera Utara	62	62	58	0	0

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Tabel 2.64.
Jumlah Sampah (Gg) di Kabupaten Padang Lawas dan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

No	Wilayah	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Padang Lawas	37.66	38.70	41.38	44.96	71,86
2	Provinsi Sumatera Utara	2.427	2.484	-	-	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Tabel 2.65.
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

Wilayah	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/ jiwa/ hari)	Total Timbulan Sampah (kg/ thn)
Kabupaten Padang Lawas	281.239 Jiwa	0,70%	71.856.564,5

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga diakomodir melalui pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti melalui pembinaan, pengawasan sampai ke penegakan hukum.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	74,50	77,44	76,67	52,08	88,28
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	70,14	66,66	64,02	75,19	79,44
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	14,26	16,39	16,79	19,01	26,03
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah



No.	Uraian	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	114,059	121,663	142,33	142,33	150,72
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	71,425	83,315	85,874	99,109	41,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa capaian terhadap indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	06,57	07,23	0,35	08,55	0,67
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	10	10	10
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	10	10	10	10
4	Persentase LPM Berprestasi	0,93	0,95	0,95	0,90	0,6
5	Persentase PKK aktif	0,663	0,683	0,683	0,723	0,69
6	Persentase Posyandu aktif	0,99	1	1,01	1,03	0,69

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka

kematian, dan persebaran penduduk yang merata. Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertumbuhan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen - komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas,1990:1).

Data terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Padang Lawas sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,55	2,42	2,27	2,22	2,25
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,43	2,41	2,33	2,30	3,92
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	-	40	40	50	60
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	50	50	45,83	57,89	65
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	1	1	1
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	6,5	5,2	4,3	3,7	4
9	Ratio Akseptor KB (%)	65	70	78	85	67
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	56	54	68	70	70
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	14,36	13,25	13,10	11,5	87
13	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	3,8	3,7	3,5	3	4
14	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	15,37	19,03	17,85	15	15
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21	26	28	30	45
16	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	50	35	25	50	60
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	7	78	85	90	90
18	Cakupan Anggota Bina	72	75	86	89	89



No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)					
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	73	76	86	90	90
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	-	1	1	1	1
21	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	45,07	50	53	65	2,5
22	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	31,25	27,7	21,79	30	58
23	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	8,5	9	10	50	50
24	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
25	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	6,5	12,25	20	70	75
26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	5,5	10,25	15	68	75
27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	75	85	90	100	-
28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	-	0,33	4,3	19,7	19,7
29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0,03	0,01	0,01	0,01	0
30	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	58	61	63	70	70
31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	40	51	53	75	80
32	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	22,8	22,7	25,8	22,5	22,5



No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
33	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dan interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Indikator capaian urusan perhubungan Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.69.
Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	14,103.00	14,153.00	14,203.00	14,253.00	14,303.00
2	Rasio Ijin Trayek	0,0052	0,0068	0,076	0,00122	0,00114
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3,05	3,25	3,45	3,65	3,85
4	Persentase Layanan Angkutan darat	25,520.00	25,927.00	26,335.41	26,750.41	27,172
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	23.56	23.56	24.34	25.14	25.97
6	Pemasangan Rambu-rambu	200.00	100.00	100.00	40.00	50
7	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	3,25	3,45	3,65	3,85	4.05
8	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	14,103,00	15,975,300	16,486,200	17,013,758	17,558,198

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Di era globalisasi ini teknologi menjadi kebutuhan untuk mengakses informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Aktifitas network globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dari teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat produktivitas dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan struktural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam berbagai lapisan masyarakat. Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas dalam upaya mendukung pencapaian *clean goverment* dan *good goverment* melalui *e-goverment* sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberhasilan Kabupaten Padang Lawas terkait dengan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

Tabel 2.70.
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	42	67
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	-	-	38	45	60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil merupakan peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Indikator keberhasilan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.71.
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase koperasi aktif	-	73.81	196	50.57	9,43
2	Jumlah koperasi aktif	-	217	344	175	35
3	Jumlah koperasi Kabupaten Padang Lawas	-	294	56	346	371
4	Provinsi Sumatera Utara	6.825	6.035	6.142	6.142	-

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing PMA untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini disampaikan perkembangan realisasi indikator kinerja urusan penanaman modal dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.72.
Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Realisasi			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PM A)	13	6	3	2
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)	24.495.758.340	4.186.949.437.662.00	4.710.477.321.575.00	306.232.855.671.60 (PMDN) US 1.276.822.55 (PMA)
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)	0,58	0,64	03.50	0,80
4	Rasio daya serap tenaga kerja	0,58	0,64	1,16	1.85

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Padang Lawas, Tahun 2019

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Perkembangan bidang Pemuda dan Olahraga dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.73.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	112	115	83	81	100
2	Persentase wirausaha muda	-	-	-	-	-
3	Cakupan pembinaan olahraga	2	2	2	2	4
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	-	-	-	2	5
5	Cakupan pembinaan atlet muda	1	2	2	2	5
6	Jumlah atlet berprestasi	8	2	5	5	5
7	Jumlah prestasi olahraga	8	1	-	-	-

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.14. Statistik

Penyelenggaraan kegiatan statistik daerah selalu rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Produk-produk buku statistik disusun bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2015-2019 adalah Buku Padang Lawas Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Statistik Daerah, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Statistik Tenaga Kerja, Buku Indikator Gender, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Buku Statistik Penggunaan Lahan Sawah, Buku Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi, Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lain, Buku Indeks Harga Konsumen, Buku Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dan Buku Potret Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor.

2.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) di Kabupaten Padang Lawas belum berjalan optimal, untuk itu pada RPJMD yang baru ini akan dioptimalkan sehingga Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dapat berjalan.

2.3.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. Beberapa indikator capaian urusan kebudayaan di Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	6	10	10	10
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	3	3	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.17. Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan atas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan *World Bank* dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca Provinsi Sumatera Utara berada di atas rata-rata

nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk Provinsi Sumatera Utara hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Kabupaten Padang Lawas yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan minat baca yang juga relatif rendah. Indikator urusan bidang perpustakaan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	1.267	8.782	47.904	69.456	193,485
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	49	20	30	23	60
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (%)	0,54	0,54	1,75	1,90	1.98
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/thn (Orang)	106	732	3.992	5.788	16,124
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (exemplar)	1.073	3.195	5.207	6.089	9,277

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.2.18. Kearsipan

Penyelamatan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dari orang yang tidak berhak, agar arsip tidak rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip, sehingga tidak dapat disimpan secara berkelanjutan sebagai arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Penambahan khasanah arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip statis diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan, sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Dengan penyerahan arsip statis dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan, berarti bahwa tanggungjawab dan hak pengelolaan arsip statis akan berpindah dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan. Hal ini juga berarti akan mengurangi volume arsip yang semakin meningkat di setiap OPD. Itulah

sebabnya manajemen kearsipan harus diterapkan agar tidak terjadi penumpukan arsip di tiap OPD. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan jumlah lain beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Belum optimalnya penataan tertib arsip, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kearsipan.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas cukup banyak namun pemerintah daerah belum mengembangkannya secara optimal. Untuk itu pada periode RPJMD ini kepariwisataan akan lebih dikembangkan.

2.3.3.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang berkembang di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator urusan pertanian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.76.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	1639,98	1.759,98	1.879,98	1.999,98	46,17
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	17,96	18,16	18,36	18,56	3,46
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	40,46	41,06	41,66	42,26	32,62
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,83	34,14	37,60	36,70	35,94
5	Cakupan bina kelompok petani	-	755	740	988	920

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.3.3. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian indikator urusan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.77.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3,67	4,40	0	0	0
2	Jumlah perusahaan menurut badan hukum	137	0	0	0	1200
3	Jumlah pedagang	0	0	181	213	5013

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.3.4. Kelautan dan Perikanan

Berikut merupakan tabel Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.78.
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 - 2019

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan Tangkap	219.2	83.7	90,25	135	94,76
Perikanan Budidaya	2.647.0	3.690,0	3.423,85	5.550,00	3.706

Sumber : Dinas Perikanan dan Perternakan, Tahun 2020

2.3.4. Layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMN serta RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Padang Lawas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018.

2.3.4.2. Keuangan

Kabupaten Padang Lawas memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Capaian indikator urusan keuangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Realisasi			
		2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	9,65	10,93	9,31	5,03
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	25,16	11,05	19,43	22,27
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	12,70	16,17	14,69	11,16
6	Pertbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	113,63	84,93	130,67	74,74
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	94.795.103.657,00	60.111.603.851,70	55.598.801.499,00	54.862.126.800,00
8	Penetapan APBD	15-11-2015	11-01-2016	26-01-2017	19-12-2017

Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*).

Indeks Profesionalitas Pegawai adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan menggunakan *composite index*. Perhitungan indeks professional pegawai didasarkan pada 4 (empat) komponen, yaitu Kompetensi, Kinerja, Kompensasi (penghasilan), dan Disiplin. Selain itu indikator lainnya adalah indeks Profesion, capaian ini mencerminkan bahwa Profesionalitas Pegawai setiap tahunnya meningkat.

Tabel 2.80.
Realisasi Indikator Kinerja
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Bulan)	± 4	± 4	± 4	± 4	+ 4
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	3,90	3,77	4	5	6
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	7,96	8,95	8,66	9,00	12
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30	30	32	32	29
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	149	149	151	151	141
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2366	2206	2275	2350	2526

Sumber : Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kab. Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini.



Tabel 2.81.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SIPD	-	85.05	85.17	85.35	90
2	E-Planning	-	-	-	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.3.4.5. Pengawasan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun terus meningkat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami peningkatan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semenjak tahun 2015 – 2018, perkembangan jumlah investor baik itu PMDN ataupun PMA mengalami penurunan.

Tabel 2.82.
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015–2018

No	Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2015	13	1	14
2	2016	6	1	7
3	2017	3	2	5
4	2018	2	1	3

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Padang Lawas, Tahun 2020

2.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)



Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA hanya terjadi pada tahun 2015-2019 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2018

No	Tahun	Uraian	Persetujuan		Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	2015	Kabupaten Padang Lawas	-	-	22	2.444.195.758.304,00
		Provinsi Sumatera Utara	-	-	300	19.860.000.000.000,00
		Nasional	-	-	-	519.500.000.000.000,00
2	2016	Kabupaten Padang Lawas	6	2.612.570,73	8	4.186.949.437.662,00
		Provinsi Sumatera Utara	-	-	446	19.390.000.000.000,00
		Nasional	-	-	-	594.800.000.000.000,00
3	2017	Kabupaten Padang Lawas	-	-	6	4.710.477.321.575,00
		Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-
		Nasional	-	-	-	-
4	2018	Kabupaten Padang Lawas	1	2.355.238.660.786,00	1	1.177.619.330.393,00
		Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-
		Nasional	-	-	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Padang Lawas, Tahun 2019

2.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Persentase yang besar terjadi pada tahun 2018 yakni 1,16 persen dan yang terkecil pada tahun 2015 yakni sebesar 0,58 persen.

Tabel 2.84.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	522	576	582	582	390
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	9	9	5	5	8
3	Rasio daya serap tenaga kerja	0,58	0,64	1,16	1,16	0,95

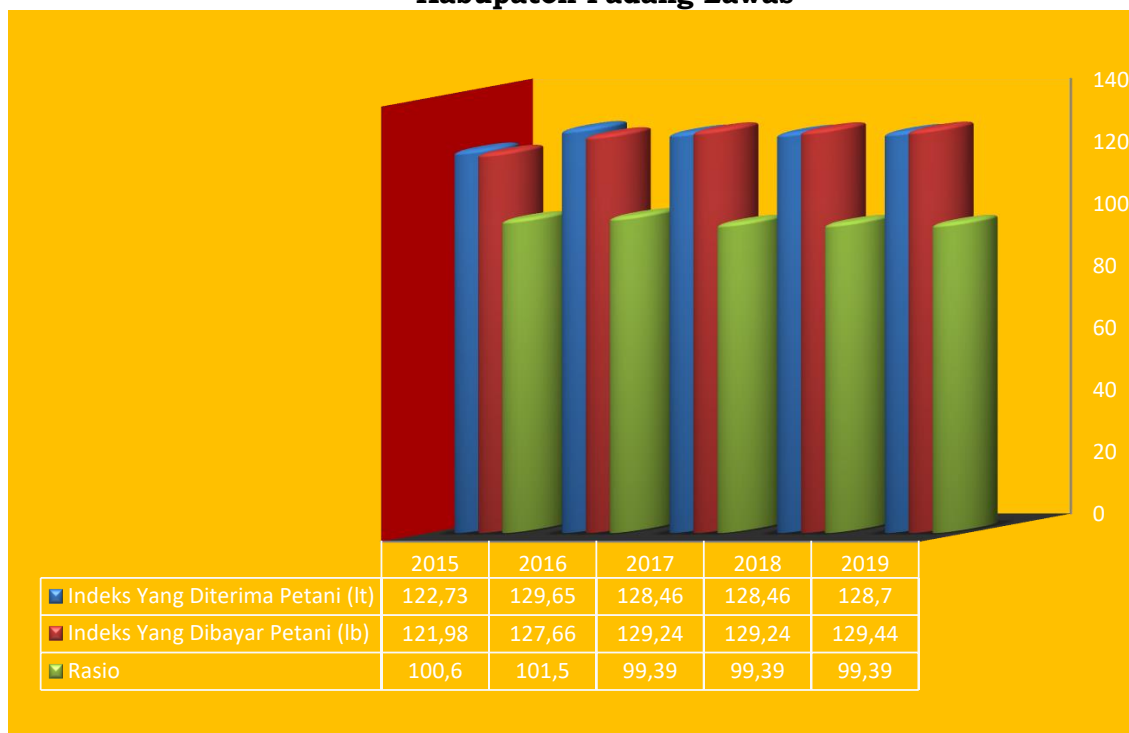
Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Padang Lawas, Tahun 2020

2.4.4. Nilai Tukar Petani

Untuk rasio perhitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Padang Lawas terbesar pada tahun 2015 yakni mencapai 100,6 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 99,39. dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.



mbar 2.13.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 – 2019
Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2019

2.4.5. Angka Kriminalitas

Data angka kriminalitas di Kabupaten Padang Lawas sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Angka Kriminalitas
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2018

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus narkoba	101	99	24	24
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	5	3	3
3.	Jumlah kejahatan seksual	6	12	12	12
4.	Jumlah kasus penganiayaan	5	305	305	0
5.	Jumlah kasus pencurian	442	313	20	20
6.	Jumlah kasus penipuan	37	48	47	0
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-
8.	Jumlah tindak kriminal	591	782	820	0
9.	Jumlah penduduk	258.003	263.784	269799	275.515
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0.0022	0.0029	0.0030	-

Sumber : Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, Tahun 2019

2.4.6. Jumlah Demonstrasi

Berikut ini data jumlah demonstrasi yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.86.
Jumlah Demo
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bidang politik	3	1	9	17	0
2	Ekonomi	3	3	4	4	4
3	Kasus pemogokan kerja	2	2	2	2	0
4	Jumlah unjuk rasa	12	10	13	17	4

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

2.4.7. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Berikut ini disajikan data rasio ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019.

Tabel 2.87.
Rasio Ketergantungan Tahun 2015 - 2019
Kabupaten Padang Lawas

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	83.428	80.006	77.400	77.760	77.760
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	7.964	6.922	8.526	9.600	9.600
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)	91.392	86.928	85.926	87.360	87.360
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	156.274	162.678	171.268	172.125	172.125
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,585	0,534	0,502	0.508	0.508

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2020

Rasio ketergantungan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,585 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 0,502.

2.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2021, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 2.88.
pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas

No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
1	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Huta Baru	Kesejahteraan Guru MDA	1	H.LOKOT NST
2	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Huta Baru	Pembangunan Dek penahan longsor lokasi pertanian	200	H.LOKOT NST
3	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Siundol Jae	Rehab Musollah	0	H.LOKOT NST
4	Fisik	Sosopan	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	PAGARANBIRA JAE	REHAB DRAINASE MESJID NURUL IMAN, MESJID AL-MUKHLISIN DAN AL-AQOBAB	1300	H. Puli Parisan Lubis, Lc
5	Fisik	Sosopan	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DESA SOSOPAN	PEMBANGUNAN PARET DESA SOSOPAN	250	H. Puli Parisan Lubis, Lc
6	Fisik	Sosopan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DESA SOSOPAN	PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SOSOPAN	5	H. Puli Parisan Lubis, Lc
7	Non Fisik	Sosopan	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PAGARANBIRA JAE	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3	H. Puli Parisan Lubis, Lc
8	Fisik	Sosopan	Pembangunan Mesjid	PAGARANBIRA JAE	LANJUTAN PEMBANGUNAN MESJID AL-AQOBAB	1	H. Puli Parisan Lubis, Lc
9	Fisik	Sosopan	pembangunan jalan dan jembatan	PAGARANBIRA JAE	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG MENUJU KEBUN WARGA DESA PAGARANBIRA JAE & PAGARANBIRA JULU	250	H. Puli Parisan Lubis, Lc
10	Non Fisik	Sosopan	Manajemen Pelayanan Pendidikan	PAGARANBIRA JAE	PENGADAAN MOBILER DAN BUKU PENUNJANG /PANDUAN MDA DESA PAGARANBIRA JAE, PAGARANBIRA JULU DAN DESA HUTA BARGOT	3	H. Puli Parisan Lubis, Lc

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
11	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	pagaran bira jae	pengadaan lampu jalan	0	Romi Parmonangan Nst, SH
12	Non Fisik	Sosopan	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Desa Pagaran Bira jae	Pengadaan Mobiler MDA	0	Romi Parmonangan Nst, SH
13	Fisik	Sosopan	Perencanaan Tata Ruang	Desa sundol julu	Normalisasi Sungai Ulu Air di desa sundol julu	1	H.LOKOT NST
14	Fisik	Sosopan	Perencanaan Tata Ruang	Desa sundol julu	Pembangunan Rambu/lembaran gantung di sundol julu	1	H.LOKOT NST
15	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Desa sundol julu	Membuat pendidikan kelas terpadu kec Sosopan	1	H.LOKOT NST
16	Fisik	Sosopan	Perencanaan Tata Ruang	sosopan	Renopasi polsek pasar sosopan menjadi asrama polsek sosopan	1	H.LOKOT NST
17	Fisik	Sosopan	Perencanaan Tata Ruang	sosopan	pembangunan pagar kantor koramil Sosopan	100	H.LOKOT NST
18	Fisik	Sosopan	Pembangunan turap/tahud/bronjong	huta bargot	Pembangunan Bronjong	500	H.LOKOT NST
19	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	huta bargot	Normalisasi Sungai	1000	H.LOKOT NST
20	Fisik	Sosopan	Pembangunan Ruang Kelas	huta bargot	Pembangunan MDA di Desa Huta Bargot	1000	H.LOKOT NST
21	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Siundol julu	Rehab musollah	0	H.LOKOT NST
22	Fisik	Sosopan	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Desa Siundol Dolok	Rehap Pustu	1	H.LOKOT NST
23	Fisik	Sosopan	Rehab Mesjid	Desa Pagaranbira jae	Rehab Mesjid Al Mukhlisin	1	Romi Parmonangan Nst, SH
24	Fisik	Sosopan	Pembinaan dan Pengembangan Bidang	Desa Pagaranbira jae	Pengadaan Lampu Jalan	20	Romi Parmonangan Nst,

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			Ketenagalistrikan				SH
25	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan produksi hasil peternakan	Desa Pagaranbira Jae	Pengadaan Bibit Ternak Lembu	30	Romi Parmonangan Nst, SH
26	Fisik	Sosopan	Pembangunan Ruang Kelas	Pagaranbira Jae	Pembangunan Ruang Kelas Baru MDA	0	Romi Parmonangan Nst, SH
27	Non Fisik	Sosopan	memberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Desa sundol Julu	Pembekalan ilmu pertanian kepada para kelompok tani	1	H.LOKOT NST
28	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa sundol Julu	Pembangunan Musollah dan MCK didesa Sundol Julu	1	H.LOKOT NST
29	Fisik	Sosopan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa sundol Julu	Pembuatan Drainase di desa Sundol Julu	1	H.LOKOT NST
30	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sundol Jae	Penguatan pendidikan Agama di desa sundol jae	1	H.LOKOT NST
31	Fisik	Sosopan	Pembangunan turap/talud/bronjong	Huta Baru	Pembangunan Bronjong	200	H.LOKOT NST
32	Fisik	Sosopan	pembangunan jalan dan jembatan	huta bargot	Pembuatan jembatan menuju lahan Pertanian dan Perkebunan	50	H.LOKOT NST
33	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Sundol Jae	Pembuatan PERDA dan PERDES demi mengatasi kenakalan remaja	1	H.LOKOT NST
34	Non Fisik	Sosopan	Pengadaan Bibit	huta bargot	bantuan bibit palawija/hortikultura/rempeh-rempeh di desa huta bargot	10000	H.LOKOT NST
35	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Sundol Jae	pemberantasan tempat maksiat /penyakit masyarakat di kecamatan sosopan	1	H.LOKOT NST
36	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sundol Jae	bantuan beasiswa prestasi dan kurang mampu	1	H.LOKOT NST
37	Non Fisik	Sosopan	Pengembangan budaya perikanan	Sundol Jae	bantuan bibit perikanan di desa sundol jae	100	H.LOKOT NST

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
38	Fisik	Sosopan	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Sundol Jae	pembangunan irigasi di desa sundol jae	1000	H.LOKOT NST
39	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Desa Siundol Dolok	Bantuan Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu	50	H.LOKOT NST
40	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Desa Siundol Dolok	Pemberantasan Hama Pertanian	50	H.LOKOT NST
41	Non Fisik	Sosopan	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Desa Siundol Dolok	Bantuan kartu BPJS Miskin	100	H.LOKOT NST
42	Non Fisik	Sosopan	Pengadaan Bibit	Desa Siundol Dolok	Bantuan Bibit Holtikultura	5000	H.LOKOT NST
43	Non Fisik	Sosopan	Pengadaan Bibit	Desa Siundol Dolok	Bantuan Bibit Cengkeh dan kopi	1000	H.LOKOT NST
44	Fisik	Sosopan	Pembangunan Jembatan	Desa Siundol Dolok	Pembangunan Rambu /jembatan gantung	1	H.LOKOT NST
45	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Desa Aek Bargot	Kesejahteraan Guru MDA	5	H.LOKOT NST
46	Fisik	Sosopan	Pembangunan Jembatan	Desa Aek Bargot	Pembangunan Jembatan gantung	1	H.LOKOT NST
47	Fisik	Sosopan	Pembangunan Mesjid	Desa Aek Bargot	Bantuan pembangunan Mesjid Raya Aek Bargot	1	H.LOKOT NST
48	Non Fisik	Sosopan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Huta Baru	Pemberantasan hama petani/pekebun	10	H.LOKOT NST
49	Fisik	Sosopan	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Huta Baru	Pembuatan Dek penahan banjir	200	H.LOKOT NST
50	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan turap/talud/bronjong	Bahal Batu	Bantuan Pembuatan Bronjong Untuk Sungai Barumun kurang lebih sepanjang 300 m	300	Erwin Suwandi Hrp,SE

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
51	Fisik	Barumun Tengah	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Padang Garurur	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Bedah Rumah kurang lebih 15 rumah	15	Erwin Suwandi Hrp,SE
52	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Tandihat	Peningkatan Jalan Objek Pariwisata (Candi) dari Desa Tandihat Menuju Desa Gunung Manaon kurang lebih 3 Km	3000	Erwin Suwandi Hrp,SE
53	Fisik	Barumun Tengah	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Siboris Lombang	Permintaan Bidan Desa agar Bertempat Tinggal di Desa Siboris Lombang	1	Erwin Suwandi Hrp,SE
54	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan turap/talud/bronjong	Siboris Lombang	Bantuan Pembuatan Bronjong Bendungan Di Desa Siboris Lombang sepanjang 300 m	300	Erwin Suwandi Hrp,SE
55	Fisik	Barumun Tengah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	gunung manaon	Bantuan Pengadaan Kincir Air dan Irigasi untuk Mengaliri Air dari Bendungan kepersawahan Panjang kurang lebih 500 m di Desa Gunung Manaon	500	Erwin Suwandi Hrp,SE
56	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Padang Matinggi	Peningkatan Jalan desa Padang Matinggi Menuju Siboris Dolok	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
57	Fisik	Barumun Tengah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Padang Garurur	Pembangunan satu (1) Embung Di Desa Padang Garurur	1	Erwin Suwandi Hrp,SE
58	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Jalan	Padang Matinggi	Pembangunan Jalan dari Desa Padang Matinggi menuju Napsamin kurang lebih 1 km	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
59	Fisik	Barumun Tengah	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur	Padang Matinggi	Tindak Lanjut Program Rumah tidak layak huni di Desa Padang Matinggi	15	Erwin Suwandi Hrp,SE

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman		kurang lebih 15 Rumah		
60	Non Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Padang Matinggi	Bantuan Pemeliharaan Perkebunan, Pertanian dan Persawahan Pada Masyarakat Desa Padang Matinggi	2	Erwin Suwandi Hrp,SE
61	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Padang Garugur	Peningkatan Jalan dari Padang Garugur menuju Jalan Rambin Sisalean	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
62	Fisik	Barumun Tengah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Siboris Lombang	Peningkatan Paret Keliling Desa Siboris Lombang sepanjang 1 km	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
63	Fisik	Barumun Tengah	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Bahal Batu	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Beda Rumah kurang lebih 20 unit	20	Erwin Suwandi Hrp,SE
64	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Bahal Batu	Peningkatan Jalan dari Desa bahal Batu menuju Ranbin Sibottar sepanjang 1 km	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
65	Fisik	Barumun Tengah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Siboris Lombang	Pembangunan Embung di Desa Siboris Lombang	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
66	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Ruang Kelas	Bahal Batu	Pembangunan MDA Desa Bahal Batu	0	Erwin Suwandi Hrp,SE
67	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	gunung manaon	Peningkatan Jalan Dari Desa Gunung Manaon menuju Desa Tandihat	3000	Erwin Suwandi Hrp,SE
68	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Ruang Kelas	Tandihat	Pembanguna Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) di Desa Tandihat	0	Erwin Suwandi Hrp,SE
69	Non Fisik	Barumun Tengah	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	Tandihat	Bantuan Pengadaan Mesin Pembajak Sawah di Desa Tandihat	2	Erwin Suwandi Hrp,SE
70	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Tandihat	Peningkatan Jalan dari Desa Tandihat ke Desa Ulu Gajau kurang lebih 2 km	2000	Erwin Suwandi Hrp,SE
71	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan	Tandihat	Relhap Jaringan Irigasi Persawahan di	300	Erwin Suwandi Hrp,SE

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tengah	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya		Desa Tandihat sepanjang 300 m		
72	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Ruang Kelas	Siboris Lombang	Pembangunan Madrasah Diniyah Awalayah (Mda) 3 ruang kelas baru di Desa Siboris Lombang	3	Erwin Suwandi Hrp,SE
73	Non Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan produksi hasil peternakan	gunung manaoon	Bantuan Peternakan Untuk Di Budidayakan di Desa Gunung Manaoon kurang lebih	500	Erwin Suwandi Hrp,SE
74	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Mesjid	Siboris Lombang	Rehab Mesjid di Desa Siboris Lombang	1	Erwin Suwandi Hrp,SE
75	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Jalan	gunung manaoon	Pembukaan Jalan hasil Tani Dari Desa Gunung Manaoon Sampai Kedesa Bahal Batu kurang lebih 1 km	1000	Erwin Suwandi Hrp,SE
76	Non Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	gunung manaoon	Penerbitan Cafe Remang-remang di Desa Gunung Manaoon sebanyak 4 lokasi	4	Erwin Suwandi Hrp,SE
77	Fisik	Barumun Tengah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	gunung manaoon	Peningkatan Jaringan Irigasi Persawahan kurang lebih 500 m di Desa Gunung Manaoon	500	Erwin Suwandi Hrp,SE
78	Fisik	Barumun Tengah	Rehab Mesjid	Pasar binanga	Mohon bantuan pembangunan mesjid/ MD A (Madrasah Diniyah Awalayah), melalui Bansos	1	Baharuddin Dauly
79	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Binanga	memperbaiki paret jalan sepanjang ± 250 m.	250	Baharuddin Dauly
80	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan Jalan	Pasar binanga	Penebalan atau pembukaan jalan dari Pasar Binanga menuju Desa Janji Raja	4000	Baharuddin Dauly
81	Fisik	Barumun Tengah	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Binanga	Perbaikan Lampu Jalan	12	Baharuddin Dauly
82	Fisik	Barumun Tengah	Perencanaan Tata Ruang	Binanga	Rehab tanah lapang/ penambahan Podium	1	Baharuddin Dauly
83	Non Fisik	Barumun	Peningkatan Penerapan Teknologi	Binanga	Pengadaan mesin pompa pengangkat	1	Baharuddin Dauly

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tengah	Pertanian/Perkebunan		air di saba lobu landia		
84	Fisik	Barumun Tengah	Pengelolaan areal pemakaman	Binanga	Pembangunan Pagar TPU (Tempat Pemakaman Umum)	0	Baharuddin Daulay
85	Non Fisik	Barumun Tengah	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Desa Binanga	Pengadaan mesin pompa pengangkat air di saba lobu landia	1	Baharuddin Daulay
86	Non Fisik	Barumun Tengah	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	Binanga	Pengadaan mesin pompa air di saba lobu landia	0	Baharuddin Daulay
87	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Pasar Binanga	Pembangunan mesjid/MDA Pasar Binanga	0	Baharuddin Daulay
88	Non Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Gunung Baringin	Pengadaan Alat Pertanian	10	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
89	Fisik	Barumun Tengah	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Gunung Baringin	Pembangunan Hotmix jalan Akses Desa	2000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
90	Fisik	Barumun Tengah	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Siboris Lombang	Rehab Mesjid di Desa Siboris Lombang	0	Erwin Suwandi Hrp,SE
91	Fisik	Huristak	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah	desa binanga tolu	husus kepada disperkimhub,, sehubungan dengan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, agar diusulkan kepada kementerian terkait, supaya survei untuk penentuan titik -titik rumah tidak layak huni tersebut betul-betul objektif. menurut hemat kami, diseluruh kecamatan huristak terdapat tidak kurang dari 600 - 750 unit rumah tidak layak huni. namun hingga saat ini sejak program ini digulirkan pemerintah pusat, yang sudah mendapat bantuan hanya 3-5 rumah (=0,5% tidak sampai 1 %)	750	Muhammad Ike T Hsb.IR.MT
92	Non Fisik	Huristak	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	huristak	mengirim anak muda gadis sekolah	25	Muhammad Ike T

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			Tenaga Kerja		dari huristak minimal 25 orang pertahun untuk mengikuti pelatihan keahlian, montir, jahit, saloon dan lain lain		Hsb.IR.MT
93	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	desa pulo bariang	Peningkatan jalan di desa pulo bariang , LPB & LPA	2500	Muhammad Ike T Hsb.IR.MT
94	Fisik	Huristak	Lingkungan Sehat Perumahan	Paya Bujing	Pembangunan MCK, Sumur Bor dan Pemampungan air, didesa Paya Bujing	0	Muhammad Ike T Hsb.IR.MT
95	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tanjung morang	Peningkatan jalan dari batas desa tanjung morang hingga desa sigading, kecamatan huristak, palas-paluta: 12 KM, LPA dan LPB + pengaspalan 14 KM	12000	Muhammad Ike T Hsb.IR.MT
96	Non Fisik	Huristak	Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Galabonang	Pembangunan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah	4	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
97	Fisik	Huristak	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Galabonang	Peningkatan Pembangunan jalan Akses Desa	3000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
98	Fisik	Huristak	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa Tanjung Morang	Pembangunan Irigasi Sawah Pertapaan	400	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
99	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Tanjung Morang	Rehap Jembatan Penghubung Desa Tanjung Morang Menuju Desa Tanjung Baringin	10	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
100	Fisik	Huristak	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa Tanjung Morang	Pembangunan Pintu Air sawah Pertapaan	3	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
101	Non Fisik	Huristak	Pengadaan Bibit	Desa Tanjung Morang	Bantuan Pengadaan Ternak Sapi	100	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
102	Non Fisik	Huristak	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	Desa Tanjung Morang	Bantuan Pupuk Pertanian dan bibit pertanian	100	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
103	Fisik	Huristak	Pembangunan Jalan	Tanjung Baringin	Pembangunan Peningkatan Jalan Akses	3000	Elfin Hamonangan

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					Desa Tanjung Baringin menuju Desa Tanjung Morang		Harahap,S.Sos
104	Fisik	Huristak	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Tanjung Baringin	Penempatan Bidan Desa	2	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
105	Non Fisik	Huristak	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tanjung Baringin	Pengadaan Alat Pertanian	10	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
106	Fisik	Huristak	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Tobing Jae	Pembangunan Peningkatan Jalan akses Desa Menuju Desa Galabonang	3000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
107	Fisik	Huristak	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Tobing Jae	Pembangunan Peningkatan Jalan akses Desa	4000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
108	Non Fisik	Huristak	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Tobing Jae	Pengadaan Alat Pertanaian	10	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
109	Fisik	Huristak	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Desa Tobing Jae	Bantuan Pengolahan Pustu	1	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
110	Fisik	Huristak	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Tanjung Morang	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru Tk Abdollah	4	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
111	Fisik	Huristak	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Gunung Baringin	Pemagaran Batas TPU	0	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
112	Fisik	Huristak	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Galabonang	Bantuan Bendungan Desa Tobing Julu	300	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
113	Fisik	Huristak	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Gunung Manaon	Pembangunan Irigasi Saba Bire	1000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
114	Non Fisik	Huristak	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Gunung Manaon	Pengadaan Alat Pertanian	10	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
115	Fisik	Huristak	Perencanaan Tata Ruang	Desa Gunung Manaon	Pembangunan Pintu Air dan	500	Elfin Hamonangan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					Pengerukan Embung		Harahap,S.Sos
116	Fisik	Huristak	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Gunung Manaon	Pembangunan Irigasi	2000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
117	Fisik	Huristak	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Tanjung Morang	Peningkatan Jalan Desa Tanjung Morang Menuju Desa Tanjung Baringin	4000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
118	Fisik	Huristak	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Desa Tobing Jae	Pembukaan jalan Desa Tobing Jae Menuju Desa Pulo Baring	1000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
119	Non Fisik	Huristak	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Morang	Pengerukan Embung	500	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
120	Fisik	Huristak	Lingkungan Sehat Perumahan	Binanga Tolu	Pembangunan MCK, Sumur Bor dan Pemampungan air, didesa binanga tolu	0	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
121	Fisik	Huristak	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Huristak	Pembangunan irigasi pengairan sawah di desa huristak dengan ukuran 500 M Untuk 1000 Ha - 2000 Ha sawah yang ada di desa huristak	500	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
122	Fisik	Huristak	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Binanga tolu	Pembangunan pagar masjid Almuhlisin di desa binanga tolu	220	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
123	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa gonting	Peningkatan jalan dari desa gonting hingga desa ramba batas kebun ANU, Huristak: 4 KM. Pengaspalan ulang.	4000	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
124	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa binanga tolu	Peningkatan jalan di desa anak desa binuang-desa binanga tolu, huristak 2 KM, LPB dan LPA	2000	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
125	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tar sihoda hoda	Peningkatan jalan di desa tar sihoda hoda, LPB & LPA	1000	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
126	Fisik	Huristak	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Binanga tolu	Peningkatan jalan di desa bulu cina , LPB Dan LPA	2000	Muhammad Ike T Hsb,IR.MT
127	Non Fisik	Huristak	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	didesa sipirok baru	PENGADAAN TERATAK DI DESA SIPIROK BARU	1	Nanda Servinta Muda Hsb

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
128	Non Fisik	Huristak	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	HURISTAK	PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DIDESA HURISTAK	1	Nanda Servinta Muda Hsb
129	Non Fisik	Huristak	Pengembangan Lingkungan Sehat	SIALAGUNDI	PENGADAAN MCK DIDESA SIALAGUNDI	200	Nanda Servinta Muda Hsb
130	Non Fisik	Huristak	pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	SIPROK BARU	PENGADAAN MESIN POMPA AIR DESA SIPROK	8	Nanda Servinta Muda Hsb
131	Fisik	Huristak	Peningkatan Jalan & Jembatan	SIPROK BARU	PENINGKATAN JALAN ASPAL DIDESA SIALAGUNDI	3000	Nanda Servinta Muda Hsb
132	Fisik	Huristak	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	SIALAGUNDI	PENGADAAN SUMUR BOR DIDESA SIALAGUNDI	10	Nanda Servinta Muda Hsb
133	Non Fisik	Huristak	Pengadaan Bibit	HURISTAK	PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DIDESA HURISTAK	50	Nanda Servinta Muda Hsb
134	Fisik	Huristak	Pembangunan Ruang Kelas	HURISTAK	PEMBANGUNAN ASRAMA SEKOLAH SMKN 1 HURISTAK	2	Nanda Servinta Muda Hsb
135	Fisik	Huristak	Pembangunan Jalan	HURISTAK	peningkatan jalan aspal didesa huristak	2	Nanda Servinta Muda Hsb
136	Fisik	Huristak	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Tanjung Morang	Pembangunan Irigasi Jalan Akses Desa Tanjung Morang	2000	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
137	Fisik	Huristak	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Gunung Baringin	Pembangunan MCK	0	Elfin Hamonangan Harahap,S.Sos
138	Fisik	Lubuk Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	jalan lingkar desa pasar latong dari lorong 3 ke lorong 1	jalan rusak parah	2000	Raja Aslin Sinaloan Lbs
139	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Huta Dolok	Pembangunan Jalan Huta Dolok dengan Aspal (Hotmix) sepanjang 600 m	600	Raja Aslin Sinaloan Lbs
140	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Mesjid Almaridyah Pasar Latong	Pembangunan/Pembukaan Aliran Air Bondar Padang Ke Masjid Almaridyah Pasar Latong Desa Pasar Latong	250	Raja Aslin Sinaloan Lbs

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
141	Fisik	Lubuk Barumun	Revitalisasi Pasar Tradisional	pasar Latong	Pembangunan/Rehab Berat Pekan Pasar Latong	1	Raja Aslin Sinaloan Lbs
142	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Pasar Latong(Lorong 3)	Pembangunan Paret/Drainase dari Lorong 3 sepanjang 300 m Desa Pasar Latong	300	Raja Aslin Sinaloan Lbs
143	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan Jalan	Kantor Camat Pasar Latong	Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Jalan Lingkar Kantor Camat Sepanjang 1,5 km	1500	Raja Aslin Sinaloan Lbs
144	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan Jalan	pasar Latong	Pembangunan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Pasar Latong Sepanjang 2 km	2000	Raja Aslin Sinaloan Lbs
145	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	pasar Latong	Pengerokan Paret Pinggir Jalan Protokol Sepanjang 1 Km	1000	Raja Aslin Sinaloan Lbs
146	Non Fisik	Lubuk Barumun	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	pasar Latong	Pengadaan Alat Pertanian di Pasar Latong	5	Raja Aslin Sinaloan Lbs
147	Non Fisik	Lubuk Barumun	Perencanaan Tata Ruang	pasar Latong	Pengadaan Lampu Jalan Sebanyak 10 Tiang di Desa Pasar Latong	10	Raja Aslin Sinaloan Lbs
148	Fisik	Lubuk Barumun	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Bonal	Pengaspalan Jalan Hotmix dari Desa Bonal Sampai Dengan Jalan Jalur 2 Sepanjang 200 m	200	Raja Aslin Sinaloan Lbs
149	Fisik	Lubuk Barumun	Rehab Mesjid	Pagaran Jae Batu	Rehab Musolla Di Desa Pagaran Jae Batu	1	Raja Aslin Sinaloan Lbs
150	Fisik	Lubuk Barumun	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pagaran Silindung	Pengerasan Jalan Sepanjang 700 m di desa Pagaran Silindung	700	Raja Aslin Sinaloan Lbs
151	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Pagaran Silindung	Pembangunan Dek Sepanjang 800 m di Desa Pagaran Silindung	800	Raja Aslin Sinaloan Lbs
152	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pagaran Silindung	Pembangunan Bronjong Panjang 200 m di Desa Pagaran Silindung	200	Raja Aslin Sinaloan Lbs
153	Fisik	Lubuk Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Pagaran Silindung	Pembangunan Rabat Beton Sepanjang pinggir aspal 250x2 m	250	Raja Aslin Sinaloan Lbs

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
154	Fisik	Lubuk Barumun	Pengelolaan areal pemakaman	Pagarar Silindung	Pembuatan Pagar TPU di desa Pagar Silindung	150	Raja Aslin Sinaloan Lbs
155	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Huta Lombang	Pembangunan Paret/drainase di pinggir jalan Deretan Pabrik	300	Raja Aslin Sinaloan Lbs
156	Fisik	Lubuk Barumun	pembangunan jalan dan jembatan	Hutaibus	Pembukaan Jalan Baru dari desa Hutaibus ke Jalur dua	250	Raja Aslin Sinaloan Lbs
157	Fisik	Lubuk Barumun	Pembangunan Ruang Kelas	Pondok Pesantren Al-Jakpariyah	Pembangunan RKB sebanyak 2 Ruang untuk Pondok Pesantren Al-Jakpariyah	2	Raja Aslin Sinaloan Lbs
158	Fisik	Lubuk Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Batang Bulu Jae	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Batang Bulu Jae menuju Desa Batang Tanggal Baru	1500	Raja Aslin Sinaloan Lbs
159	Fisik	Lubuk Barumun	Perencanaan Tata Ruang	pasar Latong	Pengadaan Lampu Jalan dari Desa Pasar Latong ke Jalur dua	15	Raja Aslin Sinaloan Lbs
160	Non Fisik	Lubuk Barumun	Pendidikan Non Formal	Hutaibus	Pembangunan Aula TK Sutan Sinaloan Lubis Pasar Latong	0	Raja Aslin Sinaloan Lbs
161	Fisik	Lubuk Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	bonal	peningkatan jalan hotmix dari desa bonal ke pagarar jae batu	0	Raja Aslin Sinaloan Lbs
162	Fisik	Lubuk Barumun	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DESA JANJI LOBI LIMA	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (SUMBER AIR PERMUKAAN)	3	H. Puli Parisan Lubis, Lc
163	Fisik	Lubuk Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DESA JANJI LOBI LIMA	PEMBANGUNAN PARET JALAN DESA JANJI LOBI LIMA	200	H. Puli Parisan Lubis, Lc
164	Fisik	Lubuk Barumun	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Janji Lobi Lima	Pembangunan Air Bersih (Sumber Air Permukaan)	3	H. Puli Parisan Lubis, Lc
165	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Sibodak	untuk menjaga kebersihan tempat ibadah	8	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
166	Fisik	Huta Raja Tinggi	Peningkatan Jalan & Jembatan	sigalapung	lanjutan peningkatan jalan desa sigalapung	0	Syahrul Nasution
167	Fisik	Huta Raja	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Ujung Batu IV	Pembuatan MCK	1	Syahrul Nasution



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tinggi					
168	Fisik	Huta Raja Tinggi	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Pir Trans Sosa II	Pembangunan Jembatan	40	Syahwili Nasution
169	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Ujung Batu V	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
170	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Ujung Batu V	Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum	600	Syahwili Nasution
171	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Ujung Batu IV	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
172	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Pir Trans Sosa II	Pembuatan Pagar Kantor Desa	400	Syahwili Nasution
173	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Ujung Batu III	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
174	Fisik	Huta Raja Tinggi	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Ujung Batu III	Pembuatan MCK	1	Syahwili Nasution
175	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Ujung Batu II	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
176	Fisik	Huta Raja Tinggi	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Ujung Batu II	Pembuatan MCK	1	Syahwili Nasution
177	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Pir Trans Sosa II	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
178	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa Ujung Batu I	Pembuatan Sumur Bor	1	Syahwili Nasution
179	Fisik	Huta Raja Tinggi	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Ujung Batu I	Pembangunan MCK	1	Syahwili Nasution
180	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Pir Trans Sosa II	Pembuatan Pagar Tempat Pemakaman Umum	500	Syahwili Nasution
181	Fisik	Huta Raja	Pembangunan turap/talud/bronjong	Sungai Korang	pembangunan embung desa sungai	0	Sahrudin Nasution

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tinggi			korang		
182	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ujung Batu IV	Pengadaan Moblier MDA Almuhajirin ujung bati IV	0	Sahrn Hasibuan
183	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	Ujung Batu III	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Tanri Mulia Jaya di Desa Aliaga III	0	Sahrn Hasibuan
184	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Ujung Batu IV	Pembnagunan RKB dan Sarpras MDA Almuhajirin Desa Ujung Batu IV volume 2 lokal	1	Sahrn Hasibuan
185	Fisik	Huta Raja Tinggi	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah	Desa Sungai Korang	Pembuatan kolam Penampung Air Desa Sungai Korang volume paket 1 Unit	1	Sahrn Hasibuan
186	Fisik	Huta Raja Tinggi	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah	Desa Sungai Korang	Pembuatan SAB/ Sumur Bor di Desa Sungai Korang	1	Sahrn Hasibuan
187	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa mananti Sosa jae	Rehab dan Pengadaan Sarpras MDA Desa Mananti Sosa jae	1	Sahrn Hasibuan
188	Fisik	Huta Raja Tinggi	Revitalisasi Pasar Tradisional	Desa Ujung Batu IV	Rehab Pasar Ujung Batu IV	1	Sahrn Hasibuan
189	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	Desa Ujung Batu III	Pembukaan/pengaspalan Jalan dari Desa Ujungbatu III menuju desa Sungai Korang	5000	Sahrn Hasibuan
190	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Ujung Batu III	Pembangunan Ruang Kelas Baru MDA Desa Ujung Batu III	0	Sahrn Hasibuan
191	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Sungai Korang	Lanjutan Pemagaran TPU Desa Sungai Korang	100	Sahrn Hasibuan
192		Huta Raja Tinggi		Desa Ujung Batu III	Pembukaan/Pengaspalana Jalan dari Desa Ujung Batu III menuju Desa Sungai Korang Sepanjang Lebih Kurang 5 Kilo Meter	5000	Sahrn Hasibuan
193	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	Iubuk bunut	pengerasan jalan desa iubuk bunut	2000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
194	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	trans pir sosa V	pergerasan jalan pertanian 3 km	3000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
195	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	mananti sosa jae	pembangunan MCK desa mananti sosa jae	16	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
196	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	mananti sosa jae	pembangunan lokal madrasah desa mananti sosa jae	3	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
197	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	lubuk bunut	pembangunan dek penahan penampungan air	300	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
198	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	pir trans sosa IV	pembuatan SAB desa pir trans sosa IV	300	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
199	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	lubuk bunut	pembangunan pagar masjid desa lubuk bunut	100	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
200	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	lubuk bunut	peningkatan jalan hotmix keiling 2 km desa lubuk bunut	2000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
201	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	pir trans sosa V	pembangunan MCK masjid desa pir trans sosa V	16	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
202	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	trans pir sosa V	pergerasan jalan desa sepanjang 2 km desa pir trans sosa V	2000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
203	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	trans pir sosa V	pemasangan lampu jalan pemukiman di desa trans pir sosa V	50	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
204	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	trans pir sosa IV	pembangunan lanjutan pagar TPU desa trans pir sosa IV	150	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
205	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	trans pir sosa IV	pemasangan lampu jalan di desa trans pir sosa IV	50	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
206	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	trans pir sosa IV	pembuatan SAB di desa trans pir sosa IV	2000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
207	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Perencanaan Tata Ruang	ujung batu V	rehab kantor kepala desa	0	Jenti Mutiara
208	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Perencanaan Tata Ruang	ujung batu v	rehab kantor kepala desa	0	Jenti Mutiara
209	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	pir tran sosa IIlb	rehap puskesmas pembantu	1	Jenti Mutiara
210	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	ujung batu V	rehab puskesmas pembantu	1	Jenti Mutiara
211	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembudidayaan Tanaman Nilam	Desa Ujung Batu II	pengadaan bibit kelapa sawit	2500	Jenti Mutiara
212	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Pir Trans Sosa V	Rehab ruang kelas	3	Jenti Mutiara
213	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	ujung batu V	pembangunan pagar tempat pemakaman umum	5000	Jenti Mutiara
214	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembudidayaan Tanaman Nilam	ujung batu V	pengadaan bibit kelapa hibrida	2000	Jenti Mutiara
215	Non Fisik	Huta Raja Tinggi	Peningkatan produksi hasil peternakan	ujung batu V	pengadaan ternak sapi	20	Jenti Mutiara
216	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	ujung batu V	pembangunan ruang lab SMPN 5 Huta raja tinggi	1	Jenti Mutiara
217	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	ujung batu V	Pembangunan ruang guru SD 0711 desa ujung batu V	1	Jenti Mutiara
218	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Ruang Kelas	ujung batu V	Pembangunan ruang kelas baru SD 0711ujung batu V	2	Jenti Mutiara
219	Fisik	Huta Raja	Pengembangan dan Pengelolaan	ujung batu V	box colper sungai penghubung ujung	7000	Jenti Mutiara

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tinggi	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya		batu V menuju ujung batu I		
220	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jembatan	ujung batu V	Pembangunan lanjutan jembatan ledolan ujung batu V	1	Jenti Mutiara
221	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Jalan	ujung batu V	peningkatan jalan dari ujung batu V menuju ujung Batu I	7000	Jenti Mutiara
222	Fisik	Huta Raja Tinggi	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Sibodak Sosa Jae	Pembangunan Rabat Beton di simpang PTP. akses jalan lingkar di Desa Sibodak Sosa Jae Kaplingan	0	H. Torkis Afgani Hsb
223	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	lubuk bunut	pembangunan drainase dari sialang rindang menuju simpang lorong 1	0	H. Torkis Afgani Hsb
224	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Sibodak sosa jae	pembangunan puskesmas pembantu di desa sibodak sosa jae	0	H. Torkis Afgani Hsb
225	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Desa Lubuk Bunut	Pembuatan Lampu Jalan dari sialang menuju lorong 1	10	H. Torkis Afgani Hsb
226	Fisik	Huta Raja Tinggi	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Sibodak Sosa Jae	Pengerasan Jalan desa Sibodak Sosa Jae kurang lebih 2 Km di desa Sibodak Sosa Jae	2000	H. Torkis Afgani Hsb
227	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Lubuk Bunut	Pembangunan Parit Jalan Dari Sialang Rindang Menuju Simpang lorong 1	500	H. Torkis Afgani Hsb
228	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Desa Sibodak Sosa Jae	Pembangunan lapangan sepak bola di Desa Sibodak Sosa Jae	1	H. Torkis Afgani Hsb
229	Fisik	Huta Raja Tinggi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa Sibodak Sosa Jae	Pengadaan perlengkapan Olahraga di desa Sibodak Sosa Jae	1	H. Torkis Afgani Hsb
230	Fisik	Huta Raja Tinggi	Perencanaan Tata Ruang	Desa Sibodak Sosa Jae	Pembangunan Puskesmas Pembantu Di desa Sibodak Sosa Jae	1	H. Torkis Afgani Hsb
231	Fisik	Huta Raja Tinggi	Perencanaan Tata Ruang	Desa Lubuk Bunut	Pembangunan Jalan Lingkar kurang	1	H. Torkis Afgani Hsb



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Tinggi			lebih 3 Km Di Desa Lubuk Bunut		
232	Fisik	Huta Raja Tinggi	Perencanaan Tata Ruang	Desa Lubuk Bunut	Pembangunan lapangan sepak bola di desa Lubuk Bunut	1	H. Torkis Afgani Hsb
233	Fisik	Huta Raja Tinggi	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Aliaga	Untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat	30	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
234	Fisik	Huta Raja Tinggi	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Aliaga	lanjutan peningkatan jalan	3000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
235	Fisik	Huta Raja Tinggi	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Pagaran Dolok	untuk mempermudah akses transportasi	2000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
236	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Pagaran Dolok	untuk menjaga kebersihan dan keamanan TPU	500	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
237	Fisik	Huta Raja Tinggi	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Sibodak	untuk mempermudah akses masyarakat menuju lahan pertanian atau perkebunan	2000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
238	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	Desa Sibodak	untuk meningkatkan kesehatan dan air minum yang bersih	4000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
239	Fisik	Huta Raja Tinggi	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Desa Sibodak	untuk meningkatkan penerangan	5	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
240	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa subulussalam	pembangunan irigasi pertanian 300 m	300	Maraganti Hsb
241	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa subulussalam	pumbuatanlampu jalan 8 tiang	8	Maraganti Hsb
242	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	subulussalam	pembuatan bronjong sungai sibulussalam 60 meter	60	Maraganti Hsb
243	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa matondang	pembuatan pagar makam sepanjang 400m	400	Maraganti Hsb
244	Non Fisik	Ulu Barumun	Pendidikan Anak Usia Dini	desa matondang	rehab berat sekolah mda 2 ruang	2	Maraganti Hsb

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
245	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa pintu padang	lampu jalan	8	Maraganti Hsb
246	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jembatan	paringgonan Julu	pembangunan jembatan gantung menuju saba ipar	1	Maraganti Hsb
247	Fisik	Ulu Barumun	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Nadoras Julu	pengaspalan hotmik jalan menuju tapian nauli lebih kura ng 4 M x 1500 M	1	Maraganti Hsb
248	Fisik	Ulu Barumun	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Nadoras Julu	Pengerasan Jalan menuju perkebunan masyarakat sepanjang 5 M X 2 Km	1	Maraganti Hsb
249	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	sibulusalam	pembangunan bendungan sungai sibulusalam	1	Maraganti Hsb
250	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jembatan	Desa subulusala	Pembangunan jembatan	1	Maraganti Hsb
251	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Paringgonan	Pembangunan Bendungan Sawah lampisi	4	Romi Parmonangan Nst, SH
252	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Paringgonan	Pembangunan Dek Pengairan Sawah lampisi Paringgonan	1000	Romi Parmonangan Nst, SH
253	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Paringgonan	Pembangunan Jaringan Irigasi Pengairan Telaga Aek Paringgonan	2000	Romi Parmonangan Nst, SH
254	Fisik	Ulu Barumun	Rehab Mesjid	Desa Paringgonan	Rehab Mesjid Babul Jannah	1	Romi Parmonangan Nst, SH
255	Fisik	Ulu Barumun	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Handang Kopo	Pembangunan MCK Mesjid Al-amin	0	Romi Parmonangan Nst, SH
256	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Handang Kopo	Pembangunan Paret Besar	100	Romi Parmonangan Nst, SH
257	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Simanulandang Julu	Pembangunan Dek Sawah Sitarollo menuju Sawah Ramba Soli	2500	Romi Parmonangan Nst, SH
258	Fisik	Ulu Barumun	Rehab Mesjid	Siraisan	Rehab Mesjid Al-Muttaqin	1	Romi Parmonangan Nst, SH

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
							SH
259	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Siraisan	Pembangunan Saluran Irigasi Air Sawah Julu	2500	Romi Parmonangan Nst, SH
260	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Paringgonan	Pembangunan Dek Air Barumun	800	Romi Parmonangan Nst, SH
261	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Tapian Nauli	pembangunan Saluran Irigasi Sawah Pasir	1500	Romi Parmonangan Nst, SH
262	Non Fisik	Ulu Barumun	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Desa Paringgonan Julu	Pengadaan Pupuk Tani	300	Romi Parmonangan Nst, SH
263	Non Fisik	Ulu Barumun	Peningkatan produksi hasil peternakan	Desa Paringgonan Julu	Pengadaan Bibit Ternak Ayam	500	Romi Parmonangan Nst, SH
264	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Paringgonan Julu	Perbaikan Paret	3000	Romi Parmonangan Nst, SH
265	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Tapian Nauli	Pembangunan Bronjong Dipinggir Sawah	170	Romi Parmonangan Nst, SH
266	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Paringgonan Julu	Rehap Jalan Desa Paringgonan Julu	3000	Romi Parmonangan Nst, SH
267	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jembatan	Simanulandang Julu	Pembangunan Jembatan Lahan Lobu	8	Romi Parmonangan Nst, SH
268	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Simanulandang Jae	Pembangunan Irigasi Sawah Lubu	2000	Romi Parmonangan Nst, SH
269	Fisik	Ulu Barumun	Rehab Mesjid	Desa Handang Kopo	Renovasi Mesjid Al-Amin	1	Romi Parmonangan Nst, SH
270	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Simanulandang Jae	Pembangunan Bronjong	180	Romi Parmonangan Nst, SH
271	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan saluran	Desa Simanulandang Jae	Pembangunan Gorong-gorong	20	Romi Parmonangan Nst, SH



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			drainase/gorong-gorong				SH
272	Non Fisik	Ulu Barumun	Peningkatan produksi hasil peternakan	Desa Simanulandang Jae	Pengadaan Bibit Ternak Lembu	20	Romi Parmonangan Nst, SH
273	Non Fisik	Ulu Barumun	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DESA SIBUAL BUALI	UNTUK PEMBERDAYAAN PAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PMKS	3	H. Puli Parisan Lubis, Lc
274	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jembatan	DESA SIBUAL BUALI	PENGHUBUNG JALAN ANTAR DESA	1	H. Puli Parisan Lubis, Lc
275	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa paringgonan	Pemanfaatan sumber air panas di desa paringgonan dengan cara pembuatan air PAM ke Rumah warga	10000	Sufriady Halomoan Hsb,S.S.Pd,SH
276	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tanjung	Pembangunan Air Bersih (Sumber Air Permukaan)	6	H. Puli Parisan Lubis, Lc
277	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Paran Batu	Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumber Air Permukaan)	5	H. Puli Parisan Lubis, Lc
278	Non Fisik	Ulu Barumun	Manajemen Pelayanan Pendidikan	DESA PARAN BATU	PENGADAAN MOBILER MDA 2 RUANGAN DESA PARAN BATU	2	H. Puli Parisan Lubis, Lc
279	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DESA PARAN BATU	LANJUTAN PARET DESA, DESA PARAN BATU	250	H. Puli Parisan Lubis, Lc
280	Non Fisik	Ulu Barumun	Manajemen Pelayanan Pendidikan	DESA SIBUAL BUALI	PENGADAAN MOBILER MDA DESA SIBUAL BUALI	0	H. Puli Parisan Lubis, Lc
281	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jalan	DESA TANJUNG	PEMBANGUNAN JALAN MENUJU LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT DESA TANJUNG	500	H. Puli Parisan Lubis, Lc
282	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DESA SIBUAL BUALI	NORMALISASI SUNGAI ATAU PELURUSAN BARUMUN DESA SIBUAL BUALI	600	H. Puli Parisan Lubis, Lc
283	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa matondang	pembangunan bendungan di saba	0	Marganti Hsb

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					barumun		
284	Fisik	Ulu Barumun	Pembangunan Jembatan	paringgonan	perbangunan jembatan aek paringgonan menuju perkebunan masyarakat	1	Maraganti Hsb
285	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	paringgonan julu	perbangunan irigasi persawahan di saba jae	150	Maraganti Hsb
286	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	desa pasar ipuh	Rehab irigasi persawahan sabah jae	150	Maraganti Hsb
287	Fisik	Ulu Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Sibulus salam	Pembangunan irigasi persawahan di saba jae	0	Maraganti Hsb
288	Fisik	Ulu Barumun	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pintu Padang	Pengerasan jalan menuju perkebunan masyarakat (desa pintu padang)	0	Maraganti Hsb
289	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	pembangunan jalanaek paringgonan menjuparinggonan julu	3000	Maraganti Hsb
290	Non Fisik	Ulu Barumun	Pendidikan Anak Usia Dini	paringgonan julu	penambahan ruang kelas sekolah sd satu ulu barumun 1 unit	1	Maraganti Hsb
291	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	panbuatan drainase/ irigasi pertanian di saba lampisi 2000m	2	Maraganti Hsb
292	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	penbuatan drainase/ irigasi pertanian di saba rinba.1000 meter	1000	Maraganti Hsb
293	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	penbuatan dek air paringgonan menuju bondar godang .3000m	1	Maraganti Hsb
294	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	hotmik menuju aek sinongan 400m	400	Maraganti Hsb
295	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	hotmik menuju pemakaman 1000 meter	1000	Maraganti Hsb
296	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	perbangunan hotmik jalan pendidikan	800	Maraganti Hsb

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					menuju aek milas 800 m		
297	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	parinngonan	hotmik lanjutan menuju aek milas. 500 meter	500	Maraganti Hsb
298	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan	p hotmix j mayor daulat hsb, menuju h si hepeng 2000 m	2	Maraganti Hsb
299	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa pasaripuh	penbuatan lampu jalan 8 tiang	8	Maraganti Hsb
300	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa pasaripuh	penbuatan parit jalan di depan puskesmas 150m	150	Maraganti Hsb
301	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan julu	pembangunan dranase /irigasi pertanian saba dolok sepanjang 300m	300	Maraganti Hsb
302	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan julu	penbuatan lampu jalan 8 tiang	6	Maraganti Hsb
303	Non Fisik	Ulu Barumun	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	paringgonan julu	rehab berat musollah	1	Maraganti Hsb
304	Non Fisik	Ulu Barumun	Pendidikan Anak Usia Dini	paringgonan julu	pembangunan pagar sekolah	300	Maraganti Hsb
305	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan julu	pembuatan jembatan ranbin 150 m menuju simartolu	150	Maraganti Hsb
306	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	paringgonan julu	pengaspalan jalan hotmik	600	Maraganti Hsb
307	Fisik	Ulu Barumun	Perencanaan Tata Ruang	desa subulussalam	pembuatan mck 2 unit	2	Maraganti Hsb
308	Fisik	Barumun	Pembangunan Ruang Kelas	sibuhuan	pembangunan 2 ruang kelas baru TK Al-Izzah Sibuhuan	2	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
309	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pembangunan jalan setiapak pemakaman banjar kubur	250	H. Nukman Hrp,SH

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
310	Fisik	Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	Peningk atan jalan menuju Tanah Wakap lingkungan VI Padang Luar	400	H. Nukman Hrp,SH
311	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembangunan paving blok masjid baitul makmur desa pagaran baringin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
312	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembangunan teras masjid baitul makmur desa pagaran baringin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
313	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembangunan pagar masjid baitul makmur desa pagaran baringin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
314	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pengadaan lampu jalan di desa pagaran baringin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
315	Fisik	Barumun	Pembangunan Jembatan	Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pembangunan Jembatan dari banjar Kubur menuju tanah Wakap banjar kubur	1	H. Nukman Hrp,SH
316	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bangun Raya	Pembangunan lanjutan jalan Masjid desa bangun raya menuju pemakaman lingkungan 1 dan sekolah yasemma	1	Raja Parlindungan Nst, ST
317	Fisik	Barumun	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan	Lanjutan pembangunan Dek Aek Salak	200	H. Nukman Hrp,SH
318	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bangun Raya	Pengerokan Paret Sepanjang jalan lintas gunung tua	1	Raja Parlindungan Nst, ST
319	Non Fisik	Barumun	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Bulusonik	Pengadaan Mobiler MIS An-naas Desa Bulusonik	0	Raja Parlindungan Nst, ST
320	Non Fisik	Barumun	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Desa Bulu Sonik	Pengajian Rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit Rumah	1	Raja Parlindungan Nst, ST
321	Non Fisik	Barumun	Peningkatan produksi hasil peternakan	Desa Bulu Sonik	Pengadaan Bibit Ikan Lele untuk kelompok Tani	1	Raja Parlindungan Nst, ST
322	Non Fisik	Barumun	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Barumun	Penambahan Honor Malim Kapung	1	Raja Parlindungan Nst, ST
323	Fisik	Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Handis Julu	Pembangunan Bronjong di Desa Handis	800	Muhammad Alwi Lubis

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					Julu Sepanjang 800 Meter		
324	Non Fisik	Barumun	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Desa Bangun Raya	Penerbitan Pelayanan Administrasi BPJS di Desa Bangun Raya	1	Raja Parliindungan Nst, ST
325	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Handis Julu	Pembangunn Jalan Desa Binabo menuju Desa Handis	1	Raja Parliindungan Nst, ST
326	Non Fisik	Barumun	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Desa Bulu Sonik	Pembentukan SPSI Di 4 Huta Se-Lembah Binubu	1	Raja Parliindungan Nst, ST
327	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Janji Lobi	Pembangunan Irigasi Di Desa Janji Lobi Sepanjang 150 Meter	150	Muhammad Alwi Lubis
328	Non Fisik	Barumun	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Desa bulu sonik	Pengadan mobiler MDA Desa Bulusonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
329	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Perluasan Lahan Makam Desa Bulusonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
330	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembangunan lanjutan bronjong desa bulusonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
331	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Penggantian Seng Masjid Addua desa Bulusonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
332	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembuatan pagar Masjid Addua desa Bulusonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
333	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Pembangunan Pagar Masjid Addua Desa Bulu Sonik	1	Raja Parliindungan Nst, ST
334	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Pancaukan	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Khuldi Desa Pancaukan	1	Raja Parliindungan Nst, ST
335	Non Fisik	Barumun	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Desa Pancaukan	Penerbitan Pelayanan BPJS Desa pancaukan	1	Raja Parliindungan Nst, ST
336	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Pancaukan	Pembangunan Bondar Desa pancaukan	1	Raja Parliindungan Nst, ST
337	Fisik	Barumun	Pembangunan Jembatan	Sungai Padang	Pembangunan Jembatan	1	Drs.H, Jamaluddin

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
							Hsb,M,Ap
338	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Aek Masjid	Pembangunan Bendungan agar tidak terjadi banjir	20	Drs.H,iamaluddin Hsb,M,Ap
339	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Aek Sihoping	Pembangunan Dek untuk Irigasi Persawahan	30	Drs.H,iamaluddin Hsb,M,Ap
340	Fisik	Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa tanjung botung	pembangunan bronjong penahan banjir di desa tanjung botung sepanjang 200 meter	200	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
341	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung botung	Pembangunan lanjutan jalan dari SD Saroha menuju jalan Situmorang sepanjang 1 Km	1000	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
342	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Tanjung botung	Pembuatan tanggul pengaman sepanjang aliran sungai Aek Iobi di desa Tanjung botung sepanjang 100 meter	100	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
343	Fisik	Barumun	Pengelolaan areal pemakaman	Desa hutarimbaru	Pembangunan pagar TPU di desa Hutarimbaru	0	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
344	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa hutarimbaru	Pengaspalan jalan penghubung antara desa Hutarimbaru dengan desa Sayurmatua sepanjang 500 m	500	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
345	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa sayur matua	Pembangunan Gorong-gorong di desa Sayur matua sepanjang 500 meter	500	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
346	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa tano bato	Pembangunan Dek atau paret mulai dari desa Tano Batak menuju desa Hutarimbaru sepanjang 400 meter	400	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
347	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa hutarimbaru	Pembangunan gorong-gorong dan jembatan kecil sepanjang jalan dari desa Hutarimbaru menuju desa Sidomulyo	250	Sufriady Halomoan Hsb,S,Pd,SH
348	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa hutarimbaru	Pengerasan dan pengaspalan jalan dari	1500	Sufriady Halomoan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					desa hutarimbaru menuju desa Sidomulyo sepanjang 1,5 Km		Hsb,S.Pd,SH
349	Fisik	Barumun	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Pancaukan	Untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian masyarakat	1500	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
350	Fisik	Barumun	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Pancaukan	untuk menjaga kebersihan dan keamanan	500	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
351	Fisik	Barumun	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Arsesimortoris	menjaga kebersihan dan keamanan	600	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
352	Fisik	Barumun	pembangunan jalan dan jembatan	Bulusonik	mempermudah jalan untuk menuju mesjid	20	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
353	Fisik	Barumun	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Pancaukan	untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam melaksanakan ibadah	800	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
354	Fisik	Barumun	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Pagaran Baringin	untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah	1000	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
355	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Tano Bato	Pembangunan Dek dan Pelebaran Paret Jalan	300	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
356	Fisik	Barumun	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jl. Lintas Gunung Tua	Penambahan lampu jalan	4	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
357	Fisik	Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan		Peningkatan Jalan	1000	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
358	Fisik	Barumun	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jalan Pendidikan	Penambahan Tiang Listrik	10	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
359	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Sibuhuan Jae	Pembukaan jalan	500	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
360	Fisik	Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Sibuhuan Jae - jalur 2	hotmik	1000	Drs.H.ijamaluddin Hsb,M.Ap
361	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Purba Tua	Perbaikan jalan Desa Purba Tua	1	Raja Parliindungan Nst, ST
362	Fisik	Barumun	Program Pembangunan, Pemeliharaan	Pasar Sibuhuan	Pembangunan Jalan Setapak dari	0	H. Nukman Hrp,SH



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman		Parsulukan menuju jalan tikus Aek Salak		
363	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Kelurahan Pasar sibuhuan	Pengadaan lampu jalan umum dari masjid al-muhajirin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
364	Fisik	Barumun	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Pagaran Baringin	Rabat Beton di pemandian belakang Posyandu Desa Pagaran Baringin	0	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
365	Non Fisik	Barumun	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sibuhuan Julu	Pembangunan Pagar meter Sekolah MDA (Madrasah Dinayah Awaliyah) syekh Hasbulloh sibual-buali	0	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
366	Fisik	Barumun	Pembangunan Ruang Kelas	Sibual-buali	Pembangunan Pagar Sekolah MDA (Madrasah Dinayah Awaliyah) Syekh Hasbulloh Sibual-buali.	1	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
367	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung Botung	Lanjutan Pembangunan Jalan Speker Desa Tanjung Botung menuju Desa Sayur Matua	8000	H. Irsan Bangun Harahap, ST
368	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung Botung	Lanjutan Pembangunan Jalan Speker Desa Tanjung Botung menuju Desa Sayur Matua	8000	H. Irsan Bangun Harahap, ST
369	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Bulu Sonik	Memperbaiki Paret Jalan sepanjang ± 250 meter, Guna Menghindari Genangan Air Apabila Musim Hujan	250	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
370	Fisik	Barumun	Rehab Mesjid	Desa Sibuhuan Julu	Rehab Mesjid AL Abror Desa Sibuhuan Julu	1	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
371	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Sibuhuan Julu	Pembangunan Irigasi Menuju Saba Payahoda Desa Sibuhuan Julu	30	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
372	Fisik	Barumun	Rehab Mesjid	Desa Bulu Sonik	Rehab Mesjid Addua Desa Bulu Sonik	1	H. Fahmi Anwar Nasution, ST

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
373	Fisik	Barumun	Pembangunan Mesjid	Desa Bulu Sonik	Pembangunan Pagar Mesjid Addua Desa Bulu Sonik	30	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
374	Fisik	Barumun	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Pagaran Baringin	Penambahan Luas TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Pagaran Baringin Luas 2 (HA)	20000	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
375	Fisik	Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Pancaukan	Pembukaan Jalan dari Desa Pancaukan menuju kantor SKPD Kabupaten Padang Lawas	3000	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
376	Fisik	Barumun	Pembangunan turap/talud/bronjong	Arse Simatorkis	pembangunan bronjong di desa arse simatorkis	200	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
377	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Arse Simatorkis	Pembuatan Paret (saluran drainase) sepanjang desa Arse Simatorkis	500	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
378	Fisik	Barumun	Pembangunan Jembatan	Arse Simatorkis	Pembangunan Jembatan Gantung (Rambin) di Desa Arse Simatorkis	20	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
379	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bulu Sonik	Penambahan kartu BPJS gratis dari Pemda di desa Pagaran baringin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
380	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Purba Tua	Rehab Rambin desa purba tua	1	Raja Parlindungan Nst, ST
381	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Kelurahan Pasar sibuhuan	Pembangunan lanjutan drainase// pret jalan muhajirin	1	Raja Parlindungan Nst, ST
382	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bangun Raya	Pengadaan Lampu jalan Di jalan Masjid Desa Bangun Raya	1	Raja Parlindungan Nst, ST
383	Fisik	Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Bangun Raya	Pengadaan Lampu Jalan di Jalan Lintas Gunung Tua di Desa Bangun Raya	1	Raja Parlindungan Nst, ST
384	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pembangunan Drainase Gang Al Fajar Lingkungan VI pasar sibuhuan	400	H. Nukman Hrp,SH
385	Fisik	Barumun	Rehab Mesjid	Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pembangunan menara mesjid Annur Lingkungan VI Pasar Sibuhuan	1	H. Nukman Hrp,SH
386	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	pembangunan dek penahan banjir	1	Mhd. Hamidi Pasaribu

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					pemukiman beronjong lama pasar lombang pasar ujung batu		
387	Fisik	Sosa	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Handio	Pembangunan Bronjong Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kurang lebih 1 Km	1000	Agus Nasution
388	Fisik	Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Mondang	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Mondang	500	Mhd. Hamidi Pasaribu
389	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	pembangunan hotmik lanjutan dan penahan jalan jembatan aek sosa	2	Mhd. Hamidi Pasaribu
390	Fisik	Sosa	Pembangunan Jalan	Desa Mandian	Pembangunan Jalan Setapak Di Desa Mandian Kecamatan Sosa sepanjang 1 Km	1000	Agus Nasution
391	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	tembok lapangan bola	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
392	Fisik	Sosa	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	gunung baringin	pembangunan pagar aula desa gunung baringin	0	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
393	Fisik	Sosa	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pasar Ujung Batu	Pembangunan Drainase Desa Pasar Ujung Batu	1000	Mhd. Hamidi Pasaribu
394	Non Fisik	Sosa	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pasar Ujung Batu	Pengadaan Ternak Lembu dan Kambing di Pasar Ujung Batu	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
395	Fisik	Sosa	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Mandian	Pembangunan Bronjong Di Desa Mandian Kecamatan Sosa Sepanjang 200 m	200	Agus Nasution
396	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	Pembangunan hotmik dari pesanteren darul fathah sampai desa gunung baringin menuju jalan lintas riau	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
397	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	jalan monandang	pengerasan jalan usaha tani simpang veron sampai jalan lintas desa siborna	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
398	Non Fisik	Sosa	Pendidikan Anak Usia Dini	Aek Tinga	Pembangunan paving Blok TK Al-Ikhlas Desa Aek Tinga	0	Sahrhun Hasibuan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
399	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	sisoma	Pengerasan jalan usaha tani Desa SISOMA	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
400	Fisik	Sosa	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah	Desa Aer Bale	Pembangunan sumur bor	0	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
401	Fisik	Sosa	pembangunan jalan dan jembatan	Pasar Ujung Batu	Pembukaan Jalan di Pondok Pesantren Darul Falah Pasar Ujung Batu	170	Mhd. Hamidi Pasaribu
402	Fisik	Sosa	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Mondang	Pembangunan RKB Madrasah Diniyah Awaliah Darul Falah II	2	Mhd. Hamidi Pasaribu
403	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	pembangunan dek penahan banjir aek takki lanjutan 100 m	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
404	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	smp 6 sosa	Pagar sekolah SMP NEGERI 6 SOSA	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
405	Fisik	Sosa	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	pasar ujung batu	Peningkatan Jalan rabat Beton Pesantren Darul Falah	0	Mhd. Hamidi Pasaribu
406	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	Tanjung Botung	Pembangunan pagar kuburan desa Tanjung Botung	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
407	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	pembangunan rabat beton pemukiman penduduk bukit berbunga desa pasar ujung batu	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
408	Fisik	Sosa	Pembangunan Mesjid	Aer Bale	Pembangunan mesjid 700 meter	700	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
409	Fisik	Sosa	Perencanaan Tata Ruang	pasar ujung batu	pembangunan dek penahan banjir dan abrasi hulu jembatan aek sosa	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
410	Fisik	Sosa	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Gunung Tua	Pembangunan Dek Penahan Sawah Di Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa sepanjang 500 m	500	Agus Nasution
411	Fisik	Sosa	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Gunung Tua	Pembangunan Rapat Beton Di Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa	400	Agus Nasution

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					sepanjang 400 m		
412	Fisik	Sosa	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Gunung Tua	Pengerasan Jalan Di Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa 1 km	1000	Agus Nasution
413	Fisik	Sosa	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Mondang	Pembangunan RKB SMP N6 Sosa	1	Mhd. Hamidi Pasaribu
414	Non Fisik	Sosa	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Aer Bale	Penambahan tenaga pengajar sebanyak 5 tenaga pengajar	5	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
415	Fisik	Sosa	Pembangunan Jalan	Desa Gunung Tua	Pembangunan Jalan Setapak Di Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa 1 km	1000	Agus Nasution
416	Fisik	Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Mondang	Pengerasan Jalan Desa Mondang	0	Mhd. Hamidi Pasaribu
417	Non Fisik	Sosa	Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa Handio	Pengadaan MCK Di Desa Handio Kecamatan Sosa Guna Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekitar	2	Agus Nasution
418	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Tanjung Baru	Pembangunan Pagar tanah wakaf (tpu) di desa tanjungg baru	0	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
419	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	tanjung barani	pembangunan tembok penahanan penahanantebing	0	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
420	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	tamiang	pembangunan tembok penahanan tebing	0	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
421	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Ruang Kelas	pinarik	pembangunan ruang kelas (RKB) MDA darul hikam	0	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
422	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Upaya Kesehatan Masyarakat	pinarik	pembangunan MCK umum di desa hutabaru	2	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
423	Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Jalan & Jembatan	pinarik	peningkatan jalan lintas pinarik (lanjutan) di desa hutabaru	9000	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
424	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	pinarik	normalisasi sungai di desa pagaran baringin	1000	MUARA KUMPUL NASUTION, M. Pd. I
425	Fisik	Batang Lubu	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak	pinarik	pembangunan lapangan bola di desa	1	MUARA KUMPUL

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Sutam	Bola		pagaran baringin		NASUTION,M.Pd.I
426	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Perencanaan Pembangunan Daerah	pinarik	pembangunan pagar aula desa pagaran baringin	500	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
427	Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Jalan & Jembatan	pinarik	peningkatan jalan desa pagaran baringinmenuju perkebunan masyarakat (depan aula)300m di desa pagaran baringin	300	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
428	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	pinarik	pengadaan lapangan bola, dengan membuat akta notaris club sepak bola putra desa manggis	1	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
429	Fisik	Batang Lubu Sutam	Perencanaan Tata Ruang	pinarik	pembangunan titi gantung dari desa manggis menuju aek sotang desa manggis	1500	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
430	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	pinarik	peningkatan jalan lintas pinarik (lanjutan) di desa manggis	9000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
431	Fisik	Batang Lubu Sutam	Perencanaan Tata Ruang	pinarik	pembangunan dek penahan banjir dengan panjang 250m dan tinggi 3m	250	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
432	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	pinarik	pembangunan /pengadaan sarana air bersih	2000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
433	Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Jalan & Jembatan	pinarik	peningkatan jalan lintas pinarik (lanjutan) di desa tanjung barani	9000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
434	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	pinarik	pembangunan dek penahan banjir dengan panjang 150 dan tinggi 10 meter di desa tamiang	150	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
435	Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Jalan & Jembatan	pinarik	peningkatan jalan lintas pinarik (lanjutan) di desa tamiang	9000	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
436	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	pinarik	pengadaan air bersih di desa tamiang	1500	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I
437	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	pinarik	pembangunan drainase (dek) dari tol nailing sampai kedesa tanjung baru	800	MUARA KUMPUL NASUTION,M.Pd.I

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
438	Fisik	Batang Lubu Sutam	Perencanaan Tata Ruang	pinarik	peningkatan jalan lintas pinarik (lanjutan) di desa tanjung baru	9	MUARA KUMPUL NASUTION, M.Pd.I
439	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Desa Aek Sorik	Pembangunan rabat beton menuju ladang usaha masyarakat 100 meter	100	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
440	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa Aek Sorik	Pembangunan Badan Jalan / Tanjakan di jalan lintas pinarik Papaso 3 km	3000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
441	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Aek Sorik	Pembangunan sekolah menengah atas (SMA) Di batang lubu sutam di desa aek sorik Sebanyak 6 RKB	6	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
442	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Kesempatan Kerja	Desa Aek Sorik	Pengadaan kursus mesin jahit sebanyak 5 mesin jahit	5	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
443	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Pendidikan Non Formal	Desa Tanjung Baru	Program anak Putus Sekolah di bangun kelas sebanyak 3 RKB	3	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
444	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Desa Hatongga	Rehabilitasi Mesjid Nurul Jannah 600 meter lengkap dengan alat bangunannya	600	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
445	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Desa Hatongga	Penambahan guru madrasah dan ruang kelas Baru guru madrasah 2 Orang, dan 2 Ruang kelas Baru	2	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
446	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Desa Hatongga	Pembangunan jalan rabat beton 1m x 2km	1000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
447	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Aek Sorik	Pembangunan Drainase	100	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
448	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Desa Aek sorik	Pembangunan lanjutan penahan tembok tebing sebanyak 6 Desa	6	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
449	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Aek sorik	Pengadaan Pembasmi Hama sebanyak 5 Pembasmi Hama	5	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
450	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Pendidikan Anak Usia Dini	Desa tanjung barani	Pembangunan TK/PAUD 3 RKB	3	Arfin Hasibuan, M.Pd.I

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
451	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Desa Manggis	Pengadaan Lapangan Bola 200 Meter	200	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
452	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Desa aek sorik	Penimbunan jalan lintas pinarik papaso sebanyak 30 truk	30	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
453	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan Kesempatan Kerja	Desa Manggis	Pengadaan Mesin Jahit Sebanyak 5 Mesin Jahit	5	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
454	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Desa Hatongga	Pembangunan Akses Jalan Masyarakat menuju simandiingin 3 km	3	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
455	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Desa Hatongga	Pembanggunana tembok Penahan Tebing	100	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
456	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Desa aek sorik	Renovasi mesjid keramik, atap dan mimbar 100 meter	100	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
457	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengelolaan areal pemakaman	Tanjung Baru	Pembangunan Pagar TPU 300 meter	3	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
458	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Desa Manggis	Pembukaan Jalan menuju candi 3000 meter	3000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
459	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Mesjid	Desa Manggis	Pembangunan Mesjid lengkap dengan alat bangunannya 700 meter	700	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
460	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Desa Tanjung Baru	Rehab Parit Desa 500 meter	500	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
461	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Botung	Peningkatan Jalan dari siadam menuju pagaran tayas	5000	Luat Hasibuan
462	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pasar sabtu pinarik	pembangunan sarana air bersih (sumber air permukaan) desa pasar sabtu	1500	Luat Hasibuan
463	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembiinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pinarik	Pembangunan lampu jalan ibu kota kecamatan	20	Luat Hasibuan
464	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembiinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pinarik	Pembuatan lampu jalan ibu kota kecamatan batang lubu sutam 20 titik	20	Luat Hasibuan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
465	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Lanjutan pembangunan jalan mondang menuju pinarik	5000	Luat Hasibuan
466	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Tanjung botung pinarik	Pembangunan tembok penahan tebing aek sibalom di desa tanjung botung pinarik	300	Luat Hasibuan
467	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Lanjutan pembangunan jalan lintas pinarik menuju papaso	5000	Luat Hasibuan
468	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Manggis	Lanjuta pembangunan jalan desa manggis menuju pinarik	5000	Luat Hasibuan
469	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Tanjung botung pinarik	Lanjutan pembangunan jalan usaha tani di sipasir	4000	Luat Hasibuan
470	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jembatan	Tanjung botung pinarik	Pembangunan rambin usaha tani di sipasir	1	Luat Hasibuan
471	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Pembangunan jalan keliling dari desa tandolan menuju pinarik	5000	Luat Hasibuan
472	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jembatan	Pacarani dolok	Pembangunan rambin usaha tani desa pagaran dolok	1	Luat Hasibuan
473	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengelolaan areal pemakaman	Muara naluri baru	Pembangunan pagar pemakaman desa muara malinto baru	250	Luat Hasibuan
474	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Ruang Kelas	Pinarik	Pembangunan sekolah SMK sederajat	3	Luat Hasibuan
475	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pagaran manggis	Rehab rambin desa pagaran manggis	100	Luat Hasibuan
476	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pacarani manggis	Rehab bendungan desa pagaran manggis	20	Luat Hasibuan
477	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Ruang Kelas	Desa botung	Rehab berat MDA desa botung	4	Luat Hasibuan
478	Fisik	Batang Lubu	Rehab Mesjid	Pasar sabtu	Pembangunan MCK meesjid pasar	1	Luat Hasibuan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Sutam			sabtu		
479	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Pembangunan jalan lintas pinarik menuju papao	10000	Luat Hasibuan
480	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Tanjung baru	Lanjutan jalan mon dang menuju pinarik	5000	Luat Hasibuan
481	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Botung	Pembangunan drainase di desa botung	1000	Luat Hasibuan
482	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Ruang Kelas	Botung	Rehab MDA desa botung	112	Luat Hasibuan
483	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Pinarik	Pembuatan vapping blok mesjid pinarik	1	Luat Hasibuan
484	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Pinarik	Perbaikan lapangan bola desa pinarik	1	Luat Hasibuan
485	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Pinarik	Rehab mck masjid pasar sabtu	2	Luat Hasibuan
486	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Peningkatan jalan pinarik menuju papaso	4000	Luat Hasibuan
487	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Lanjutan pembangunan jalan mon dang menuju pinarik	4000	Luat Hasibuan
488	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Desa aek sorik	Renovasi mesjid keramik, atap dan mimbar 200 meter	200	Arfin Hasibuan, M. Pd. I
489	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Mesjid	Desa Manggis	Pembangunan Mesjid 700 meter lengkap dengan alat bangunannya	700	Arfin Hasibuan, M. Pd. I
490	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Manggis	Rehab Mesjid Al-Muttaqin	0	Arfin Hasibuan, M. Pd. I
491	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Manggis	Pembangunan Bronjong	0	Arfin Hasibuan, M. Pd. I
492	Fisik	Batang Lubu	Program Percepatan Pembangunan	Manggis	Pembangunan MCK	0	Arfin Hasibuan, M. Pd. I

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Sutam	Sanitasi Permukiman Daerah				
493	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Tanjung Baru	Pembangunan Jalan di Simamudo 5000 meter	5000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
494	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Mesjid	Desa Tanjung Baru	Pembangunan Mesjid 1000 meter	1000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
495	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan Batang Lubu Sutam Menuju Sumatera Barat 10000 meter	10000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
496	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Manggis	Pengadaan TPU, 200 Meter	200	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
497	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Mesjid	Desa Tanjung Baru	Pembangunan Mesjid 1000 meter	1000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
498	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan Jalan	Pinarik	Pembangunan Jalan Lintas pinarik 7000 meter	7000	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
499	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	Desa tanjung baru	Pembangunan tali air ulu sibodak	2	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
500	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Manggis	Pembangunan Paret/Drainase/Pemeliharaan Drainase	5	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
501	Fisik	Batang Lubu Sutam	Rehab Mesjid	Desa tanjung barani	Renovasi mesjid 500 meter	500	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
502	Fisik	Batang Lubu Sutam	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Tanjung Barani	Pengadaan dana musrenbang Beton 2018 yang tidak terealisasi 300 Meter	300	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
503	Fisik	Batang Lubu Sutam	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Manggis	Pembangunan Jembatan/Rambin 700 meter	700	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
504	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	memberdayaan penyujuh pertanian/perkebunan lapangan	Tanjung Baru	Pengadaan Penyujuh Pertanian sebanyak 10 penyujuh	10	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
505	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Pengembangan Nilai Budaya	Desa Tanjung Barani	Pengadaan baju selayar pengantin dan pelaminan	2	Arfin Hasibuan, M.Pd.I
506	Non Fisik	Batang Lubu	Peningkatan produksi hasil peternakan	Desa Hatongga	Pengadaan Ternak di desa Hatongga 3	3	Arfin Hasibuan, M.Pd.I

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Sutam			Sapi		
507	Non Fisik	Batang Lubu Sutam	Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Manggis	Pembangunan TK Dan SD Sebanyak 4 RKB	4	Artin Hasibuan, M.Pd.I
508	Fisik	Barumun Selatan	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Sidomulyo	Pemagaran SMAN 1 Barumun Selatan	300	Muhammad Alwi Lubis
509	Fisik	Barumun Selatan	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Sidomulyo	Pembangunan pagar Makam Desa Sidomulyo	0	Muhammad Alwi Lubis
510	Fisik	Barumun Selatan	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Tanjung Baringin	Pembangunan RKB SD Negeri 1007 Desa Tanjung Baringin	0	Muhammad Alwi Lubis
511	Fisik	Barumun Selatan	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung Baringin	Pembangunan Jalan Hotmilk Desa Tanjung Baringin sepanjang 1 Km	1000	Muhammad Alwi Lubis
512	Fisik	Barumun Selatan	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung Baringin Simarulak	Penyelesaian Pembangunan Jalan Raya di Desa Tanjung Baringin Simarulak	1000	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
513	Fisik	Barumun Selatan	Rehab Mesjid	Desa Tanjung Baringin Simarulak	Rehab Mushollah / Surau Perempuan yang ada di Desa Tanjung Baringin Simarulak	1	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
514	Fisik	Barumun Selatan	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Tanjung Baringin Simarulak	Pemagaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Desa Tanjung Baringin Simarulak	50	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
515	Fisik	Barumun Selatan	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Desa Tanjung Baringin Simarulak	Penambahan Tiang Listrik di Jalan Raya dan di dalam Kampung Desa Tanjung Baringin Simarulak	10	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
516	Fisik	Barumun Selatan	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Tanjung Baringin Simarulak	Pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) Sekolah SDN 1007 di Desa Tanjung Baringin Simarulak	0	H. Fahmi Anwar Nasution, ST
517	Fisik	Barumun Selatan	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Pagaran Baringin	Rabat Beton di Pemandian belakang Posyandu Desa Pagaran Baringin	0	H. Fahmi Anwar Nasution, ST

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
518	Non Fisik	Barumun Selatan	Peningkatan Kesempatan Kerja	Desa Batang Bulu	Pengadaan peluang kerja bagi masyarakat desa batang bulu	1	Raja Parlindungan Nst, ST
519	Fisik	Barumun Selatan	Perencanaan Tata Ruang	Desa Batang Bulu	Pembangunan jalan al-Muhajirin menuju disbun menuju batang bulu sepanjang 1.5 km	1	Raja Parlindungan Nst, ST
520	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Pembukaan Jalan Sabarimba Desa Padang Jae Di Desa Padang Garugur Jae	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
521	Fisik	Aek Nabara Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Janji maria	peningkatan jalan hotmix desa janji maria	0	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
522	Fisik	Aek Nabara Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	tanjung rokan	peningkatan jalan hotmix desa tanjung rokan	0	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
523	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Janji Maria	Peningkatan jalan hotmix Desa Janji Maria	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
524	Fisik	Aek Nabara Barumun	Lingkungan Sehat Perumahan	Desa Janji Maria	Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Janji Maria	100	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
525	Non Fisik	Aek Nabara Barumun	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Desa Janji Maria	Pengadaan Alat Nasid dan Baju Nasid di Desa Janji Maria	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
526	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Janji Maria	Pembuatan Parit Di Jalan Desa Janji Maria Di Desa Janji Maria	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
527	Non Fisik	Aek Nabara Barumun	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Aek nabara Tonga	Pengadaan Keramik Mesjid di Desa Aek Nabara Tonga	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
528	Non Fisik	Aek Nabara Barumun	Pengembangan budaya perikanan	Aek nabara Tonga	Pengadaan ternak umum di desa aek nabara tonga	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
529	Non Fisik	Aek Nabara Barumun	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Aek nabara Tonga	Peningkatan / Pengadaan pelayanan Kesehatan / Obat-obatan di Puskesmas - RSUD di Desa Aek Nabara Tonga	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
530	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Aek nabara Tonga	Pengadaan Sumur Bor Umum Di Desa Aek Nabara Tonga	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
531	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Sidokan	Peningkatan jalan Desa Sidokan (HOTMIK) Di Desa Aek Nabara Tonga	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
532	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Rokan	Peningkatan Jalan menuju Desa Tanjung Rokan - bangkuang - Padang Garugur - Aek Nabara Julu - Payabahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
533	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Pembangunan Jembatan Sungai Barumun menuju Desa Padang Garugur jae menuju Desa Desa Tanjung Rokan - Bangkuang - Padang Garugur Tonga - Aek Nabara Julu dan Payabahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
534	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Aek Nabara Julu	Pembuatan Sumur Bor Umum Desa Aek nabara Julu	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
535	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Rokan	Peningkatan jalan desa menuju tanjung Rokan - Bangkuang - Padang Garugur - Aek Nabara Julu - Payanahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
536	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Pembangunan Jembatan di Sungai Barumun menuju Desa Padang Garugur jae menuju Desa Tanjung Rokan - bangkuang - Padang Garugur Tonga - Aek Nabara Julu Payabahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
537	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Rokan	Pembangunan irigasi sawah Tanjung Rokan dari aek Marenu	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
538	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Rokan	Peningkatan Jalan menuju Desa Tanjung Rokan - Bangkuang - Padang Garugur - Aek Nabara Julu - Payabahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
539	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Tanjung Rokan	Pembangunan Jembatan di Sungai Barumun, menuju desa tanjung Rokan - Bangkuang- Padang Garugur Tonga- Aek Nabara Julu- Payabahung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
540	Non Fisik	Aek Nabara Barumun	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	Desa Padang Garugur jae	Pengadaan alat-alat pertanian dan sarana pendidikan di Desa Padang Garugur jae	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
541	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Peningkatan Jalan keliling Desa Padang garugur jae menjadi Hotmik / Aspal Di Desa Padang garugur jae	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
542	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Perbaikan / Peningkatan Los Pasar Padang garugur jae Di Desa Padang Garugur jae	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
543	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	Pembuatan Sumur Bor Umum di Desa Padang Garugur jae	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
544	Fisik	Aek Nabara Barumun	Perencanaan Tata Ruang	Desa Padang Garugur jae	peningkatan jalan (hotmik) Desa Padang Garugur jae menuju Desa Tanjung Rokan - Bangkuang - Padang Garugur Tonga Aek Nabara Julu dan Payabuhung	1	Kholid Mulia Daulay,S.Ked
545	Fisik	Aek Nabara Barumun	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Sayur Matua-Desa Sidong-dong	Pembangunan Jalan Hotmik Desa Sayur Matua sampai Desa Sidong-dong.	3000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
546	Fisik	Aek Nabara Barumun	Pembangunan Jalan	Desa Aek Buaton	Pembangunan Jalan Hotmik Desa Aek Buaton menuju Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun.	2500	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
547	Fisik	Aek Nabara Barumun	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Sayur Matua-Ujung Gading	Peningkatan Jalan Hotmik Desa Sayur Matua sampai Desa Gading.	7000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
548	Fisik	Aek Nabara Barumun	Peningkatan Jalan & Jembatan	Sayur matua	Peningkatan jalan menuju desa Paran Napa jae menuju desa Paya Bahung Kecamatan Barumun Barat	0	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
549	Non Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan produksi hasil peternakan	mandian	bantuan peternakan agar di budiayakan di desa mandian kurang	5000	Agus Nasution

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					lebih 5000 ekor		
550	Fisik	Ulu Sosa	Rehab Mesjid	mandian	pembangunan pagar mesjid desa mandian 50 m	1	Agus Nasution
551	Fisik	Ulu Sosa	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Gunung Tua	Peningkatan Jalan Beton Di Desa Gunung Tua Kecamatan Sosa	0	Agus Nasution
552	Fisik	Ulu Sosa	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Harang Jae	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Bondar Payah Bulu Kurang Lebih 150 m Di Desa Harang Jae	150	Agus Nasution
553	Fisik	Ulu Sosa	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Harang Jae	Pembangunan Saluran Tempat Air Bersih di Desa Harang Jae kurang lebih 1 km	1000	Agus Nasution
554	Fisik	Ulu Sosa	Rehab Mesjid	Harang Jae	pembangunan Terras Mesjid Alhasanah di Desa Harang Jae kurang lebih 10 x 10 m	10	Agus Nasution
555	Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	Bonan Dolok	Peningkatan Jalan Penghubung Desa sepanjang 500 m	500	Agus Nasution
556	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan Jembatan	Desa Handio, Desa mandian dan Desa Bonan Dolok	pembanguna jembatan di sungai sosa panjang 100 m lebar 3m	100	Agus Nasution
557	Fisik	Ulu Sosa	Pengelolaan areal pemakaman	Harang Jae	Pembangunan Pagar Tempat Pemakamam Umum (TPU) kurang Lebih 200 m di Desa Harang Jae	200	Agus Nasution
558	Fisik	Ulu Sosa	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Harang Jae	Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Homa kurang lebih 200 m di Desa Harang Jae	200	Agus Nasution
559	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan turap/talud/bronjong	Harang Jae	Pembuatan Bronjong Bendungan akurang lebih 20 m di Persawahan Bondar Payah Buluh Desa Harang Jae	20	Agus Nasution
560	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan Jalan	Bonan Dolok	Pembukaan Jalan dari Parkolosan ke	2000	Agus Nasution

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					Lubuk Godang kurang Lebih 2 km		
561	Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	parapat	Peningkatan Jalan dari Gapura Kedesa Parapat kurang lebih 5 km	5000	Agus Nasution
562	Fisik	Ulu Sosa	Pengelolaan areal pemakaman	mandian	pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) kurang lebih 500 m	500	Agus Nasution
563	Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	manian	peningkatanjalan penghubung Desa kurang lebih 500 m	500	Agus Nasution
564	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan turap/talud/bronjong	parapat	Pembangunan/Pembuatan Bronjong untuk pengendalian Banjir ke Desa Parapat kurang lebih 1 km	1000	Agus Nasution
565	Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	desa pau	Peningkatan Jalan dari Desa horuon ke Desa Pau/Gunung Tua kurang lebih 1,5 km	1500	Agus Nasution
566	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Handio	Pembangunan Bronjong Sungai Sosa	200	Agus Nasution
567	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan Jalan	Desa Handio	pembangunan jalan hodmic di desa handio kurang lebih 600 m	600	Agus Nasution
568	Fisik	Ulu Sosa	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	desa pau	pembangunan saluran tempat air bersih/PAM di desa pau/gunung tua kurang lebih 1500 m	1500	Agus Nasution
569	Fisik	Ulu Sosa	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Handio	peningkatan jalan penghubung desa handio kurang lebih 500 m	500	Agus Nasution
570	Fisik	Ulu Sosa	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Desa Handio	pembuatan Lampu Penerang Jalan (LPJ) di desa handio lebih kurang 10 Buah	10	Agus Nasution
571	Fisik	Ulu Sosa	Pembangunan Ruang Kelas	parapat	peningkatan ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah Madrasah (MDA) sebanyak 2 ruangan di Desa Parapat	2	Agus Nasution
572	Fisik	Ulu Sosa	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	parapat	pembuatan Lampu Penerang Jalan (LPJ) di Desa Parapat Kurang lebih 5	5	Agus Nasution

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					buah		
573	Non Fisik	Ulu Sosa	peningkatan produksi pertanian/perkebuna	parapat	bantuan untuk persawahan dan pertanian di desa parapat 2 unit	2	Agus Nasution
574	Non Fisik	Sosa Timur	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Desa Pir Trans sosa IB	Pengadaan Sarpras MDTA Al-Ikhlas Desa Pir Trans Sosa I B 50 Meja dan Kursi	50	Sahrnun Hasibuan
575	Fisik	Sosa Timur	Pembangunan Jalan	pir trans sosa 1A	peningkatan jalan hotmix dari desa pir trans sosa 1 A ke desa sosa II	1000	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
576	Fisik	Sosa Timur	Peningkatan Jalan & Jembatan	Pirtrans Sosa 1 A	Peningkatan jalan hotmix dari desa pir trans sosa 1 A ke desa sosa II	0	Mhd. Dayan Hasibuan, SH
577	Non Fisik	Sosa Timur	Pendidikan Anak Usia Dini	Rombayan	Pembangunan Pagar dan Papin Blok TK Paud Murni Desa Rombayan	0	Sahrnun Hasibuan
578	Fisik	Sosa Timur	Pembangunan Ruang Kelas	Desa Pir Trasn Sosa I B	Pembnaguna RKB dan Sarpras PAUD Desa Pir Trans I B Volume Paket 2 Lokal	2	Sahrnun Hasibuan
579	Fisik	Barumun Barat	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Desa Gading	Pengadaan Meteran Puskesmas 3000 Volt Desa Gading	3000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
580	Non Fisik	Barumun Barat	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Paran Napa Jae	Pengadaan Alsintan 1 Unit untuk Kelompok Tani di Desa Paran Napa Jae	1	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
581	Fisik	Barumun Barat	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Desa Sisalean	Pembuatan Bendungan Air di Danau Bayour Desa Sisalean	50	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
582	Non Fisik	Barumun Barat	memberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Desa Paran Napa Jae	Pembentukan Kelompok Tani Ternak (Kambing/Lembu).	100	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
583	Fisik	Barumun Barat	Peningkatan Jalan & Jembatan	Desa Sisalean-Desa Sibontar	Peningkatan Jalan Hotmik 2000 M di Desa Sisalean menuju Desa Sibontar.	2000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
584	Fisik	Barumun Barat	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Paran Napa Jae	Pembangunan Paret/Drainase Desa Paran Napa Jae	2000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
585	Fisik	Barumun Barat	Pembangunan turap/talud/bronjong	Desa Batu Sundung	Pembangunan Bronjong di Persawahan di Desa Batu Sundung.	50	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
586	Fisik	Barumun Barat	Lingkungan Sehat Perumahan	Sidongdong	Pembangunan MCK di Desa Sidongdong	0	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
587	Fisik	Barumun Barat	Pembangunan Jalan	Desa Lorang Balanga	Lanjutan Hotmik Desa Lorang Balanga ke Desa Sisalean 1000 M.	1000	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
588	Fisik	Barumun Barat	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Sisalean	Saluran Irigasi Saba Tanggul	200	Amran Pikal Siregar, S.Sos.
589	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	desa hurung jilok	pembangunan MCK desa hurung jilok	16	Hasan Basri Hasibuan
590	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Ruang Kelas	Sungai Jior	Pembangunan RKB MDA Desa Sungai Jior	2	Mhd. Hamidi Pasaribu
591	Fisik	Sosa Julu	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	desa hurung jilok	pembuatan tiang listrik belakang hurung jilok jalan pnpn mandiri desa hurung jilok	50	Hasan Basri Hasibuan
592	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	desa siborna bunut	pembangunan MCK desa siborna/pioner	16	Hasan Basri Hasibuan
593	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	desa siborna bunut	pembangunan tempat penampung air bersih/minum(Tower) desa siborna bunut	4	Hasan Basri Hasibuan
594	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jalan	desa siborna bunut	pembangunan jalan hotmik simpang kemiri menuju simpang parhombunan desa siborna bunut	3000	Hasan Basri Hasibuan
595	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jalan	desa siborna bunut	pengerasan jalan/rabat beton (lanjutan) desa siborna bunut	1000	Hasan Basri Hasibuan
596	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jembatan	desa siborna bunut	pembangunan jembatan inpres menuju pemakaman desa siborna bunut	1	Hasan Basri Hasibuan
597	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa siborna bunut	pembangunan bronjong di desa	200	Hasan Basri Hasibuan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
					siborna bunut		
598	Fisik	Sosa Julu	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	desa siborna bunut	rehab perumahan sekolah SD impres desa siborna bunut	60	Hasan Basri Hasibuan
599	Fisik	Sosa Julu	Rehab Mesjid	desa hurung jilok	pembangunan rehab masjid di desa hurung jilok	1	Hasan Basri Hasibuan
600	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jembatan	desa hurung jilok	pembangunan rambin aek sosa	1	Hasan Basri Hasibuan
601	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa hurung jilok	pembangunan dek/bronjong 300 m aek sosa	300	Hasan Basri Hasibuan
602	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Kios Baru Pasar	desa hurung jilok	pembangunan los kios pasar desa hurung jilok	900	Hasan Basri Hasibuan
603	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Desa Ampolu	Rehab mesjid desa Ampolu dan Mananti	0	Hasan Basri Hasibuan
604	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jembatan	desa tanjung	pembangunan rambin aek tinga di desa tanjung (tanjung/sungai aek tinga)	1	Hasan Basri Hasibuan
605	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	desa siginduang	pembangunan MCK desa siginduang	16	Hasan Basri Hasibuan
606	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jembatan	desa siginduang	pembangunan rambin menuju saba lobu	1	Hasan Basri Hasibuan
607	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa siginduang	pembangunan bronjong 100 m desa siginduang	100	Hasan Basri Hasibuan
608	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jalan	desa ampolu	pembangunan jalan menuju desa siborna /gonting kumbang	1000	Hasan Basri Hasibuan
609	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa mananti sosa julu	pembangunan bronjong aek sosa desa mananti sosa julu	150	Hasan Basri Hasibuan
610	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan dan Pengelolaan	desa mananti sosa	pembangunan mck desa manati sosa	16	Hasan Basri Hasibuan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
			Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	julu	julu		
611	Fisik	Sosa Julu	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	desa hurung jilok	peningkatan pustu menjadi puskesmas sosa julu	1	Hasan Basri Hasibuan
612	Fisik	Sosa Julu	Rehab Mesjid	desa ampolu	rehab teras masjid desa ampolu	1	Hasan Basri Hasibuan
613	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa ampolu	pembangunan bronjong danau pao 150m sebelah kanan aek sosa	150	Hasan Basri Hasibuan
614	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa ampolu	pembangunan bronjong danau pao 150m sebelah kiri aek sosa	150	Hasan Basri Hasibuan
615	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	desa ampolu	pembangunan mck desa ampolu	16	Hasan Basri Hasibuan
616	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan Jalan	desa ampolu	pembangunan jalan usaha tani aek tinga di desa ampolu	1000	Hasan Basri Hasibuan
617	Fisik	Sosa Julu	Pembangunan turap/talud/bronjong	desa tanjung	pembangunan bronjong aek sosa desa tanjung	200	Hasan Basri Hasibuan
618	Fisik	Sosa Julu	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	desa tanjung	pembangunan rumah tak layak huni desa tanjung	30	Hasan Basri Hasibuan
619	Fisik	Sosa Julu	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	desa siborna bunut	pembangunan sarana air bersih desa siborna bunut (sumber air permukaan)	3000	Hasan Basri Hasibuan
620	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa hasahatan jae	Pembangunan irigasi yang berada di belakang MDTA di desa Hasahatan Jae dan SD Hasahatan Jae	300	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
621	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa hasahatan jae	Peningkatan jalan lingkar berupa Hotmik di desa hasahatan jae di lorong 1 dan 2 sepanjang 800 meter	800	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
622	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Binabo Jae	Lanjutan Pembangunan jalan dari Desa Binabo Jae menuju Desa Sialambue	1500	H.Irzan Bangun Harahap,ST
623	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Binabo Jae	Lanjutan Pembangunan jalan dari desa Biabo Jae menuju desa Limbong	1000	H.Irzan Bangun Harahap,ST
624	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Sabarimba	Lanjutan pembangunan jalan penghubung desa Sabarimba menuju desa Limbong	1000	H.Irzan Bangun Harahap,ST
625	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa hasahatan jae	Pembangunan bendungan dan tali air dan pembuatan dek di Saba lobu	500	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
626	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa hasahatan jae	Pembangunan jalan dari ujung jalan Saba jae tembus ke desa handis Julu dan desa purbatua	800	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
627	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa hasahatan jae	Pembangunan jalan penghubung dari Saba jae ke Saba Padang sepanjang 500 meter	500	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
628	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Limbong	Pembangunan jalan pertanian di desa Limbong sepanjang 500 meter	200	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
629	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Desa hasahatan jae	Pipalisasi air minum ke desa hasahatan jae sepanjang 400 meter	400	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
630	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa hasahatan jae	Normalisasi aliran sungai barumun di sekitar Saba Banjar galoga sepanjang 300 meter	300	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
631	Fisik	Barumun Baru	Pengelolaan areal pemakaman	Desa Sitarolo	Pembangunan Pagar Makam Desa Sitarolo	0	Muhammad Alwi Lubis
632	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Sabarimba	Pembukaan Jalan Desa Sabarimba Sepanjang 500 Meter	500	Muhammad Alwi Lubis
633	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jembatan	Desa Binabo Jae	Pembangunan Jembatan di Desa Binabo Jae Menuju Handis dengan lebar 3x8 Meter	1	Muhammad Alwi Lubis
634	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan	Desa Sitarolo	Pembangunan Lanjutan Irigasi Desa	500	Muhammad Alwi Lubis

RKPD TAHUN 2021



NO	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Baru	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya		Sitarolo Sepanjang 500 Meter		
635	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Sigorbus	Pengaspalan jalan	300	Drs.H.jamaluddin Hsb,M.Ap
636	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan turap/talud/bronjong	Sungai Barumun	Pembuatan Bronjong	500	Drs.H.jamaluddin Hsb,M.Ap
637	Fisik	Barumun Baru	pembangunan jalan dan jembatan	Desa Binabo Jae	Pembangunan Rambin	1	Drs.H.jamaluddin Hsb,M.Ap
638	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Hasahatan jae	Pembangunan Dek sepanjang 600 meter di sekitar Mesjid Nurul Falah desa hasahatan jae	600	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
639	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	desa Mompang	pengerasan sekaligus Hotmik jalan dari desa Mompang menuju desa hasahatan Julu sekitar 1 km	1000	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
640	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	desa Mompang	pembangunan SAB di desa Mompang	200	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
641	Fisik	Barumun Baru	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Desa sabarimba	Penambahan tiang listrik di wilayah sabarimba baru dan desa sabarimba sebanyak 5 buah	5	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
642	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	desa hasahatan jae	pembangunan dek di sekitar Bondar padang sepanjang 500 meter	500	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
643	Fisik	Barumun Baru	Perencanaan Tata Ruang	sabarimba	pembangunan jembatan aek barumun menuju Desa Sabarimba menuju Desa Limbong kec. Barumun Baru	152	H.Irsan Bangun Harahap,ST
644	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Sabarimba	Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Desa Sabarimba menuju Desa Limbing Kec. Barumun Baru Desa Siolip	8000	H.Irsan Bangun Harahap,ST
645	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Siolip	Perkuatan Tebing Sungai Barumun di Hulu Sungai Aek Solok Desa Siolip	300	H.Irsan Bangun Harahap,ST
646	Fisik	Barumun	Pembangunan saluran	Desa Siolip	Perkuatan Tebing Sungai Barumun di	300	H.Irsan Bangun

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Baru	drainase/gorong-gorong		Hulu Sungai Aek Solok Desa Siolip		Harahap,ST
647	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa Siolip	Pembanguna Pintu Air dan Normalisasi Aek Solok dan Aek Siala	6000	H.Irsan Bangun Harahap,ST
648	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Binabo Jae	Lanjutan Pembangunan jalan dari Desa Binabo Jae Desa Sialambue Kec. Barumun Baru	2200	H.Irsan Bangun Harahap,ST
649	Fisik	Barumun Baru	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	Desa Siolip	Program Sertifikasi lahan Masyarakat di Seberang Sungai Barumun Desa Siolip	30000	H.Irsan Bangun Harahap,ST
650	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Sabarimba	Perkuatan tebing penahan longsor sungai Barumun	1000	H.Irsan Bangun Harahap,ST
651	Fisik	Barumun Baru	Perencanaan Tata Ruang	Desa Sabarimba	Pengadaan lampu jalan Desa Sabarimba	1000	H.Irsan Bangun Harahap,ST
652	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Binabo Jae	Lanjutan pembangunan jalan dari desa Binabo Jae menuju desa Sialambue	2200	H.Irsan Bangun Harahap,ST
653	Fisik	Barumun Baru	Perencanaan Tata Ruang	Desa sabarimba	Pengadaan lampu jalan sepanjang desa sabarimba menuju desa Limbong sebanyak 7 unit	7	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
654	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jembatan	Desa sabarimba	Pembangunan jembatan di atas sungai barumun sepanjang 120 meter	1	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
655	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Desa hasahatan jae	Perbaikan irigasi Saba Padang sepanjang 200 meter	2	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
656	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa sigorbus	Penahan dek penahan di sekitar aliran sungai barumun dari desa sigorbus sampai desa binabo jae	300	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
657	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa Tanjung baringin	Pembukaan jalan lingkar dari desa Tanjung Baringin sampai kesimpang Siborong-borong sepanjang 500 meter	500	Sufriady Halomoan Hsb,S.Pd,SH
658	Fisik	Barumun	Pengembangan dan Pengelolaan	Desa siolip	Pemungisian kantor pengairan di desa	1	Sufriady Halomoan

RKPD TAHUN 2021



No	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA USULAN	NAMA DESA	KETERANGAN	VOL.	PENGUSUL
		Baru	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya		siolip		Hsb,S.,Pd,SH
659	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	desa siolip	percepatan pemasukan air PAM ke desa siolip	1000	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
660	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa hasahatan jae	Pembukaan jalan penghubung dari desa hasahatan jae ke desa hasahatan Julu sepanjang 1 Km	1000	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
661	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa hasahatan jae	Pembangunan irigasi bondar Saba Tonga dan Saba jae desa hasahatan jae sepanjang 300 meter	300	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
662	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Jalan	Desa siolip	Pembangunan jalan Saba Dolok, tor parginciran sampai ke Saba Dolok sibaluang sepanjang 1 km	1000	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
663	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa hasahatan jae	Pengerokan Aek siapa dari hulu sampai ke hilir sepanjang 300 meter	300	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
664	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa sabarimba	Perbaikan gorong-gorong yang berada di depan Rumah Dahlan di desa sabarimba sepanjang 100 meter	100	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
665	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan Ruang Kelas	Hasahatan jae	Pembangunan RKB MDA desa hasahatan jae	0	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
666	Fisik	Barumun Baru	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Desa sabarimba	Perbaikan jaringan irigasi menuju Mesjid desa Sabarimba yaitu dengan pembangunan Drainase sehingga air di mesjid tersebut bisa terpenuhi sepanjang 250 meter	250	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH
667	Fisik	Barumun Baru	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Desa Hasahatan jae	Pembangunan Dek penahan tebing mulai dari Saba Julu sampai melewati desa Sabarimba sepanjang aliran sungai barumun sepanjang 700 meter	700	Sufriady Halomoan Hsb,S.,Pd,SH

2.6. Hasil Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas

2.6.1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Guna mengetahui pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD 2019 dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas, dan mencapai sasaran pembangunan RPJMD tahun 2019.

Capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2019 disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.89.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Padang Lawas

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/2019	Interpretasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Inflasi	7.38	1.66	4.28	3.82	2,15	2.12	>
2	PDRB Per Kapita							
2.1	PDRB Per Kapita (Rp) adhb	33.388.751	35.971.148	38.458,40	40.435,31	33.388.751	35.931.148	<
2.2	PDRB Per Kapita (Rp) adhk 2010	25.498.070	26.353.881	27.346,23	28.300,86	25.498.070	26.353.881	<
3	Indeks Gini (Poin)	0.2969	0.3256	0.2482	0.2985	0.2990	0.2985	>
4	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia							
4.1	40 Persen terendah	22.49	20.19	25.42	22.55			
4.2	40 Persen menengah	37.97	37.14	38.17	37.49			
4.3	20 Persen tertinggi	39.54	41.95	36.41	39.95		-	
5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91.27	90.91	90.90	91.59	92.04	90.12	>
6	Rasio Kesenjangan Kemiskinan (%)	0.91	1.36	1.17	1.07	1,05	1.05	=
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65.99	66.23	66.82	67.59	68,16	-	
8	Angka Melek Huruf (%)	98	99	99	99	99	99	=
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.14	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	=
10	Angka Usia Harapan Sekolah (Tahun)	12.83	12.80	12.99	12.50	12,55	-	
11	Persentase Balita Gizi Buruk(%)	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02	0.04	<
12	Prevalensi Balita Gizi Kurang (Bayi)	2	0	0	0	0	0	
13	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	77.6	75.6	70.7	80.2	90	90	=
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71.87	-	70.21	71.78	76.10	71.78	>
15	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5.95	-	4.24	4.10	4,24	4.10	>
16	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	94.05	-	95.76	95.90	95	95.90	<
17	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas (%)	114.75	-	118.198	-	-	-	
18	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I (keluarga)	37.460	42.336	48.058	50.086		50.086	
19	Persentase PAD Terhadap Pendapatan (%)	4.84	3.94	4.54	5.73	6,04	5.73	>
20	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	=
21	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH) (%)	-	-	59.3	72.9		72.9	
22	Penguatan Cadangan Pangan	-	2	1	1	1	1	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
23	Penanganan Daerah Rawan Pangan (desa)	5	5	4	4		30	
24	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	33.88	33.73	34.05	34.05	46,17	34.05	>
25	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	3.60	3.60	3.49	3.49	3,46	3.49	>
26	Produksi Sektor Pertanian							
26.1	Produksi Sektor Pertanian (adhb) (Juta Rupiah)	4.229,90	4.622,15	4.622,15	4.622,15	5.249,57	-	
26.2	Produksi Sektor Pertanian (adhk 2010) (juta rupiah)	3.534,90	3.719,94	3.719,94	3.719,94	4.122,57	-	
27	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	41.06	41.66	42.26	42.26		42.26	
28	Produksi Sektor Perkebunan							
28.1	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) (adhb) (Juta Rupiah)	2.660.199,3 4	2.970.383, 85	3.300.402,9 6	3.300.402,9 6		-	
28.2	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) (adhk 2010) (Juta Rupiah)	2.465.826,0 6	2.608.537, 60	2.755.289,0 1	2.755.289,0 1		-	
29	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	1.52	1.50	1.54	1.54		1.54	
30	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	6.70	6.20	5.73	5.73		-	
31	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0.52	0.53	0.52	0.52		-	
32	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	0.30	0.29	0.29	0.29		-	
33	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7.31	7,30	7.14	7.14		-	
34	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	15.72	16.4	16.85	16.85		-	
35	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	40.304,61	41.304,61	42.304,61	43.304,61		43.304,61	
36	Pertumbuhan Industri	4.77	9.03	4.59	4.59		-	
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (*d disesuaikan ribu rupiah)	631.871	809.363	679.182	947.257	3.871.900.0 00	947.257	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam paui (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
2	Nilai Tukar Petani	100,6	101,5	99,39	102,7	99,39	-	
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	39,41	43,48	31,16	43,19		43,19	
4	Rasio Ketergantungan	70.44	70.05	69.67	69.33	0.508	68.99	<
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	125	135	134	133	242	133	>
1.2	Angka Partisipasi Kasar (%)	84.40	93.04	75.02	98.46	25,84	98.32	<
1.3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (siswa)	3.974	3.895	4.015	3.939	7,290	3.989	>
1.4	Angka Melek Huruf	98,99	98,68	99,44	99,36	98	99.00	<
1.5	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,14	8,15	8.45	8.5	8	8.7	<
1.6	Angka Usia Harapan Sekolah	12.83	12.80	12.99	12.50	13,02	12.30	>
2	Angka Partisipasi Murni							
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	103	101	103	94,2	90	94,2	<
2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	161	125	120	84,2	93	84,2	<
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	97,62	97,42	98,78	94,53	112,43	98.78	>
3	Angka Partisipasi Sekolah							
3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	89,8	93,00	93,3	92,5	92	92,5	>
3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	92,6	90,1	90,37	92,4	92	92,4	<
3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	95,62	97,42	98,78	94,53	95.9	95.9	=
4	Angka Putus Sekolah							
4.1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.3	0.2	0.2	0.1	0,10	0.1	>
4.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	1.12	1.08	1.5	1,1	0,58	1,1	<
4.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	3.23	3.19	3.08	2.34	-	2.34	
5	Angka Kelulusan							
5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99.80	98.77	97.24	99.99	97	98.80	<
5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99.95	97.67	85.31	99.80	89,23	98.50	<
5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	95.20	95.50	94.35	92,5	-	92,5	
6	Angka Melanjutkan (AM)							
6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	89.50	90.20	92.40	97.82	98,7	97.82	>
6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	87.35	88.15	90.50	92.50	-	92.50	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam paui (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
7	Fasilitas Pendidikan							
7.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	771	803	838	912	912	932	<
7.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	173	196	228	260	548	260	>
7.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	50	50	51	55	54	55	<
7.4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	163	127	133	112	484	112	>
7.5	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	366	380	403	493	3600	493	>
7.6	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	690	771	836	1049	484	932	<
7.7	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	50	50	51	55	54	55	<
7.8	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	366	380	403	493	3600	493	>
7.9	Proposi Murid Kelas 1 Yang Berhasi Menamatkan Sekolah Dasar	99.00	99.00	99.00	99.00	99	99.00	=
7.10	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	46,945	47,263	48,217	48,440	98	48,440	>
7.11	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	6.298	12.129	10.211	9420	21.354	9420	>
7.12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	2.914	2.925	2.928	2941	3.100	2941	>
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup (%)	11.45	10.64	6.84	10.61	8,3	10.61	<
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi(%)	67.39	70.8	71.01	67.47	66,98	67.47	<
2.3	Jumlah Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup (%)	18.98	36.90	5.20	1.28	9,3	25	<
2.4	Jumlah Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup (%)	6.30	13.40	4.46	12	6,2	12	<
2.5	Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (%)	60	63	65	70	6	70	<
2.6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%)	10.13	11.28	12.30	13.50	33,9	13.50	>
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk	0.002	0.02	0.02	0.002	0,002	0.04	<
2.8	Prevalensi Balita Gizi Kurang	2	0	0	0.3	0	0	=
2.9	Cakupan Desa Siaga Aktif	77.6	75.6	70.7	80.2	31	90	<
2.10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0.05	0.05	0.05	0.24	0,05	0.24	<
2.11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.02	0,2	0.02	=
2.12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0.1	0.13	0.1	0.35	2,6	0.35	>
2.13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0.53	0.86	0.18	0.01	0,2	0.01	>



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
2.14	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	11.3	18	18	15.7	51,9	15.7	>
2.15	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	52.5	57.2	65	89.2	42,6	89.2	<
2.16	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	21	36	27	51.3	29,9	51.3	<
2.17	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	83	100	>
2.18	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)	100	100	100	100	100	100	=
2.19	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	79.25	87.86	90.2	90.2	90,22	90.2	=
2.20	Non Polio AFF Rate Per 100.000 Penduduk	100	100	100	100	100	100	=
2.21	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	0.34	0.3	0.32	100	100	100	=
2.22	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	16.06	13.02	0.15	70	36,0	70	<
2.23	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	196	168	569	326	2,8	326	<
2.24	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	7.36	7.2	5.18	2.46	2,8	14	<
2.25	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	4.30	4.98	4.98	0.02	0,02	0.02	=
2.26	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	86.93	87.29	88.70	95	2,8	95	<
2.27	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	=
2.28	Penderita Diare Yang Ditangani	80.47	121.50	81.49	100	100	100	=
2.29	Angka Kejadian Malaria	20.5	5.3	5.93	-	-	-	
2.30	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	-	-	-	
2.31	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektidisa	100	100	100	100	100	100	=
2.32	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	100	100	100	100	100	100	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
2.33	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	0.02	0.02	0.008	100	100	100	=
2.34	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	100	100	100	100	100	100	=
2.35	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprensif Tentang HIV/AIDS	100	100	100	100	100	100	=
2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	5.95	7.06	7.08	7.08	7,08	7.08	=
2.37	Cakupan Kunjungan Bayi	110.24	97.17	69.29	75.10	89,5	75.10	>
2.38	Cakupan Puskesmas	116.67	116.67	116.67	116.67	116,67	116.67	=
2.39	Cakupan Pembantu Puskesmas	12.21	12.17	12.17	13.07	13,07	13.07	<
2.40	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95.03	76.36	75.63	100	45,0	100	<
2.41	Cakupan Pelayanan Nifas	97.99	43.22	77.35	100	58,2	100	<
2.42	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	7.89	3.75	2.09	100	14,9	100	<
2.43	Cakupan Pelayanan Anak Balita	54.91	53.18	56.46	100	60,2	100	<
2.44	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100	100	100	100	100	100	=
2.45	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	60.15	75.20	85.46	100	100	100	=
2.46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	=
2.47	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	=
2.48	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	=
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum							
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	102.55	137.04	159.17	201.52	207,929	-	
3.1.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	4.27	4.18	4.09	4	5,4	-	
3.1.3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	18.95	19.13	22.1	24.05	18,84	-	
3.1.4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	0.52	0.56	0.61	0.7	0,8	-	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam paui (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
3.1.5	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	0.13	0.14	0.15	0.17	0,14	-	
3.1.6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	80	85	87	89	90	-	
3.1.7	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	8,469	14,101	19,565	23,782	33,46	-	
3.1.8	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	53.5	57.01	59.78	63.29	65	-	
3.1.9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	29	31	34	39	45	-	
3.1.10	Rasio Jaringan Irigasi	8.81	14.04	19.27	22.50	26,50	-	
3.1.11	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	21	35	48	65	78	-	
3.1.12	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	79	65	52	35	60	-	
3.1.13	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	98	96	94	92		-	
3.1.14	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	0.07	0.10	0.12	0.15		-	
3.2	Penataan Ruang							
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	22.37	25.58	28.79	32	32,1	-	
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	58.86	58.86	60.90	60.90		60.90	
4.2	Rasio Pemukiman Layak Huni	99.94	99.94	99.94	100.76		100.76	
4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	12,489	12,489	12,489	12,330		12,430	
4.4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	-	-	-	150		150	
4.5	Persentase Pemukiman Yang Tertata	99.94	99.94	99.94	99.94		100.76	
4.6	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0.06	0.06	0.06	0.06		0.05	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	30	40	50	606	606	606	=
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	100	100	100	100	100	=
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	=
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	> 15	> 15	> 15	> 15	50	> 15	>
5.5	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	=
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	2.93	1.58	2.89	1.89	1,97	1.89	>
6.2	PMKS Yang Tertangani (%)	2.93	1.58	2.89	10.00	2,13	10.00	<
6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	2.73	0.00	1.90	1.75	1,97	1.75	>
6.4	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya (%)	0.11	1.36	0.92	2.00	0	2.00	>
6.5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	-	-	-	100	100	100	=
6.6	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	-	-	-	100	0	100	<
6.7	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	1.97	1.91	2.18	1.84	1,16	1.84	<
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	3	2	4	2	9	2	>
1.2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	2	3	4	2	4	2	>



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
1.3	Besaaan Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	120	135	154	204	188	204	<
1.4	Keselamatan Dan Perlindungan (%)	95	97	98	98	112	-	
1.5	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	5.9	6.100	6187	6,422	4.162	6,422	>
1.6	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	-	-	64	48	64	48	>
1.7	Rasio Lulusan S1/S2/S3	28	24	36	47	16,03	47	<
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	4.29	4.12	4.20	6	6	6	=
2.2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	0.03	0.03	0.03	0.03	3,33	0.03	>
2.3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	95.33	95.63	95.50	96.50	96,60	96.50	>
2.4	Rasio KDRT	0.002	0.003	0.003	0.002	0,002	0.002	=
2.5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.74	0.74	0.72	0.50	0,50	0.50	=
2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42	43	46	48.70	48,70	49.50	<
2.7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	-	-	100	100	100	100	=
2.8	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit (%)	-	-	47.61	48	48	48	=
2.9	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	-	-	95	95	95	95	=
2.10	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (%)	-	-	95	95	95	95	=
2.11	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	-	-	90	91	91	91	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
2.12	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	-	-	85.71	86	86	86	=
2.13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	-	-	90	91	91	91	=
2.14	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SD (%)	2.92	2.93	2.73	2.50	92,89	2.50	>
2.15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMP (%)	1.41	1.51	1.68	1.50	116,42	1.50	>
2.16	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMA (%)	1.09	1.19	1.34	1	1	1	=
2.17	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di Perguruan Tinggi (%)	1.24	2.01	1.74	2	2	2	=
2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun (%)	0.88	1	1	1.50	0,8	1.50	<
2.19	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian (%)	3.11	3.43	4.82	5	5	5	=
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (kg)	186,900.00	200,090.00	205,060.00	230,115.00	224.646,75	230,115.00	<
3.2	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hr;) Dan Protein (gram/kab/hr) Perkapita	energi = 1742 protein=40, 36	energi = 1840 protein=43, 25	energi = 1774 protein=40, 37	energi = 2000 protein=51, 06	energi = 1900; Dan 55	energi = 2000 protein=51, 06	<
3.3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	57.8	58.4	59.3	86.4	80.1	86.4	<
3.4	Penguatan Cadangan Pangan	-	2	1	5	-	5	
3.5	Penanganan Daerah Rawan Pangan (desa)	5	5	4	30	3	30	<
4	Pertanahan							
4.1	Penyelesaian Izin Lokasi	4	3	4	4		4	
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	-	12	10	80	Tidak ada	-	
5.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	-	4	4	60	Tidak ada	-	
5.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	-	3	-	30	Tidak ada	-	
5.4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	-	
5.5	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	-	
5.6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (%)	-	12	10	80	Tidak ada	-	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
5.7	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (%)	-	4.00	4.00	60	Tidak ada	-	
5.8	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	-	3	-	30	Tidak ada	-	
5.9	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketataan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	-	
5.10	Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.11	Terfasilitas Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.12	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.13	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.14	Penetapan Hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.15	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.16	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.17	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.18	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-	
5.19	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	-	
5.20	Timbulan Sampah Yang Ditangani (%)	0,28	0,31	0,36	0,45	0,52	0,55	<
5.21	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	20	25	30	50	52	55	<
5.22	Persentase Penanganan Sampah (%)	0,28	0,31	0,36	0,45	0,52	0,55	<
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	74.9	77.44	76.67	54.69	88,28	54.69	>
6.2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	70.14	66.66	64.02	77.44	79,44	77.44	>
6.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	14.26	16.39	16.79	19.96	26,03	19.96	<
6.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada Tersedia						
6.5	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah						
6.6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	114.059	121.663	142.33	149.447	150,72	149.447	>
6.7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	71.425	83.315	85.874	104.064	41,63	104.064	<
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik	6.57	7.23	7.89	9.21	0,67	9.21	
7.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	13	13.25	14	16	10	16	
7.3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	16	17	18	32	10	32	
7.4	Persentase LSM Aktif	0	0	0	5		5	
7.5	Persentase LPM Berprestasi	3	5	7	10	0,6	10	
7.6	Persentase PKK Aktif	43,5	50,3	75,7	81,0	0,69	81,0	
7.7	Persentase Posyandu Aktif	30,2	50,2	70,5	79,5	0,69	100	
7.8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	20,0	20,0	20,0	22,2		22,2	
7.9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	1,4	5,0	5,0	5,0		5,0	
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	2.22	2.24	2.24	2.20	2,11	2.20	<
8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2.36	2.33	2.31	2.26	3,92	2.26	>
8.3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Dengan 5 Aspek (%)	-	40	40	50	50	50	=
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	-	40	40	50	50	50	=
8.5	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	6.5	5.2	4.3	3	3	3	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
8.6	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	56.38	54.02	68.16	78	78	78	=
8.7	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	2.22	2.24	2.24	2.20	10	12	<
8.8	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	2.36	2.33	2.31	2.26	2,29	10	<
8.9	Cakupan PUS Yang Ingin ber- KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	-	40	40	50	13	18	<
8.10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	-	40	40	50	60	30	>
8.11	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	6.5	5.2	4.3	3	38	41.08	<
8.12	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	56.38	54.02	68.16	78	80	92	<
8.13	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB (%)	2.22	2.24	2.24	2.20	50	90	<
8.14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	2.36	2.33	2.31	2.26	90	92	<
8.15	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	-	40	40	50	50	65	<
8.16	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	-	40	40	50	90	35.5	>
8.17	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri (%)	6.5	5.2	4.3	3	47	50	>
8.18	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	=
8.19	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	-	-	6.21	15.76	100	78.8	>
8.20	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	-	-	5.50	10.25	100	15	>
8.21	Persentase Faskes Dan Jejaringsnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	75	85	90	100	100	100	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau i (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
8.22	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa (%)	-	-	-	100		100	
8.23	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0.03	0.01	0.01	0	0	0	=
8.24	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	58	61	62	70	73	75	<
8.25	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	48	51	53	69	70	76.8	<
8.26	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	22.8	22.7	25.8	30	25,9	30	<
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	14,103.00	14,153.00	14,203.00	14,253.00		14,303.00	
9.2	Rasio Ijin Trayek	0.0052	0.0068	0.076	0.00114		0.00114	
9.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3.05	3.25	3.45	3.65		3.85	
9.4	Persentase Layanan Angkutan darat	25520	25927	26335	26,750.41		27172	
9.5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	23.56	23.56	24.34	25.14		25.97	
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	200	100	100	50		50	
9.7	Rasional Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	3.25	3.45	3.65	4.05		4.05	
9.8	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	15,862,500	15,975,000	16,486,200	17,558,198		17,558,198	
10	Komunikasi Dan Informatika							
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan (%)	-	4	8	12	12	12	=
10.2	Cakupan layanan Telekomunikasi (%)	2	17	39	53	65	53	>
10.3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	16	19	21	28	35	28	>
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet (%)	6	8	10	12	20	12	>
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi (%)	4	6	8	10	13	12	>
10.6	Jumlah KIM	-	6	12	36	36	36	=
10.7	jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Padang Lawas	-	-	303	303	303	303	=
10.8	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik milik pemda	1	1	1	5	5	5	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam paui (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
10.9	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik sewa	-	-	11	10	19	10	>
10.10	jumlah kantor OPD d Kabupaten Padang Lawas yang terkoneksi jaringan radiolink	-	10	13	19	17	19	<
10.11	jumlah SMP di ibu kota kecamatan terkoneksi jaringan	-	-	0	0	-	0	=
10.12	jumlah Puskesmas di ibukota kecamatan terkoneksi jaringan			0	0	-	0	=
10.13	kapasitas bandwidth internet berlangganan (mbps)	10	30	80	150	150	150	=
10.14	jumlah data center	1	1	1	1	1	1	=
10.15	jumlah comand center	-	-	0	0	-	0	
10.16	jumlah kantro OPD, Puskesmas di ibukota kecamatan dan SLTP ibu kota kecamatan	-	-	64	64	64	64	=
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
11.1	Persentase Koperasi Aktif	0.03	0.05	0.58	0.09	50,57	-	
11.2	Persentase BPR/LKM Aktif	1	1	1	1	1	-	
11.3	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	70.08	80.01	81.23	81.25	82	-	
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Perusahaan)	13	6	3	3		3	
12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	24.495.758. 340	4.186.949. 437.662.00	4.710.477.3 21.575.00	306.232.85 5.671.60 (PMDN) US 1.276.822.5 5 (PMA)		306.232.85 5.671.60 (PMDN) US 1.276.822. 55(PMA)	
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0.58	0.64	1.16	1.85		1.85	
12.4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4,162,453,6 79,358	523,527,88 3,913	4,325,653,9 80,000	1,254,904,9 43,876		1,254,904, 943,876	
13	Kepemudaan Dan Olahraga							
13.1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	112	115	83	100	100	100	=
13.2	Cakupan Pembinaan Olahraga	2	2	2	4	2	4	<
13.3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	4	4	17	5	2	5	>
13.4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	1	2	2	5	2	5	>
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	8	2	5	5	5	5	=
13.6	Jumlah Prestasi Olahraga	8	1	2	3	-	3	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
14	Statistik							
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	=
14.2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	0	0	0	0	0	0	=
15.2	jumlah opd yang memiliki kegiatan (Aplkas) yang disandikan (%)	0	0	0	0	0	0	=
15.3	jumlah OPD di kabupaten padang lawas	-	40	41	41	41	41	=
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	1	1	1	2	2	2	=
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6	6	10	10	10	10	=
16.3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	3	3	3	3	5	3	>
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (orang)	1.267	8.782	47.904	69.461	193.485	69.461	>
17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (%)	49	20	30	23	60	60	=
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (%)	0.54	0.54	1.75	1.90	1,98	1.98	=
17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (orang)	106	732	3992	5789	16.124	5789	>
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (exemplar)	1.073	639	1.554	1.413	9.277	9.277	=
17.6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat (orang)	0	0	0	0	0	0	=
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	10	12	12	13	13	13	=
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	1	0	0	1	1	1	=



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan Wisata	750	750	750	750	750	750	=
1.2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	
1.3	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1	1	1	=
1.4	PAD Sektor Pariwisata	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,100,000	2,000,000	>
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	33.88	33.73	34.05	34.05	46,17	34.05	>
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	3.60	3.60	3.49	3.49	3,46	3.49	<
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	40.46	41.06	41.66	42.26	32,62	42.26	
2.4	Kontribusi Produk Kelompok Petani Terhadap PDRB %	1.52	1.50	1.54	1.54		1.54	
2.5	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	37.83	34.14	37.60	37.60	35,94	37.60	
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	14.14	15.16	15.50	16.00	0	16.00	
3	Kehutanan							
3.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	0,3	0,2	0	0	0	0	=
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	2,96	2,88	0	0	0	0	=
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan hutan	80	80	0	0	0	0	=
4	Energi Dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	72	73.2	75.6	75.6	-	-	
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	60.96	63.3	67.98	67.98	-	-	
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	41.46	39.16	34.56	34.56	-	-	
5	Perdagangan							
5.1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	61.02	61.53	63.33	63.33		-	
6	Perindustrian							
6.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0.01	0.01	0.02	0.02		-	
	Persentase koperasi aktif	-	73.81	196	50.57	9,43		
	Jumlah koperasi aktif	-	217	344	175	35		
7	Kelautan dan Perikanan							



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
7.1	Produksi Perikanan (Kg)	2866.2	3773.7	3514.1	35685	3.800	35685	<
7.2	Konsumsi Ikan (Kg)	31	33.3	38	49.1	40	39.1	>
7.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	25	25	30	220	220	220	=
7.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Kg)	2866.2	3773.7	3514.1	3941.4	-	3941.4	
Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	-	-	-	-	Ada	Ada	=
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD(%)	99.52	98.20	97.12	98.16	99	-	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	99.72	98.25	99.12	98.16	100	100	=
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	-	-	-	95	96	-	
1.8	SIPD	-	85.05.00	85.17.00	85.35.00		-	
1.9	E-Planning	-	-	100	100		-	
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	
2.2	Persentase SILPA	-	-	-	-		-	
2.3	Persentase SILPA Terhadap APBD	9.65	10.93	9.31	5.03	4.51	5.00	
2.4	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	-	-	-	-		-	
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	25.16	11.05	19.43	22.27	21,15	22.37	
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	12.70	16.17	14.69	11.16	11,33	14.67	
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	113.63	84.93	130.67	77.64	75	77.64	
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	94,795,103, 657.00	60,111,603 ,851.70	55,598,801, 499.00	54,862,126, 800.00	56.070.056. 655,00	57,017,394 ,600.00	
2.9	Penetapan APBD	tgl. 15 Januari 2015	tgl. 11 Januari 2016	tgl. 26 Januari 2017	tgl. 19 Desember 2017	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan							
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	-	kurang lebih 4 Bulan	-	kurang lebih 4 Bulan	kurang lebih 4 Bulan	kurang lebih 4 Bulan	



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI					Target RPJMD Tahun 2014/201 9	Interpr etasi
		2015	2016	2017	2018	2019		belum tercapa i (<) sesuai (=) melam pau (>)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal %	3.90	3.77	4	5	6	6.40	
3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural %	7.96	8.95%	8.66	8.00	12	8.00	
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	30	30	32	32	29	32	
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	149	149	151	151	141	151	
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	2366	2206	2275	2497	2526	2497	
4	Pengawasan							
4.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	15	70	65	68		68	
4.2	Jumlah Temuan BPK (saran)	251	292	361	444		Mengacu pada LHP BPK RI	
5	Sekretariat Dewan							
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6	Penanggulangan bencana							
6.1	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	=
6.2	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	50	40	50	40		-	



- *) Untuk Indikator Dengan Target Penjumlahan, Tidak Menggunakan Rumus Tetapi Langsung Menentukan Jumlah Yang Dicapai
- *) Indikator Diatas Dapat Disesuaikan/Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan
- *) Angka sementara



2.6.2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui:

- a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD; dan
- b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD.

Lebih lanjut Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut (terlampir).



2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat Padang Lawas”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Selain itu sejak awal tahun 2020 terjadi permasalahan baru akibat mewabahnya virus COVID-19 hampir diseluruh dunia. Wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan Indonesia, setelah dinyatakan positif COVID-19 pada awal Maret lalu. Hingga kini, COVID-19 telah merebak dan menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari PHEOC Kementerian Kesehatan RI pertanggal 14 Mei 2020 di Indonesia Kasus terkonfirmasi sebanyak 15.438, kasus meninggal 1.028, kasus sembuh sebanyak 3.287, kasus dalam perawatan 11.123 serta jumlah PDP sebanyak 33.042 dan ODP

256.299. Salah satu daerah di Indonesia yang juga terkena imbas pandemi COVID-19 ini adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara termasuk kedalam wilayah dengan transmisi Lokal, Jumlah positif Corona atau COVID-19 di Sumatera Utara menembus 200 kasus akhir Mei 2020 selain itu, terdapat 53 pasien positif Corona yang sembuh dan 24 orang meninggal dunia dan 162 orang PDP yang masih dirawat. Merebaknya COVID-19 di Sumatera Utara juga berdampak pada beberapa sektor, khususnya ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas dan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah :

1. COVID-19

Penyebaran Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Kabupaten Padang Lawas yang berdampak terhadap social dan ekonomi masyarakat.

2. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Padang Lawas berperan diberbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut, beberapa permasalahan yang memicu masalah ini, antara lain:

- a. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan
- b. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
- c. Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender

3. Belum Meratanya Pembangunan Daerah

Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera, hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
- c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal
- d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah
- e. Belum Stabilnya Tingkat Inflasi Daerah
- f. Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas)
- g. Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah

4. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Padang Lawas sedang dalam *on progress* dikerjakan. Dengan hal ini kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Padang Lawas.

- a. Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas
- b. Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah
- c. Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah.
- d. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

5. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah



diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang belum maksimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Dari masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

- a. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik
- b. Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.90
Permasalahan Kabupaten Padang Lawas
Per Aspek Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Belum Maksimalnya Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan berbasis Elektronik	e – Planning	BAPPEDA
			e – Budgeting	BPPKAD
			e – Tukin	BKPSDM
			e – Izin	PERIZINAN
			Tingginya indisipliner pada ASN	BKPSDM, SATPOL PP, INSPEKTORAT
		Kurangnya Budaya nilai-nilai kerja yang Positif	Kurang tegasnya pengawasan terhadap ASN dan sanksi yang tidak diterapkan pada ASN	BKPSDM
		Sistem penilaian kinerja pegawai belum terintegrasi dengan PKPT, PK dan	Belum tersedianya sistem manajemen penilaian kinerja ASN yang komprehensif yang sesuai dengan permenpan RB	BKPSDM, INSPEKTORAT



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		SKP	no 35 tahun 2012	
		Tingginya kesenjangan SDM baik dari segi umur maupun kompetensi	Kurangnya pelaksanaan bimtek dan pelatihan terhadap ASN	BKPSDM
		Penyajian Laporan Keuangan belum Sesuai Standar keuangan Pemerintahan (SAP)	Belum tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	BPPKAD
		Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Belum Tepat Waktu	Manajemen Data Perencanaan masih belum optimal	BAPPEDA
			Implementasi penyusunan dokumen perencanaan sesuai standar belum optimal	BAPPEDA
		Penegakan PERDA	Masih minimnya Personil penegakan PERDA	SATPOL PP
			Masih minimnya ketaatan masyarakat terhadap PERDA	SATPOL PP
2	Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Masih rendahnya Sarana Pendidikan	Belum terpenuhinya RKB dan USB	PENDIDIKAN
		Masih Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik	Masih terbatasnya akses Tenaga Pendidik guna mengikuti Pendidikan/ pelatihan/ Diklat	PENDIDIKAN
		Masih tidak meratanya sebaran Tenaga pendidik SD dan SMP	Masih kurangnya jumlah dan sebaran tenaga pendidik	PENDIDIKAN
			Masih belum Optimalnya manajemen penempatan tenaga pendidik	PENDIDIKAN
		Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan Non Formal	Belum tersedianya penyelenggaraan SLB	PENDIDIKAN
			Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal lainnya	PENDIDIKAN
		Masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi	Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi masih rendah	KESEHATAN
			Persalinan di fasilitas kesehatan masih minim	KESEHATAN, RSUD
			Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil	KESEHATAN
			Belum tersedianya sarana dan prasarana quick win di FKTP	KESEHATAN
		Masih terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu	Cakupan jumlah tenaga medis masih rendah	KESEHATAN, RSUD
			Cakupan jaminan kesehatan masyarakat masih rendah	KESEHATAN, RSUD



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Cakupan pelayanan fasilitas kesehatan masih rendah	KESEHATAN, RSUD
			Peningkatan jaminan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan belum optimal	RSUD
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular	Masih rendahnya angka penemuan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	KESEHATAN
			Masih kurangnya Skrining pada penduduk usia produktif (15-59 tahun) belum optimal	KESEHATAN
			Belum terbentuknya Posbindu untuk skrining Pm dan PTM di setiap desa	KESEHATAN
		Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	Pola pikir masyarakat yang masih rendah	KESEHATAN
			Masih rendahnya penggunaan air bersih	KESEHATAN
			Tingginya angka prevelensi perokok di RT	KESEHATAN
			Masih rendahnya masyarakat yang melaksanakan STBM	KESEHATAN
		masih adanya kasus gizi buruk	Rendahnya pengetahuan keluarga tentang praktik pemberian makanan bayi dan anak yang benar	KESEHATAN
			faktor kemiskinan yang mempengaruhi pemenuhan gizi anak	KESEHATAN
			Kurangnya penerapan pola pemberian MP-ASI yang benar	KESEHATAN
			Kurangnya kunjungan kehamilan (ANC) ke pelayanan Kesehatan	KESEHATAN
3	Ketahanan Pangan	Masih Rendahnya ketahanan pangan Daerah	Alih Fungsi Lahan pertanian yang masih tinggi	PERTANIAN
			masih rendahnya Produksi pangan, perikanan, peternakan	PERTANIAN, DISKANAK
			Kurangnya ketersediaan pangan	PERTANIAN, KETAPANG, DISKANAK
			Belum optimal pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	PERTANIAN
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan	DISKANAK
			Belum berkembangnya balai benih induk	PERTANIAN, DISKANAK
			Masih rendahnya SDM pelaku pertanian	PERTANIAN



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Belum maksimalnya pembinaan kelompok tani	PERTANIAN, DISKANAK
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian hama/penyakit tanaman dan ternak	PERTANIAN, DISKANAK
			Tingginya Konsumsi pangan	KETAPANG, PERTANIAN
		Belum Optimalnya Keaneka Ragaman Pangan	Belum berkembangnya multipelkroping	PERTANIAN
			Belum optimalnya pengembangan tanaman hortikultura	PERTANIAN, DLHK
			Belum berkembangnya bahan pangan pengganti bahan makanan pokok	KETAPANG, PERTANIAN
			Kurangnya Pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung penurunan stunting	KETAPANG, PERTANIAN
		Masih Rendahnya Pengawasan pangan daerah	Peranan dan SDM penyuluh	PERTANIAN, DISKANAK, DLHK
			Tingginya penggunaan pupuk dan pestisida organik	PERTANIAN, DISKANAK, DLHK
			Dewan ketahanan pangan	KETAPANG
		Belum meratanya distribusi pangan	keterjangkauan akses pangan	KETAPANG
			Pasokan pangan belum merata	KETAPANG, PERTANIAN
			Stabilitas harga pangan	KETAPANG, PERTANIAN
4	Infrastruktur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Kesempatan Kerja	Distribusi Air Minum Belum Merata	Topografi wilayah yang tidak merata, sehingga dibutuhkan distribusi air minum dengan metode pompanisasi. Pembangunan Intake (Reservoir) agar jumlah air yang keluar mencukupi kebutuhan	PU
		Masih Rendahnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni, Air bersih dan Sanitase		PU/PERKIMHUB
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Minimnya PERDA tentang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP, PERKIMHUB
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PERDA	SATPOL PP
			Kurangnya personil pelaksanaan keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Peringatan dini terjadinya bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat dilokasi bencana	BPBD
		Perlindungan tenaga Kerja belum optimal	Tidak tersedianya balai Latihan Kerja (BLK)	DISNAKER
			Rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah	DISNAKER
			Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang khusus sesuai kebutuhan perusahaan	DISNAKER
		Masih minimnya akses mendapat kerja	Masih terbatasnya usaha/unit penyedia lapangan kerja	DISNAKER
5	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang belum ramah lingkungan	Masih banyaknya perusahaan belum taat lingkungan/ Amdal	DLHK
			Rendahnya implementasi regulasi terkait lingkungan	DLHK
			Tingginya perusakan lingkungan hutan (perkebunan) pembakaran	DLHK
			SDM aparatur belum memadai	DLHK
		Pengelolaan Sumber Daya Alam belum Optimal	Belum maksimalnya identifikasi potensi pertambangan	BAPPEDA
			Belum optimalnya pengelolaan potensi Tambang	BAPPEDA
			Penertiban Izin pengelolaan sumber daya alam belum maksimal	PERIZINAN, SATPOL PP
			Belum termanfaatkan potensi Energi baru terbarukan limbah kelapa sawit	BAPPEDA, PERTANIAN
			Belum teridentifikasinya potensi Panas bumi air panas Paringgonan	BAPPEDA, DISPORAPAR
		Belum Optimalnya Perkembangan Pariwisata Daerah	Potensi pariwisata belum terkelola dengan baik	DISPORAPAR
			Belum optimalnya kesiapan masyarakat	DISPORAPAR
			Sarana dan Prasarana belum memadai	DISPORAPAR
			Publikasi yang masih rendah	DISPORAPAR
			Minimnya investasi pariwisata	DISPORAPAR



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Belum berkembangnya IKM dan UKM	Masih rendahnya Inovasi produk	DISKOPERINDAG
			Keterbatasan alat produksi	DISKOPERINDAG
			Minimnya modal usaha	DISKOPERINDAG
			Jaringan usaha masih lemah	DISKOPERINDAG
			Belum tersertifikasinya hasil Produksi	DISKOPERINDAG
		Belum Tersedianya Pasar Modern	Lahan belum tersedia	DISKOPERINDAG
			Belum adanya investasi	DISKOPERINDAG
			Ketersediaan Pasar daerah masih Pasar Tradisional	DISKOPERINDAG
		Belum Maksimalnya Promosi Produk Daerah	Belum adanya sarana dan prasarana Promosi daerah	DISKOPERINDAG, INFOKOM
6	Kesempatan Kerja	kualitas SDM Tenaga Kerja masih rendah	Belum Semua pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	DISNAKER
			Sering terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja	DISNAKER
7	Infrastruktur	Jaringan Drainase yang belum terhubung	Masalah lahan yang masih belum terselesaikan/rampung utamanya di daerah padat penduduk (Permukiman)	DINAS PU
		Penataan Ruang Terbuka Hijau	Belum Tersedianya Lahan untuk Penataan RTH	DINAS PU
		Kondisi Mantap jalan Kabupaten masih sedikit dan belum memadai	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sangat panjang, tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan.	DINAS PU
		Masih terbatasnya Konektivitas Antar Wilayah	Adanya beberapa titik rawan bencana dan dibutuhkan penangan lebih.	DINAS PU
		Masih banyak Jumlah jembatan gantung yang kurang baik	Kurang maksimalnya anggaran untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan	DINAS PU
		Pembangunan infrastruktur Pemerintahan	Pengadaan Lahan yang belum rampung dan anggaran yang masih terbatas	DINAS PU
		Belum Optimalnya sistem Irigasi	Adanya lahan pertanian yang berliih fungsi, berkurangnya debit air yang mengairi persawahan dan banyaknya jumlah saluran irigasi semi permanen	DINAS PU



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Belum tertatanya Ibu Kota Kabupaten dengan Baik	Pegaplikasian RTRW yang belum maksimal	DINAS PU
		Penataan Transportasi belum memadai		DINAS PERKIMHUB
8	Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	Pelayanan persampahan belum maksimal	Minimnya sarana prasarana pengelolaan persampahan yang mengakibatkan pelayanan persampahan tidak maksimal	DLHK
		Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan air, tanah dan udara belum maksimal	Meningkatnya pemanasan global (<i>global warning</i>) akibat peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan tingginya aktivitas manusia penghasil gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim	DLHK
		Belum adanya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lingkup kabupaten		DLHK
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan untuk melaksanakan penataan izin PPLH	Kurangnya area serapan air dipermukiman padat penduduk	DLHK
		Belum adanya Data MHA dan Kearifan Lokal		DINAS DLHK
		Kurangnya Kesadaran dan Jumlah masyarakat yang mengetahui dan memahami pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan	DLHK
		Pelayanan Pengaduan Kerusakan Lingkungan yang belum optimal		DLHK
		Sistem informasi lingkungan hidup masih secara manual		DLHK
		Belum ada subyek/ obyek yang layak menerima penghargaan di bidang lingkungan		DLHK
		Belum memadainya pengembangan prasarana utilitas (PSU) Kawasan permukiman yang berkelanjutan		DINAS PERKIMHUB
9	Kualitas Kehidupan Beragama dan Penguatan Budaya	Belum Maksimalnya Kegiatan Akbar Keagamaan	Minimnya event-event kegiatan keagamaan	DINSOS
		Belum Maksimalnya Peran FKUB	Belum optimalnya koordinasi FKUB	KESBANGPOL



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Dukungan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	Belum Optimalnya dukungan dana kepada rumah ibadah	DINSOS
		Minimnya Pelestarian Seni Budaya Daerah	Belum optimalnya pembinaan daerah kepada pelestarian budaya daerah	PENDIDIKAN, DISPORAPAR
			Kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah	PENDIDIKAN, DISPORAPAR
			Belum adanya gedung kesenian daerah	PENDIDIKAN, DISPORAPAR

2.8. Isu Strategis

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD **Kabupaten Padang Lawas**, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP, RKPD Provinsi Sumatera Utara. Maka isu strategis **Kabupaten Padang Lawas** Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pemulihan Ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui penyiapan fasilitas dan layanan Kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi
- b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *value* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.
- c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah
 Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontiniu sehingga menimbulkan arus barang.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

d. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang *fluktuatif* dan cenderung meningkat. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

e. Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsip dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

f. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.





BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok menjadi pemicu dinamika perekonomian global. Selain itu, risiko geopolitik semakin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kerusuhan yang berkepanjangan di Hongkong, Iran dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi dunia. Kondisi global yang kurang kondusif tersebut menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9 persen pada tahun 2019, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6 persen. Namun, pada tahun 2020, diperkirakan kondisi perekonomian global semakin membaik dan dapat tumbuh sekitar 3,3 persen.

Optimisme pertumbuhan ekonomi global yang semakin membaik, mendorong Kementerian Keuangan RI menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 5,3 persen. Prakiraan ini selain dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global juga didorong oleh perbaikan harga komoditas ekspor yang diproyeksikan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Perbaikan kinerja ekspor selanjutnya memberikan dampak pada peningkatan konsumsi sebagai akibat dari meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada tahap selanjutnya mampu mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi.

Optimisme perbaikan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mulai runtuh ketika diberitakan bahwa telah berkembangnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Wabah Covid-19 mulai merebak ke dunia Februari 2020. Ketika wabah ini berjangkit di hampir seluruh negara di dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan menjadi pandemi pada Bulan Maret 2020. Dampak yang dihasilkan dari virus corona tidak hanya meresahkan pada keselamatan nyawa manusia, disamping itu membawa dampak lainnya yang berimbas ke berbagai aspek yang seakanakan saling mengikat menjadi satu kesatuan yaitu perekonomian.

Terguncangnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19, dampaknya turut dirasakan secara regional. Menyebarnya Covid-19



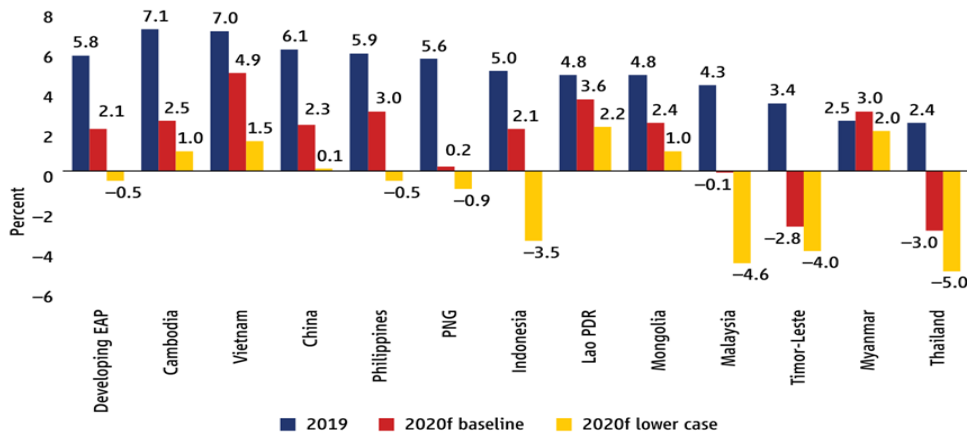
berdampak secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga aktivitas perekonomian dalam lingkup nasional maupun internasional menjadi terganggu. Melemahnya perekonomian turut berdampak pula pada kurs (nilai mata uang) rupiah yang semakin terdepresiasi.

Dampak Virus Covid-19 (Corona) terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri (lockdown) sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi ini sebagai antisipasi merebaknya virus Corona yang semakin cepat terutama di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan global dapat berkontraksi hingga 0,9 persen tahun ini atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008-2009. Lembaga internasional lainnya Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -1,1 persen, dan The Economic Intelligent Units memproyeksikan resesi ekonomi dunia mencapai -2,2 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun 2020, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3 persen. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9 persen. Sejalan dengan proyeksi tersebut, Asian Development Bank (ADB) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5 persen pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Meski Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian Indonesia, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri.

Bank Indonesia awalnya (Februari 2020) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0 persen-5,4 persen. Namun kemudian dikoreksi menjadi kisaran 4,2 persen -4,6 persen (Maret 2020). Kemudian, pada April 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan assessment memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat turun ke 2,3 persen, bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk, bisa mencapai negatif 0,4 persen.



Grafik. 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Tahun 2020



Sumber: World Bank 2020

Secara kuartalan, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 sebesar 4,52 persen - 4,68 persen. Dampak Covid-19 masih terhadap ekonomi Indonesia belum begitu dirasakan. Namun pada kuartal II 2020 akan menjadi titik terberat dalam perekonomian Indonesia. Dalam skenario pemerintah, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 bisa turun menjadi 0,3 persen, hampir mendekati nol atau bahkan negatif growth di minus 2,6 persen dan untuk kuartal III akan ada perbaikan di 1,5 persen dan 2,8 persen dan pada kuartal IV pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mencapai 2,3 persen. Sementara itu Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 sebesar 4,7 persen, kuartal II sebesar 1,1 persen, kuartal III sebesar 1,3 persen dan kuartal IV sebesar 2,4 persen. Secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 2,3 persen tahun 2020.

Pada Bulan April, Internasional Monetary Fund (IMF) juga merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Global. Pada rilis yang berjudul 'The Great Lock Down', sebuah judul yang mengambil inspirasi dari The Great Depression, IMF memprediksi bahwa Tahun 2020 dunia akan dilanda resesi, dengan proyeksi seperti ditampilkan dalam grafik dibawah ini:



Tabel. 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

The COVID-19 pandemic will severely impact growth across all regions.

(real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2019	2020	2021
World Output	2.9	-3.0	5.8
Advanced Economies	1.7	-6.1	4.5
United States	2.3	-5.9	4.7
Euro Area	1.2	-7.5	4.7
Germany	0.6	-7.0	5.2
France	1.3	-7.2	4.5
Italy	0.3	-9.1	4.8
Spain	2.0	-8.0	4.3
Japan	0.7	-5.2	3.0
United Kingdom	1.4	-6.5	4.0
Canada	1.6	-6.2	4.2
Other Advanced Economies	1.7	-4.6	4.5
Emerging Markets and Developing Economies	3.7	-1.0	6.6
Emerging and Developing Asia	5.5	1.0	8.5
China	6.1	1.2	9.2
India	4.2	1.9	7.4
ASEAN-5	4.8	-0.6	7.8
Emerging and Developing Europe	2.1	-5.2	4.2
Russia	1.3	-5.5	3.5
Latin America and the Caribbean	0.1	-5.2	3.4
Brazil	1.1	-5.3	2.9
Mexico	-0.1	-6.6	3.0
Middle East and Central Asia	1.2	-2.8	4.0
Saudi Arabia	0.3	-2.3	2.9
Sub-Saharan Africa	3.1	-1.6	4.1
Nigeria	2.2	-3.4	2.4
South Africa	0.2	-5.8	4.0
Low-Income Developing Countries	5.1	0.4	5.6

Source: IMF, *World Economic Outlook*, April 2020

INTERNATIONAL MONETARY FUND

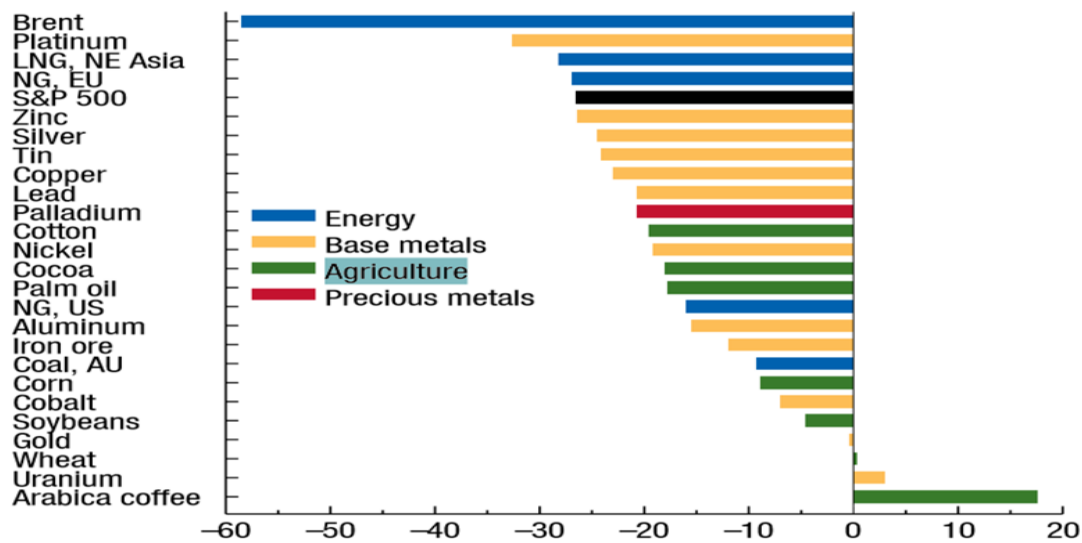
IMF.org

Sumber: IMF 2020

Menurut perkiraan IMF, ekonomi dunia diperkirakan turun hingga minus 3,0 persen di tahun 2020. Negara maju, seperti Amerika dan Jepang, diperkirakan mengalami penurunan ekonomi hingga masing-masing 5,9 persen dan -5,2 persen. Salah satu negara yang mengalami dampak Covid-19 yang cukup besar yaitu Italia yang diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai dengan -9,1 persen, dan Spanyol diperkirakan akan mengalami penurunan ekonomi hingga -8 persen. China yang merupakan negara awal menyebarnya pandemi diperkirakan masih akan tumbuh 1,2 persen. Ekonomi India masih diproyeksi mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,9 persen, sementara Thailand diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan hingga -6,7 persen. Indonesia sendiri diprediksi hanya tumbuh 0,5 persen.

Harga komoditas dunia yang merupakan komponen penentu bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Komoditas minyak bumi, tembaga, batubara, kelapa sawit dan coklat diperkirakan termasuk mengalami penurunan. Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya yang memiliki ketergantungan yang besar pada harga komoditas turut merasakan dampak dari penurunan, seperti grafik dibawah ini :

Grafik. 3.2.
Proyeksi Komoditas Dunia



Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada Triwulan II 2020.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kemenkeu Republik Indonesia, ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,3 persen dan pada tahun 2021 sebesar 4,5% sampai 5,5%.

Tabel. 3.2.
Perkiraan Perekonomi Nasional Tahun 2020

	2020			2021	
	Baseline	Covid-19	Rendah	Sedang	Tinggi
Pertumbuhan (%)	5,3	2,3	4,5	5,0	5,5

Sumber : Kemenkeu RI dan Bappenas RI 2020

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPR) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen, diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7–3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3–4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19.



Tabel. 3.3.
Pertumbuhan PDB Nasional sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (persen)

Uraian	2019	2020: Sebelum COVID-19	2020: Setelah COVID-19
Pertumbuhan PDB	5,0	5,3	(0,4)–2,3
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	5,2	4,9	(0,6)–1,8
Konsumsi Pemerintah	3,2	4,3	3,3–4,0
Investasi (PMTB)	4,4	6,0	(2,8)–0,3
Ekspor Barang dan Jasa	(0,9)	3,7	(7,7)–(3,0)
Impor Barang dan Jasa	(7,7)	3,2	(12,0)–(7,5)

Sumber : RKP 2021

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

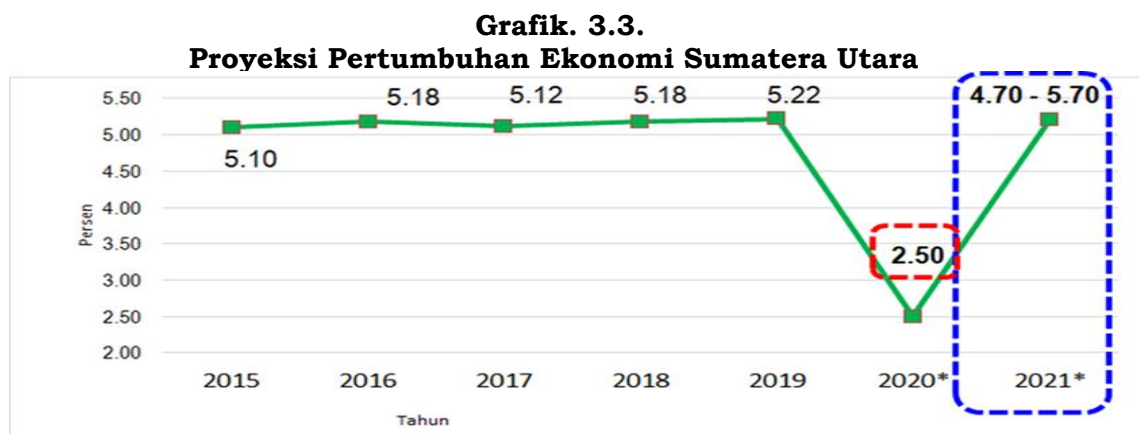
Tabel. 3.4.
Pertumbuhan PDB Nasional Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (persen)

Uraian	2019	2020: Sebelum COVID-19	2020: Setelah COVID-19
Pertumbuhan PDB	5,0	5,3	(0,4)–2,3
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	3,7	0,8 –2,5
Pertambangan dan Penggalian	1,2	1,9	(2,1)–0,5
Industri Pengolahan	3,8	5,0	(1,9)–1,8
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	4,0	4,2	1,6–3,4
Pengadaan Air	6,8	4,0	1,7–4,5
Konstruksi	5,8	5,7	(0,9)–2,2
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	5,5	(2,0)–0,5
Transportasi dan Pergudangan	6,4	7,0	(7,5)–(3,1)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	6,0	(7,9)–(5,2)
Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3	8,3–11,2
Jasa Keuangan	6,6	6,3	2,5–5,4
Real Estate	5,7	4,9	(0,2)–2,5
Jasa Perusahaan	10,3	8,3	1,2–3,9
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	4,5	4,4–5,1
Jasa Pendidikan	6,3	5,1	3,8–6,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	7,5	11,2–13,3
Jasa Lainnya	10,6	8,9	3,7–6,5

Sumber : RKP 2021



Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun tajam dan penurunan kinerja berbagai sektor dan komoditas dunia, **pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan akan turun menjadi sebesar 2,5 persen pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,70% sampai 5,70%.** Grafik di bawah menampilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan proyeksi sektoral ekonomi pada tahun 2020 dan 2021.



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Utara 2021

Tabel. 3.5.
Proyeksi Sektoral Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan 2021

NO	URAIAN	REALISASI	PROYEKSI	
		TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,13	4,44	4.91 - 5.91
2	Pertambangan dan Penggalian	4,53	0,65	4.23 - 5.23
3	Industri Pengolahan	1,23	0,31	2.79 - 3.79
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,92	0,14	6.00 - 7.00
5	Pengadaan Air	5,44	0,50	5.79 - 6.79
6	Konstruksi	7,29	0,45	5.66 - 6.66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	2,76	4.79 - 5.79
8	Transportasi dan Pergudangan	5,80	0,25	3.94 - 4.94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	0,42	3.90 - 4.90
10	Informasi dan Komunikasi	9,63	9,97	9.47 - 10.47
11	Jasa Keuangan	1,92	0,71	1.53 - 2.53
12	Real Estate	4,84	0,26	5.39 - 6.39
13	Jasa Perusahaan	5,87	0,77	5.77 - 6.77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,15	6,80	6.50 - 7.50
15	Jasa Pendidikan	4,86	4,82	4.46 - 5.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	7,00	6.34 - 7.34
17	Jasa lainnya	6,25	0,95	5.97 - 6.97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		5,22	2,50	4,70 - 5,70

Sumber : Bappedas 2020



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat empat sektor dominan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,48%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,98%, dan Industri Pengolahan sebesar 18,95%, serta Konstruksi sebesar 14,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami sedikit penurunan (turun 0,43%). Begitu juga dengan sektor industri pengolahan mengalami penurunan distribusi (turun 1,03%) dibandingkan Tahun 2018. Akan tetapi di sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami kenaikan sebesar 1,84% dan demikian juga pada sektor konstruksi naik sebesar 0,31% dibandingkan Tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.6.

**Perbandingan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III 2018 dan
Triwulan III 2019 Provinsi Sumatera Utara (*year on year*) (dalam Juta Rupiah)**

No.	Uraian	2018 Triwulan III	Distribusi (%)	2019 Triwulan III	Distribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.076.877,58	20,91	164.165.702,71	20,48
2	Pertambangan dan Penggalian	9.552.001,77	1,29	10.173.175,64	1,27
3	Industri Pengolahan	148.430.312,53	20,01	152.202.535,62	18,98
4	Pengadaan Listrik, Gas	840.587,64	0,11	908.220,96	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102.921.371,10	0,10	796.715,08	0,10
6	Konstruksi	134.361.327,03	13,88	113.764.686,54	14,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.043.610,77	18,11	151.967.095,15	18,95
8	Transportasi dan Pergudangan	17.636.584,91	4,99	40.604.224,76	5,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.154.954,36	2,38	19.386.717,21	2,42
10	Informasi dan Komunikasi	22.643.286,54	2,04	17.139.666,16	2,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37.338.152,41	3,05	23.344.412,93	2,91
12	Real Estate	7.649.068,49	5,03	40.939.915,97	5,11
13	Jasa Perusahaan	27.290.307,23	1,03	8.671.788,95	1,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.527.652,33	3,68	30.011.848,18	3,74
15	Jasa Pendidikan	13.527.652,33	1,82	14.767.591,11	1,84
16	Jasa Kesehatan dan	7.273.250,49	0,98	8.155.278,43	1,02



	Kegiatan Sosial				
17	Jasa lainnya	4.257.540,07	0,57	4.733.764,58	0,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		741.751.634,36	100%	801.733.339,98	100%

Sumber : BPS (BRS 5 Februari 2020)

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, terdapat empat sektor dominan yang memberikan laju pertumbuhan dalam ekonomi pada Tahun 2019 yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 9,63%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,88%, dan Administrasi Pemerintahan sebesar 8,15%, serta Konstruksi sebesar 7,29%. Adapun sektor yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 1,23%, Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,53%, Real Estat sebesar 4,84%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,80%, dan Jasa Pendidikan sebesar 4,86%, serta Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial sebesar 4,63%. Penjelasan lebih terperinci terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.7.
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 dan 2019
di Provinsi Sumatera Utara (year on year) (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2018	Laju (%)	2019	Laju (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127.202.647,27	4,87	133.726.024,44	5,13
2	Pertambangan dan Penggalan	6.792.014,01	5,46	7.099.764,34	4,53
3	Industri Pengolahan	96.174.604,86	3,66	97.362.095,28	1,23
4	Pengadaan Listrik, Gas	694.580,53	2,58	728.786,41	4,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	489.606,31	2,90	516.228,49	5,44
6	Konstruksi	64.507.110,54	5,45	69.212.033,32	7,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	90.652.798,85	6,11	96.936.190,58	6,93
8	Transportasi dan Pergudangan	24.372.509,87	6,14	25.786.497,39	5,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.131.736,74	7,53	13.209.118,27	8,88
10	Informasi dan Komunikasi	14.024.319,77	8,43	15.375.557,28	9,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.854.353,07	1,73	15.138.894,88	1,92
12	Real Estate	21.740.027,53	5,34	22.792.552,75	4,84
13	Jasa Perusahaan	4.678.854,18	7,10	4.953.494,45	5,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16.409.755,27	6,12	17.746.916,00	8,15
15	Jasa Pendidikan	10.418.747,77	6,29	10.924.946,10	4,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.977.046,00	5,90	5.207.258,26	4,63
17	Jasa lainnya	2.644.915,45	5,96	2.810.237,01	6,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		512.765.628,04	5,18	539.526.595,25	5,22

Sumber : BPS (BRS 5 Nov 2018 & 2019)



Dari sisi pengeluaran, Covid-19 diperkirakan juga akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan tertutupnya berbagai lapangan usaha, karantina di berbagai negara, dan pengangguran yang meningkat; maka dapat dipastikan konsumsi rumah tangga akan mengalami gangguan cukup besar. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Sektor lain yang menurun akibat terhentinya berbagai proyek dan bisnis adalah sektor investasi. Selain itu, ekspor dan impor juga diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya perdagangan luar negeri. Di sisi lain, sektor konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Tabel di bawah ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

Tabel. 3.8.
Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran

No	Komponen	Tahun	Proyeksi	
		2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	3,93	4,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-0,11	0,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,45	2,10	0,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,59	1,60	1,63
5	Perubahan Inventori		-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-1,33	-6,45	-1,79
7	Dikurangi : Impor Barang dan Jasa	-2,32	-2,98	-0,59
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,22	2,50	5,20

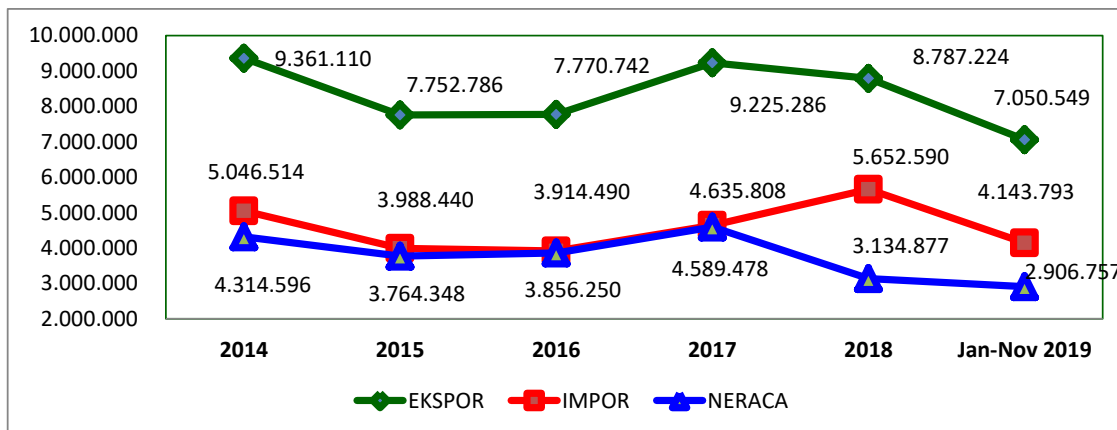
Sumber : Bappedasu 2020

Neraca perdagangan diperlukan dalam mengantisipasi resiko ekonomi global sekaligus menjadi langkah penting dalam menjaga penguatan laju pertumbuhan ekonomi. Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada Januari-November 2019 tercatat mengalami **surplus**, sebesar US \$ 2.90 Milyar. *Ekspor* Sumatera Utara pada tahun 2018 tercatat sebesar US\$ 7.05 Milyar dan *import* sebesar US\$ 4.14 Milyar. *Surplus* neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dengan negara mitra utama selama bulan November 2019 berturut-turut adalah senilai US\$54,28 juta dengan Amerika Serikat,



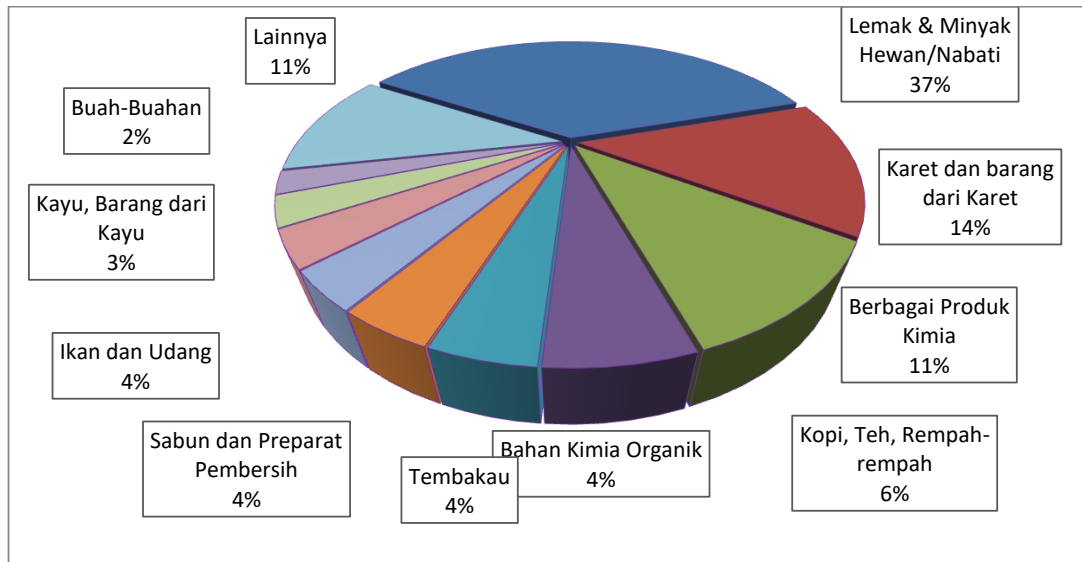
senilai US\$43,25 juta dengan India, senilai US\$26,01 juta dengan Jepang, senilai US\$25,97 juta dengan Kamboja, dan senilai US\$20,75 juta dengan Belanda. **Defisit** perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan November 2019 tercatat dengan Singapura sebesar US\$42,20 juta, dengan Argentina sebesar US\$25,24 juta, Tiongkok sebesar US\$36,52 juta, Malaysia sebesar US\$17,62 juta, dan sebesar US\$22,91 juta dengan Australia. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik. 3.4.
Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2014 sampai Januari-November 2019



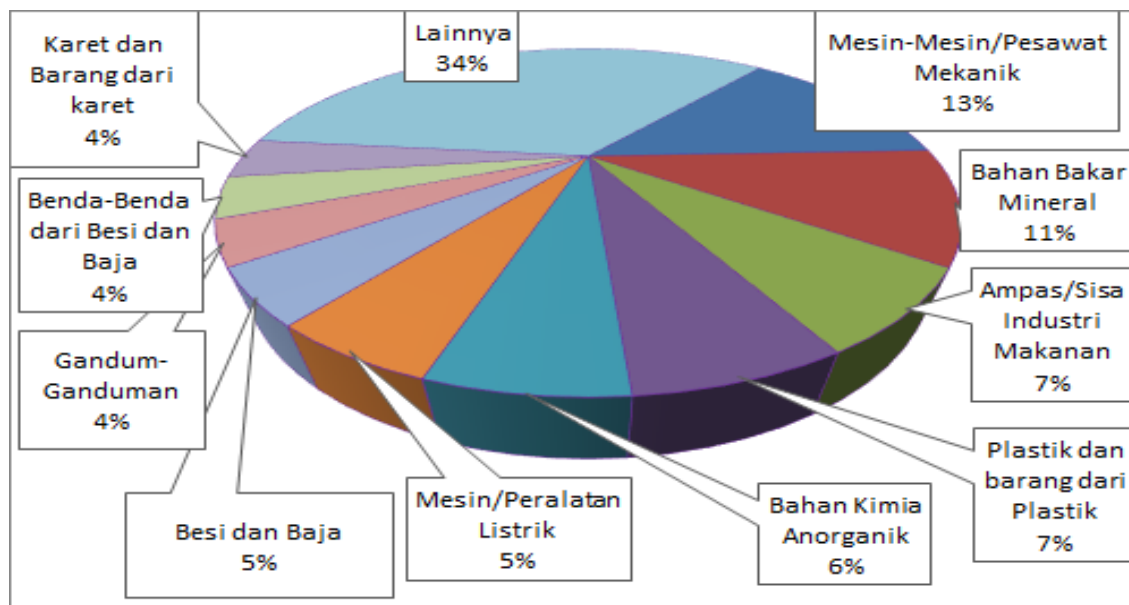
Sumber: BPS Sumut

Pangsa Pasar Ekspor Provinsi Sumatera Utara bulan Januari-November 2019 menurut Negara tujuan yang terbesar adalah ke Tiongkok dengan nilai US\$ 985,22 Juta (13,97%), diikuti ke Amerika Serikat dengan Nilai US\$ 901,71 Juta (12,79%) dan India dengan Nilai US\$ 518,38 Juta (7,35%). Sedangkan Impor Sumatera Utara selama bulan Januari-November 2019 menurut Negara asal yang terbesar adalah dari Tiongkok dengan nilai US\$ 1,18 Miliar (28,49%) dan Singapura dengan nilai US\$ 393,93 Juta (9,51%) serta Malaysia dengan nilai US\$ 359,01 Juta (8,66%). Ekspor Sumatera Utara pada Januari-November tahun 2019 didominasi dari Golongan Barang Lemak & Minyak Hewan/Nabati sebesar 36,93 %, diikuti Karet dan barang dari karet sebesar 14,07 %, serta Berbagai Produk Kimia sebesar 10,77 %. Hal ini terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3.1.
Ekspor Sumatera Utara Menurut Golongan Barang
HS (Harmonized System Code) 2 Dijit
Januari-November 2019 (Nilai FOB, Ribuan US \$)

Impor Sumatera Utara pada Januari-November tahun 2019 didominasi dari Golongan Barang lainnya dengan dominasi bahan baku penolong sebesar 34,39 %, diikuti Golongan Barang Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik sebesar 13,27 %, dan Bahan Bakar Mineral sebesar 10,55 %. Hal ini terlihat dalam gambar dibawah ini:



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.2.
Ekspor Sumatera Utara Menurut Golongan Barang
HS (Harmonized System Code) 2 Dijit
Januari-November 2019 (Nilai FOB, Ribuan US \$)



Perkembangan ekonomi Sumatera Utara selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Sumatera Utara tahun 2019, juga memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas. Salah satu tolak ukur pembangunan Padang Lawas dapat di lihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas, tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,64 persen, hal ini menurun jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang naik sebesar 5,96 persen.

Tabel. 3.9.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015-2019

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas
1	2015	5,74
2	2016	6,06
3	2017	5,71
4	2018	5,96
5	2019	5,64

Sumber : Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat empat sektor dominan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel. 3.10.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Lawas, 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Pertanian	51,58	49,04	47,63	46,77	46,17
B	Pertambangan dan Penggalan	0,48	0,52	0,52	0,53	0,54
C	Industri Pengolahan	14,89	15,72	16,83	17,16	17,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	,020	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang					



F	Konstruksi	14,72	15,74	16,21	16,64	17,18
G	Perdagangan Besar dan eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,30	7,13	7,26	7,17
H	Transportasi dan Pergudangan	1,30	1,10	1,07	1,09	1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	1,06	1,10	1,07	1,09	1,09
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,56	0,57	0,57	0,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,92	0,92	0,87	0,82
L	Real Estate	3,22	3,45	3,67	3,72	3,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan	3,14	3,17	2,98	2,94	2,95
P	Jasa Pendidikan	0,40	0,41	0,38	0,38	0,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

Sumber : Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2020

Tabel. 3.11.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Padang Lawas (juta rupiah), 2015–2019

Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran					
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.171.450,97	3.305.039,94	3.454.946,10	3.645.510,34	3.807.519,96
Pengeluaran Konsumsi LNPR	65.326,48	70.237,03	72.041,76	80.110,20	87.482,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	547.194,20	569.882,08	592.918,10	628.675,17	630.815,05
Pembentukan	1.588.942,24	1.660.639,41	1.747.655,67	1.875.779,40	2.002.742



Modal Tetap Bruto					
Perubahan Inventori Ekpor Barang dan Jasa	44.182,42	40.201,30	32.241,24	32.894,39	33.444,45
	924.432,52	1.079.983,24	1.210.447,90	1.271.326,74	1.397.300,67

Sumber : Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2020

Dari sector inflasi, dimana perhitungan Laju Inflasi Kabupaten Padang Lawas masih berpedoman kepada Kabupaten/Kota terdekat yaitu Kota Padang Sidempuan.

Tabel. 3.12.
Tingkat Inflasi Tahun 2015-2019

No		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padang Sidempuan	1,66	4,28	3,82	2,22	2,15
2	Sumatera Utara	3,24	6,34	3,20	1,23	2,33
3	Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, Perekonomian Kabupaten Padang Lawas mengalami ketidakstabilan dapat dilihat pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas sebesar 6,06 %, pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,71 % dan pada tahun 2018 sebesar 5,96 % dan pada tahun 2019 sebesar 5,64 %. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas , laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih lebih tinggi, karena laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2019 adalah sebesar 5,22 %.

Tabel. 3.13.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Lawas (persen), 2016-2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64
Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61
Labuhan Batu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35



Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,30
Tapanuli Selatan	5,12	5,21	3,19	5,23
Kota	5,29	5,32	5,45	5,51
Padangsidempuan				
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22

Sumber : Padang Lawas Dalam Angka 2020

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2020 dan Tahun 2021

Prospek Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 dan 2022 mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara yang sudah semakin terbuka dimana kontribusi ekspor terhadap total PDRB Kabupaten Padang Lawas yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian nasional dan regional khususnya di Kabupaten Padang Lawas

3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Global

Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi di sepanjang tahun 2019, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity boom.

Harapan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang lebih tinggi mulai terlihat pertengahan Desember 2019, ketika dilaporkan AS-China telah setuju untuk fase pertama damai dagang. Kondisi ini membuat IMF sedikit lebih optimis untuk 2020 dengan pertumbuhan 3,4 persen melebihi pertumbuhan ekonomi global 3,0 persen seperti di tahun 2019. Seluruh lembaga internasional melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan lebih baik yang kemudian ditandai dengan meningkatkan harga minyak dunia, batubara dan komoditas. Indonesia sebagai negara eksportir komoditas yang dibutuhkan negara-negara di dunia ikut memproyeksikan pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 5,3 persen tahun 2020.

Di akhir tahun 2019, beredar berita korban virus SARs dengan variants baru yang kemudian dikenal dengan nama Corona di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penyebaran virus Corona (Covid-19) lebih cepat dibandingkan virus SARs. Penyebaran yang cepat dan berskala besar

memaksa pemerintah Tiongkok untuk melakukan karantina (lockdown) Kota Wuhan agar tidak merebak ke daerah lainnya. Namun penyebaran Covid-19 tidak dapat dicegah dan terus melebar ke seluruh negara di dunia.

Merebaknya Covid-19 dan penutupan Kota Wuhan, maka semakin buruk kerusakan pada ekonomi global. Hal ini diakibatkan bergantungnya ekonomi global pada mata rantai pasokan yang mengaitkan China dengan mitra-mitra dagangnya di seluruh dunia. Penyebaran virus yang cepat dan menimbulkan korban yang sangat besar memaksa banyak negara dunia mengambil kebijakan lockdown. Penutupan negara dan kota menyebabkan aktivitas ekonomi berhenti secara besar-besaran. Dampaknya terjadi pemutusan hubungan kerja yang besar, penurunan skala produksi, peningkatan kemiskinan dan akhirnya ekonomi negara menuju kepada krisis.

Untuk pertama kalinya sejak great depression atau depresi besar (1929 – 1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (emerging market), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multi-krisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks. Tak satu negara pun bisa terhindar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Negara-negara yang mengandalkan pariwisata, perjalanan, dan hiburan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi akan menghadapi disrupsi besar.

Prospek perekonomian global untuk tahun 2020 masih tergantung dari penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan telah tuntas. Jika wabah Covid-19 dapat dituntaskan pada kuartal II 2020, maka perekonomian dunia akan membaik dan gelombang krisis dapat dihindari, namun jika berlanjut hingga semester II, maka tidak ada satupun negara di dunia yang terhindar dari krisis ekonomi. Meski demikian, jika pandemi bisa diatasi pada semester II-2020 dan kebijakan yang dilakukan di seluruh dunia efektif mencegah kebangkrutan usaha, menjaga kehilangan pekerjaan, dan menopang sistem keuangan, maka pertumbuhan ekonomi 2021 akan berbalik positif ke arah 5,8 persen.

3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional

Tahun 2019 lalu merupakan tahun yang penuh tantangan. Ada empat peristiwa yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama adalah potensi terjadinya resesi di AS yang ditandai dari munculnya kejadian lebih tingginya suku bunga jangka pendek dibandingkan dengan suku bunga jangka panjang (inverted yield curve). Kedua, perang dagang AS-China yang terus berlanjut dan memperlambat pertumbuhan dunia. Ketiga, tahun politik di Indonesia yaitu dilaksanakannya Pemilu dan Pemilihan Presiden secara serentak. Keempat, disrupsi teknologi (revolusi industri 4.0) yang berpotensi menghapuskan beberapa pekerjaan yang sifatnya manual, rutin dan pengulangan sehingga dapat digantikan oleh otomatisasi. Masyarakat semakin khawatir terhadap prospek memperoleh ketersediaan lapangan kerja di masa depan dan mempunyai dampak pada siklus belanja rumah tangga sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, dibandingkan dengan negara lain, kombinasi antara kebijakan makro ekonomi yang berhati-hati, jumlah penduduk yang besar dan juga sedikit keberuntungan dari arus modal masuk portofolio sebagai akibat ketidakpastian di AS dan Uni Eropa, membuat Indonesia masih mampu mencapai pertumbuhan sekitar 5,02 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, sebelum wabah Covid-19 terjadi, prospek ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 5,3 persen seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang juga meningkat.

Wabah pandemi Covid-19 ke seluruh negara di dunia memberikan dampak terhadap tekanan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Tantangan yang perlu diwaspadai pada tahun 2020 yang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional adalah:

1. Ketidakpastian waktu wabah Covid-19 berakhir

Pandemi Virus Corona COVID-19 adalah salah satu tantangan yang paling berat yang dihadapi dunia. Pandemi tersebut merupakan krisis kemanusiaan yang memiliki konsekuensi kesehatan dan sosial-ekonomi yang parah. Isu pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, sangat sulit diprediksi. Pemerintah Indonesia belum pernah memiliki pengalaman menangani wabah dengan tingkat penularan tinggi seperti Covid-19. Ketidakpastian yang sangat tinggi membuat pemerintah terkesan ragu dan lamban dalam menentukan metode penanganannya, apakah akan menerapkan lockdown, atau mengandalkan pembatasan sosial berskala

besar, atau sebatas social distancing. Penanganan Covid-19 memang bukan perkara yang mudah dan sederhana. Hanya saja, setiap metode penanganan memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda. Dengan tidak menerapkan lockdown, misalnya, ketidakpastian terkait seberapa lama pandemi ini berlangsung menjadi lebih tinggi. Padahal, dampak ekonomi Covid-19 sangat bergantung pada durasi wabah itu berlangsung, semakin lama maka dampaknya akan semakin buruk. Perekonomian Indonesia dalam kondisi berat diproyeksikan akan tumbuh 2,3 persen tahun 2020, namun jika dampak Covid-19 berlanjut lama hingga akhir tahun, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi 0,4 persen.

2. Ancaman perlambatan ekonomi dunia

International Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 mencapai -3,0 persen. Indonesia menjadi salah satu negara G-20 bersama China dan India yang masih belum memasuki periode krisis di tahun 2020. Pada tahun 2020, Indonesia masih dapat tumbuh walau sangat kecil yaitu 0,5 persen. Laporan PBB memperkirakan bahwa hingga 25 juta lapangan kerja bisa hilang di seluruh dunia akibat wabah tersebut. Sementara itu, World Travel and Tourism Council (WTTC) memperkirakan, sektor pariwisata akan mengalami penyusutan terbesar hingga 25 persen akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Kondisi itu juga berarti sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan mereka di sektor jasa tourism tersebut. Covid-19 diproyeksikan PBB juga membawa tekanan ke bawah hingga 40 persen pada aliran investasi asing langsung global. Penurunan investasi berskala besar akan menyebabkan pengangguran meningkat dan kemiskinan penduduk bertambah. Krisis ekonomi dunia yang terbesar setelah Great Depression tahun 1932, kembali terjadi pada tahun 2020. Hal tersulit untuk menangani kejadian ini adalah belum adanya pengalaman dunia untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh penyebaran virus dalam skala besar dan waktu yang cepat seperti Covid-19.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers.



Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

4. Defisit Transaksi Berjalan Semakin Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Transaksi berjalan mengalami defisit terlalu tinggi akan membutuhkan transaksi finansial yang tinggi. Jika tidak mencukupi maka simpanan yang ada di cadangan devisa akan terpakai. Dengan kondisi itu berarti rupiah akan mengalami tekanan karena kebutuhan dollar AS yang meningkat. Dengan demikian Indonesia akan membutuhkan aliran modal asing untuk masuk lebih banyak baik melalui investasi maupun penjualan surat berharga atau utang luar negeri.

5. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-

commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa yang akan datang (2020 – 2021), namun Indonesia masih memiliki prospek dalam mendorong pertumbuhan ekonominya di masa yang akan datang.

1. Peluang Indonesia keluar dari krisis masih ada

Meskipun ada penurunan pertumbuhan ekonomi karena faktor penyebaran wabah Covid-19 sangat besar, IMF dan ADB masih melihat peluang Indonesia tidak mengalami krisis masih ada. Pada Tahun 2019, Indonesia berada di posisi dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat. Tahun 2020, walaupun ekonomi Indonesia akan menurun cukup besar, namun masih belum sampai menuju krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat dipertahankan hingga 0,5 persen tahun 2020. Bahkan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 8,0 persen seiring dengan melonjaknya permintaan barang dan jasa yang sempat tertunda selama tahun 2020.

2. Permintaan dalam negeri masih dapat terjaga

Permintaan dalam negeri (domestik) Indonesia juga disebut akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi, mendorong meningkatnya kelompok kelas menengah, yaitu kelompok yang memiliki pengeluaran (belanja) \$2 - \$20 per kapita perhari. Bank Dunia 2017 menunjukkan, kelas menengah menjadi penyumbang utama perekonomian Indonesia, yaitu 47 persen dari total konsumsi rumah tangga Indonesia. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia dapat meningkat dari 60 juta orang (2018) menjadi 85 juta orang pada 2020. Ini membuat kelas menengah menjadi motor penggerak utama perekonomian. Prospek industri kreatif pun diprediksi positif. Dampak Covid-19 terhadap daya beli masyarakat masih tetap dijaga dengan memberikan sejumlah insentif. Pemerintah menambah APBN sebesar Rp.405,1 triliun untuk menangani dampak Covid-19 dengan peningkatan belanja kesehatan, menjaga daya beli masyarakat miskin dan

pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Cakupan pembagian PKH (Program Keluarga Harapan) diperluas, pembagian Kartu Prakerja dan pembagian sembako bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Keseluruhannya adalah menjaga permintaan dalam negeri tetap tumbuh dan roda perekonomian masih tetap berjalan.

3. Belanja pemerintah yang terfokus untuk penyelesaian dampak Covid-19 Pemerintah semakin serius untuk melawan dampak ekonomi akibat Covid-19. Tambahan anggaran Rp.405,1 triliun disiapkan pemerintah guna menahan dampak pandemi ke sektor ekonomi dan sosial. Tambahan dana dalam APBN 2020 tersebut dialokasikan untuk empat sektor utama yang terparah yaitu belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun. Tambahan belanja pemerintah memang sudah sepantasnya untuk dilakukan. Penerbitan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 harus segera disahkan ke Undang-undang untuk mempercepat eksekusi anggaran dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial.
4. Inflasi di Indonesia tetap terjaga Inflasi di Indonesia pada 2019 mencapai 2,72 persen yang merupakan inflasi terendah sejak tahun 1999. Pada tahun 2020 inflasi Indonesia diharapkan tetap terjaga di bawah 3,0 persen. Walaupun wabah Covid 19 masih mewabah di Indonesia dan tidak ada kepastian berakhirnya, namun dengan melemahnya daya beli dan distribusi barang yang tetap terjaga dapat membawa inflasi Indonesia tetap stabil dan terjaga

3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara mendapat tantangan yang cukup berat seiring dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Tantangan pertumbuhan Sumatera tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 menurut hitungan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, akan berkontraksi sekitar 0,7 persen hingga 0,9 persen dari proyeksi pertumbuhan awal tahun yang dipatok sebesar 5,1-5,5 persen. Dengan asumsi kontraksi karena corona, maka pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 akan ada

di kisaran angka 4,3-4,7 persen. Dalam skenario terburuk penurunan ekonomi Sumut dampak wabah Covid-19 bisa tinggal 1,2 persen - 1,6 persen. Perekonomian yang melambat diakibatkan menurunnya seluruh komponen permintaan, baik Konsumsi Rumah Tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Ekspor dan Impor. Dari sisi produksi, seluruh lapangan usaha juga mengalami penurunan khususnya yang berhubungan dengan pariwisata. Perlambatan ekonomi Sumut masih belum terdampak pada kuartal I 2020. Namun perlambatannya akan dirasakan pada kuartal II 2020. Perekonomian Sumut akan mengalami perbaikan mulai triwulan III dan seterusnya seiring dengan fase pemulihan ekonomi.

2. Penurunan daya beli masyarakat

Dampak perlambatan ekonomi Sumatera Utara memberikan dampak bagi pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan pendapatan masyarakat sehingga memberikan tekanan pada daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan memberikan dampak yang lebih mendalam bagi pertumbuhan ekonomi dan krisis ekonomi. Lumpuhnya sisi permintaan dapat berdampak terhadap tekanan pada sisi produksi yang selanjutnya berdampak terhadap krisis ekonomi.

3. Penurunan penanaman modal Realisasi investasi sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Melambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal bagi investor untuk menghentikan sementara kegiatan investasinya dan menunggu sampai munculnya sinyal positif yang memberikan ekspektasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih baik. Investasi di Sumut berpotensi terganggu khususnya bagi Penanaman Modal Asing (PMA), terkait dengan investor asing utama yang berasal dari negara yang melakukan lockdown seperti Singapura, Korea Selatan, Hongkong dan Malaysia. Bahkan PBB sudah memproyeksikan bahwa investasi asing dunia akan anjlok hingga 40,0 persen akibat Covid-19.

4. Menurunnya kunjungan wisatawan Provinsi Sumatera Utara telah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Apalagi Danau Toba telah ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah disiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukungnya. Mewabahnya pandemi Covid-19 menekan kunjungan wisatawan baik manca negara maupun

nusantara untuk datang ke Sumatera Utara. Penurunan penumpang angkutan udara internasional dan tingkat hunian kamar mengalami penurunan yang tajam sejak Maret 2020. Penyebaran Covid-19 menyebabkan tingkat okupansi hotel anjlok hingga 80,0 persen. Lockdown negara asal mengakibatkan turunnya aktivitas travelling wisatawan. Sejumlah pesanan baik penerbangan maupun hotel dibatalkan. Even pertemuan dan acara yang mengumpulkan orang banyak dibatalkan sehingga membuat sektor akomodasi mengalami penurunan yang cukup tajam.

5. Meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi yang paling besar selain penurunan produksi adalah pengurangan tenaga kerja. Sejak Maret 2020, sejumlah usaha di Sumatera Utara telah mengurangi kegiatan produksinya dan kebijakan yang diambil bisnis dan lembaga adalah memberhentikan sementara sebagian pekerjanya. Lapangan usaha yang terdampak besar seperti akomodasi dan restoran, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan telah melakukan rasionalisasi karyawan yang aktif bekerja dengan memberlakukan shift kerja atau memutuskan hubungan kerja sementara. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya pengurangan pendapatan masyarakat yang kemudian dapat mendorong masyarakat hampir miskin menjadi miskin.

Prospek Ekonomi Sumatera Utara akan muncul setelah wabah Covid-19 telah menghilang dari Sumut. Diperkirakan perekonomian Sumut akan mulai tumbuh pada kuartal III 2020. Beberapa sektor akan mengalami lonjakan setelah Covid-19 berlalu dari Sumut seperti pariwisata, MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions), perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan berlangsung bertahap dan berlanjut hingga tahun 2021. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumut dapat mencapai 8,0 persen pada tahun 2021, seiring dengan lonjakan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti pada tahun 2020.

3.1.2.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Ketidakpastian perekonomian global memberikan tantangan dan sekaligus prospek bagi perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021

difokuskan kepada peningkatan daya saing daerah dan pencapaian target pembangunan, menuntut perbaikan dan percepatan pada sejumlah sasaran pembangunan yang masih belum tercapai. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Padang Lawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global dalam beberapa tahun terakhir, perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

- 1) Perlambatan perekonomian global memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Perekonomian Kabupaten Padang Lawas berpotensi bergerak ke arah yang sama, disamping itu kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang masih tertinggal dibandingkan daerah setara lainnya;
- 2) Daya saing daerah Kabupaten Padang Lawas yang masih belum optimal ditandai dengan masih relatif tertinggalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan daerah setara lainnya seperti Kota Medan, Kota Pematang Siantar dan Kota Binjai. Dalam menghadapi persaingan global mengingat pembangunan infrastruktur masih berjalan secara bertahap serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih memiliki keahlian terbatas;
- 3) Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital mendorong terjadinya persaingan bisnis yang semakin ketat dan pergeseran teknik transaksi masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi memberikan dampak melesunya pelaku bisnis tradisional Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Padang Lawas. Selama ini potensi yang dimiliki Kabupaten Padang Lawas sangat banyak dan beragam, namun masalah utama yang dihadapi adalah jaringan pemasaran.
- 4) Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sama pentingnya sebagaimana kualitas sumber daya manusia. Karena, merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara bentuk fisik atau bangunan dalam mempercepat pembangunan daerah. Infrastruktur yang layak dan merata menjadi pendukung

untuk masyarakat mendapatkan seluruh akses pelayanan publik dan juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk dari infrastruktur yang selalu menjadi kebutuhan dari setiap pembangunan daerah adalah konektivitas (jalan dan jembatan), transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas setiap tahun selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun hingga saat ini, selalu ada permasalahan yang menghambat ketersediaan infrastruktur.

- 5) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Masih Belum Optimal Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, efektivitas, efisiensi dan melibatkan masyarakat secara langsung ketika pengambilan keputusan. Walaupun telah disadari bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan, Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi permasalahan dan hambatan. Permasalahan dimulai dari adanya penyalahgunaan wewenang, minimnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), korupsi, nepotisme, kolusi, struktur birokrasi yang tidak optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Padang Lawas perlu didukung melalui ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku seperti, kredibilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan yang baik, dengan jumlah yang mencukupi.

b. Prospek Perekonomian Kabupaten Padang Lawas

Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Lawas diharapkan telah dimulai sejak kuartal III 2020. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi pada tahun 2021 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2021, sehingga hal tersebut dapat

mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Padang Lawas menjadi lebih baik. Letak Kabupaten Padang Lawas yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini. Beberapa sektor akan mengalami lonjakan setelah Covid-19 berlalu dari Kabupaten Padang Lawas seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi akan berlangsung bertahap dan berlanjut hingga tahun 2021. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumut dapat mencapai 8,0 persen - 8,5 persen pada tahun 2021, seiring dengan lonjakan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti pada tahun Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2018 dan maka prospek perekonomian pada Tahun 2019 - 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2019 - 2021

Indikator	2019*	2020*	2021*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	3,00	4,00 - 5,50
PDRB ADHB (Rp triliun)	11,37	11,43	12,54
PDRB ADHK (Rp triliun) Tahun 2010	7,95	7,90	8,79
PDRB perkapita ADHB (Rp juta)	35.931.148	39.977.791,43	42.001.113,15
Inflasi (%)	2,15	1,5	2,90
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.24	5.50	5.35
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,28	8,25	8,00
Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin)		0.2585	0.2385
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,16	67,65	67,78

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan data-data di atas maka arah kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya

- manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
 3. Pemulihan sektor ekonomi kreatif melalui pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekraf; serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekraf;
 4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Peningkatan penanganan kesehatan. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya;
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat krusial. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Padang Lawas, yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.



3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menjadi sangat penting karena akan menjadi salah satu modal utama untuk menggerakkan roda pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dilihat dari sumbernya, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan atau hasil usaha di dalam daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pendapatan yang diperoleh karena adanya transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perolehan dari hibah akan dikelompokkan dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Perimbangan Kabupaten Padang Lawas bersumber dari Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam, serta Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari: (1) Dana Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi; (3) Dana Desa.

Tabel. 3.14.
Realisasi dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2020

KodRek	Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	1.029.402.278.210	1.134.424.719.325	1.167.230.341.966
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.455.308.607	52.067.312.091	72.583.553.644
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.140.623.479,00	9.908.848.158,30	20.081.226.359
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.213.843.310,43	2.308.214.347,92	5.309.327.285
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.807.390.794,00	6.526.583.214,00	4.600.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.293.451.024,06	33.323.666.370,56	42.593.000.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	706.290.658.171	759.871.292.490	796.435.789.422
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.263.706.899,00	23.949.816.464,00	34.609.683.422
1.2.2	Dana Alokasi Umum	521.562.942.000,00	541.104.708.000,00	564.296.664.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	157.464.009.272,00	194.816.768.026,00	197.529.442.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	275.656.311.432	322.486.114.744	298.210.998.900
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.119.041.076,99	40.072.040.000,00	34.784.400.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.208.805.555,00	53.207.862.944,00	29.876.877.900
1.3.4	Bantuan Keuangan Provinsi			-
1.3.6	pendapatan Dana Desa	218.328.464.800,00	229.206.211.800,00	233.549.721.000



Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Klasifikasi terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara rinci Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.15.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 – 2022

KodRek	Uraian	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(6)
4	PENDAPATAN	1.033.671.861.190	1.038.671.861.190
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.253.354.413	86.253.354.413
4.1.01	Pajak Daerah	23.491.623.817	24.491.623.817
4.1.02	Retribusi Daerah	18.543.401.400	20.543.401.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.168.100.000	5.168.100.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.050.229.196	36.050.229.196
4.2	DANA PERIMBANGAN	913.689.006.777	915.689.006.777
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	882.318.284.982	883.318.284.982
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.370.721.795	32.370.721.795
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	36.729.500.000	36.729.500.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.729.500.000	36.729.500.000

3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat sebagai berikut:

1. Alokasi belanja Prioritas RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024 yang merupakan Tahun kedua dengan Arah Kebijakan :
 - a. Pengurangan Angka Pengangguran dengan Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha.
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
 - c. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan energi
 - e. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur
 - f. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - g. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi



2. Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
3. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji.
4. Penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah akan di alokasikan kembali ke desa sebesar 10 persen.
5. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik.
6. Alokasi belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah
7. Alokasi belanja pelatihan sebesar 0,16 persen

Tabel. 3.15.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

KodRek	Uraian	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA	1.110.272.803.463	1.168.966.201.353	1.205.029.552.112
	Belanja Operasi dan Modal			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	631.237.498.640	657.031.876.282	699.064.772.256
2.1.1	Belanja Pegawai	344.597.151.693	355.881.419.728	370.067.957.234
2.1.4	Belanja Hibah	32.754.323.490	7.885.000.000	17.882.348.915
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.441.173.954	2.630.830.000	2.451.580.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	259.610.241.800	288.134.626.554	307.662.886.107
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	479.035.304.823	511.934.325.071	505.964.779.856

Pada tahun 2021 Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Klasifikasi terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Belanja Daerah Dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel. 3.16.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 – 2022

KodRek	Uraian	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(6)
5	BELANJA	1.067.839.898.511	1.070.839.898.511
5 . 1	Belanja Operasi	608.490.646.104	609.490.646.104
5 . 2	Belanja Modal	145.104.933.807	147.104.933.807
5 . 3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000
5 . 4	Belanja Transfer	313.244.318.600	313.244.318.600

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2020 dan tahun sebelumnya.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel. 3.17.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

KodRek	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	80.870.525.253	34.541.482.028	37.799.210.146	34.168.037.321	32.168.037.321
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	80.870.525.253	39.060.846.113	37.799.210.146	34.168.037.321	32.168.037.321
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	80.870.525.253	39.060.846.113	37.799.210.146	34.168.037.321	32.168.037.321
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		4.519.364.085	-	-	-
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		4.519.364.085	-	-	-



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2019; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; (5) Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021; dan (6) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2021.

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Asaahan periode 2020-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021, kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Lebih lanjut, perwujudan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 difokuskan pada prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya



Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan target pembangunan RPJMN 2021:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,7 persen
- b. Tingkat Kemiskinan 8,0-8,5 persen
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8-5,0 persen
- d. Indeks Gini 0.375-0.379
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73.26 tahun

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran



dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. **Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021** adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :



Tabel. 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Inflasi	3,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90

Sumber : RKP 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah **percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial** dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Fokus pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu :

- Pemulihan Industri , Pariwisata, dan Investasi
- Reformasi system Kesehatan Nasional
- Reformasi Sistem Perlindungan sosial
- Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Untuk mendukung Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam **7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN)** yaitu

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelatihan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021 antara lain (1) Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, sebagaimana terlihat juga pada tabel dibawah ini:

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi – misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi – misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”. Dalam pencapaian Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam;
- 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
- 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan;



- 4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;
- 5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Dalam rangka pencapaian visi – misi maka ditetapkan tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, dengan sasaran : (a) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama (b) Meningkatnya ketersediaan sandang pangan (c) Meningkatnya rumah yang layak (d) Meningkatnya kesehatan yang prima (e) Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan (f) Meningkatnya keterjangkauan harga (g) Meningkatnya konektivitas infrastruktur;
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, dengan sasaran : (a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (b) Meningkatnya politik yang beretika (c) Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
3. Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, dengan sasaran : (a) Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan (b) Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan sasaran : (a) Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (b) Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,70 persen
- b. Perentase Penduduk Miskin 7,39 persen
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,10 persen
- d. IPM 72,20 persen
- e. Gini Ratio 0,300



RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021 yang terdapat didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, tahun 2021 merupakan periode ke-3 RPJMD yang arah kebijakannya difokuskan untuk **“melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya”**, dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Wabah virus corona COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan Indonesia, setelah dinyatakan positif COVID-19 pada awal Maret lalu. Salah satu daerah di Indonesia yang juga terkena imbas pandemi COVID-19 ini adalah Sumatera Utara. Merebaknya COVID-19 di Sumatera Utara juga berdampak pada beberapa sektor, khususnya ekonomi dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera utara melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut mencatat ada sekitar 14 ribu pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan yang terdampak Covid-19, perusahaan yang paling berdampak saat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yaitu perhotelan dan biro-biro perjalanan serta plaza yang tutup. Keadaan ini akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri dan jasa serta pembangunan infrastruktur terhambat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga pemerintah provinsi Sumatera Utara fokus melakukan pemulihan ketahanan ekonomi dan pemulihan kehidupan masyarakat agar kembali lancar dan normal dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Selain kondisi diatas juga berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun sebelumnya dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai serta target pada tahun 2021 dan mencermati berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun



2019-2023 maka ditetapkan **Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021** yaitu : **“Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”**,

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai dalam RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

Tabel. 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Proyeksi Target 2021 Dampak COVID-19
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7 – 5,7
Penduduk Miskin	9,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,1-7,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,42
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
Usia Harapan Hidup	69,25
Rata-Rata Lama Sekolah	9,25
Harapan Lama Sekolah	13,11
Rasio Gini (indeks)	0,320

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provsu 2021

Berdasarkan tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD 2021 adalah **Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat** dengan menitik beratkan pelaksanaan pembangunan pemulihan ketahanan ekonomi pada sektor strategis (Pariwisata, Perdagangan, industri, pertanian dan UMKM) dan pemulihan kehidupan masyarakat maka **fokus pembangunan RKPD tahun 2021** dengan konsep membangun desa menata kota adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul
2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus
3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas
4. Peningkatan jangkauan layanan Kesehatan
5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan
6. Pemulihan Pandemi COVID-19



4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten padang Lawas

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu :

**“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN,
CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA)
DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| BERIMAN | : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. |
| CERDAS | : Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi. |
| SEHAT | : Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi. |
| SEJAHTERA | : Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, |



meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkannya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

- BERBUDAYA : Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.
- KERJA KERAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.
- KERJA CERDAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi**, dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik.
2. **Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata**, karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan



kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai.

3. **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah**, karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang di sesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah.
4. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang**, karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik.
5. **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal**, dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan berkelanjutan pembangunan tahun 2020. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan arah kebijakan:



1. Pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;
3. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian pembangunan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut ini :

Tabel. 4.3
Tujuan, Sasaran Dan Strategi
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
			Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pembinaan evaluasi terhadap OPD Penyelenggara pelayanan publik
		Terwujudnya sistem pengelolaan data informasi pembangunan berbasis teknologi informasi (e-Government)	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2.	Mewujudkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat	Temberantasnya buta huruf	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan jenjang pendidikan	Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan



		Tewujudnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap masyarakat	Pengembangan diversifikasi pangan
			Penanganan daerah rawan pangan
			Stabilisasi harga dan pasokan pangan
			Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
	Mewujudkan masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat	Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif
			Peningkatan keterampilan tenaga kerja
			Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi
			Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
		Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Peningkatan Pemberian Pelayanan Informasi rawan Bencana
			Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Peningkatan Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana
	3. Meningkatkan pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing
			Peningkatan nilai tambah produk pertanian, kehutanan dan perikanan
			Peningkatan kinerja layanan irigasi optimal untuk mendukung kemandirian
		Meningkatkan pertumbuhan industri kreatif lokal	Peningkatan nilai tambah produk unggulan/kratif lokal



4.	Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur pasar, jalan dan transportasi public	Pembangunan dan peningkatan Jalan
			Revitalisasi Pasar
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih dan sanitasi	Pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman
			Pembangunan PSU Permukiman bagi masyarakat kurang mampu
			Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu
			Pembangunan dan Peningkatan Sambungan Listrik Rumah Tangga Masyarakat
			Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
			Penataan, Pembinaan dan pendampingan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Terwujudnya Padang Lawas sebagai serambi mekah	Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai sarana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
	Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan local dalam rangka meningkatkan potensi dan daya Tarik pariwisata	Terwujudnya Penguatan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian karakter sosial	Penguatan Warisan Budaya Daerah dan meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata

Pada dasarnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas sudah selaras dengan dengan 7 Agenda prioritas



pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel. 4.4
Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan : a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) b. Peningkatan kuantitas / ketersediaan air	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	1. Meningkatkan ketersediaan sandang pangan 2. Meningkatkan mata pencaharian yang menenangkan 3. Meningkatkan keterjangkauan harga	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik



	untuk mendukung pertumbuhan ekonomi c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan 2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing a. Penguatan perekonomian kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi b. Peningkatan			
--	---	--	--	--



	nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi c. Peningkatan ekspor bernilai tambah Komponen Dalam Negeri (TKDN) d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Pembangunan Wilayah 2. Pemerataan Pembangunan 3. Kontribusi Antar-Pulau	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	1. Meningkatkan mata pencaharian yang menyenangkan 2. Meningkatkan konektivitas infrastruktur	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	1. Mewujudkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat 2. Mewujudkan masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata	1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat	Meningkatnya kesehatan yang prima Meningkatnya	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan	Meningkatkan pembangunan ekonomi



	kelola kependudukan 2. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 3. Terpenuhnya layanan dasar 4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda 5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan 6. Terwujudnya pengentasan kemiskinan	dalam kehidupan 2. Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat 3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri 1. Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan 2. Meningkatkan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2. Meningkatkan kemajuan kebudayaan untuk	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan



	meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 5. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa 6. Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,			hidup dan penataan ruang	
--	--	--	--	--------------------------	--



	inovatif dan kreatif			
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Infrastruktur Ekonomi 3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan 4. Energi Ketenaga Listrik 5. Transformasi Digital	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	1. Meningkatkan rumah yang layak 2. Meningkatkan konektivitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal
				1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama 2. Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan local dalam rangka meningkatkan potensi dan daya Tarik pariwisata
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim 3. 3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	
7. Memperkuat Stabilitas	1. Konsolidasi	Terwujudnya	1. Meningkatnya tata	



Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik	kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan politik yang beretika 3. Meningkatkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan		
--	--	--	---	--	--



RKPD Tahun 2021 adalah RKPD tahun kedua pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2020-2024, tahun 2021 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.

Berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2019 serta target pada tahun 2021 dengan mencermati berbagai permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 yaitu : **"MEMPERCEPAT PEMULIHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA "**,

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang ingin dicapai dalam RKPD Tahun 2021 adalah pemerataan beberapa pendapatan masyarakat yang tercermin dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi 4,00 - 5,50 persen
2. Perentase Penduduk Miskin 7,39 – 9,50 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5.35 – 9,10 persen
4. IPM 67,25 - 67,78 persen
5. Gini Ratio 0.2385



Tabel. 4.5
Sinkronisasi Fokus Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

No	RKP Tahun 2021		RKPD Provinsi 2021		RKPD Kabupaten 2021	
	Fokus Pembangunan Nasional	Sasaran (Major Project)	Fokus Pembangunan Sumatera Utara	Sasaran	Fokus Pembangunan Padang Lawas	Sasaran
	I. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)	(1) Peningkatan Kompetensi SDM Unggul	a. Peningkatan Kapasitas SDM b. Peningkatan Kemiskinan c. Revitalisasi Balai Latihan Kerja d. Link and Match dgn BUMN/BUMD/Swa sta e. Penguatan Kewirausahaan & KUKM f. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja & Penciptaan Lapangan Kerja	(4) Perwujudan ketahanan pangan dan energi	a. Pembentukan desa mandiri pangan b. Area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai basis ketahanan pangan Kabupaten



	f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) h. Penguatan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi				
II. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif d. memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam			(3) Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan dengan	a. Pembinaan bina kelompok industri kreatif b. Peningkatan promosi dan pelayanan investasi c. Pemulihan Ekonomi Masyarakat



	mendukung ekonomi unggulan daerah; dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.				
II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda f. Penguatan kemiskinan g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	(2) Perluasan Akses Pendidikan Menengah	a. Peningkatan Akses & Kualitas Tenaga Pendidik Vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Industri b. Revitalisasi Sekolah Menengah Umum & Kejuruan c. Sarana & Prasarana Pendidikan Menengah d. Pemerataan Akses & Layanan Pendidikan Khusus	(1) Pengurangan Angka Pengangguran dengan Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha	a. Peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. b. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial a. Peningkatan Produktivitas SDM termasuk warga miskin b. Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal Peningkatan kualitas



		layanan kesehatan	e. Distribusi Guru Bidang Studi a. Peningkatan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan b. Sarana Prasarana Kesehatan c. Penanganan Stunting d. Peningkatan Gizi Masyarakat e. Kesehatan Ibu Dan Anak f. Pemberdayaan Keluarga		kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting
V. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter b. Meningkatkan Pemajuan dan				



	Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter				
V. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	a. Infrastruktur Pelayanan Dasar b. Infrastruktur Ekonomi c. Infrastruktur Perkotaan d. Energi Dan Ketenagalistrikan	(3) Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat - pusat produktivitas	a. Aksesibilitas Jalan Ke Daerah Pariwisata & Agraris b. Peningkatan Sarana &	(5) Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas	a. Peningkatan pembangunan jalan/jembatan Kabupaten b. Pengembangan sarana dan



Pelayanan Dasar	e. Transformasi Digital		Prasarana Transportasi c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas & Akses Sumber Daya Air d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan & Pedesaan e. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	infrastruktur	prasarana Pemerintah Daerah c. Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman d. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
VI. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim c. Pembangunan Rendah Karbon.	(5) Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan	a. Peningkatan Destinasi Wisata b. Peningkatan Sdm Pariwisata c. Promosi Wisata d. Akses & Kualitas Pangan e. Peningkatan Investasi, Produksi, Nilai Tambah (Hilirisasi Produk Pertanian) &		



			Promosi		
II. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Konsolidasi Demokrasi b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri c. Penegakan Hukum Nasional d. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola			(6) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui e-Planning dan e-Budgeting b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik c. One stop service pelayanan publik berbasis elektronik d. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
				(7) Mendukung kebijakan nasional dan provinsi	a. Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20



					persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
					b. Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji.
					c. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa



						(ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastruktur publik.
						d. Belanja APJP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah
						e. Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2021 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 yang mengacu pada kebijakan Provinsi dan Nasional yang tercantum dalam RKPD Provinsi dan RKP 2020 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2021 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas



hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan



dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan program prioritas

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19. dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.



4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Unggul akan berfokus pada penciptaan UMKM dan IKM berkualitas yang mandiri, serta mampu berinovasi didukung dengan SDM yang mumpuni melalui pelatihan - pelatihan keterampilan yang menjadi kebutuhan dunia usaha

2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;

Bidang Pendidikan akan difokuskan pada penyediaan Guru Lintas Sekolah ke daerah - daerah terpencil dan sulit dijangkau, Pembangunan Sekolah SMA / SMK, Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas, Laboratorium Komputer dan Bahasa, Perpustakaan, Sanitasi Sekolah dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar Siswa

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

Bidang Infrastruktur akan difokuskan pada program peningkatan akses Infrastruktur Olahraga dan transportasi menuju daerah wisata dan agraris seperti daerah Wisata. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan akses jalan ke daerah penghasil komoditas pertanian, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara) antara lain melalui pengembangan Bandara dan Peningkatan Akses menuju Pelabuhan.

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

Bidang Kesehatan difokuskan pada program penyediaan tenaga medis dan Dukungan Layanan Medis Bergerak, Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah sulit/rawan bencana, terpencil, dan sangat terpencil, Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurus, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Bidang Pariwisata difokuskan kepada program pengembangan daerah destinasi wisata, berupa paket wisata daerah Wisata Mangrove, dengan konsep kawasan sekitar hutan dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 didukung dengan kegiatan terintegrasi



yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023, kegiatan terintegrasi tersebut antara lain :

1. Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO);
2. Kesejahteraan Nelayan (Sayang Nelayan);
3. Dokter Terbang;
4. Peningkatan Produktivitas padi 8 ton
5. Kawasan Peternakan Terpadu
6. Taman Wisata Hutan (Ekowisata);
7. *Smart Floating Farm*;
8. Pengembangan wisata mangrove;
9. Wisata Religi;
10. Guru Terbang / Guru Lintas Sekolah;
11. Pilot Project 5 sekolah yang bersih dan indah di Medan;
12. Taman Kota Digital;
13. Botanical Garden;
14. Pengendalian Banjir Kota Medan dan Sekitarnya;
15. TPA Regional;
16. *Sports Center*;
17. *Islamic Center*;
18. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Penanganan dampak COVID-19
19. Desa Wisata Bunga Dan Buah;
20. Desa Wisata Tenun;
21. Desa/Kota Wisata Sejarah dan Budaya;
22. Desa Wisata Kopi;
23. Desa Wisata Bahari;
24. Desa Mandiri Pangan
25. Desa/Kota Tangguh Bencana
26. Desa/Kota Literasi
27. Desa/Kota sehat bermartabat
28. Desa Keluarga Bermartabat

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Guna menjawab permasalahan/isu strategis Tahun 2021, maka pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Padang Lawas mengambil tema: **“MEMPERCEPAT PEMULIHAN KESEJAHTERAAN**



MASYARAKAT DIDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1. Pengurangan Angka Pengangguran dengan Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha** dengan Program Prioritas:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja.
 - b. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial
- 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia** dengan Program Prioritas:
 - a. Peningkatan Produktivitas SDM termasuk warga miskin
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting
- 3. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan** dengan Program Prioritas:
 - a. Pembinaan bina kelompok industri kreatif
 - b. Peningkatan promosi dan pelayanan investasi
 - c. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
- 4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi** dengan Program Prioritas:
 - a. Pembentukan desa mandiri pangan
 - b. Area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai basis ketahanan pangan Kabupaten
- 5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur** dengan Program Prioritas:
 - a. Peningkatan pembangunan jalan/jembatan Kabupaten
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah
 - c. Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - d. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
- 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih** dengan Program Prioritas:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui e-Planning dan e-Budgeting
 - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik
 - c. One stop service pelayanan publik berbasis elektronik
 - d. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat



- 7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi** dengan Program Prioritas:
- Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji.
 - Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastruktur publik.
 - Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah
 - Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen

Program Prioritas Nasional dan prioritas pembangunan Sumatera Utara merupakan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam program prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Program prioritas tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2021, program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional sebagaimana terlihat pada table berikut ini :



Tabel. 4.6
Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan
RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tema RKP 2021 “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2021 “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGUL, PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT “	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2021 “MEMPERCEPAT PEMULIHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA”
Prioritas RKP 2021	Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2021	Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2021
II. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Program Prioritas: a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	(1) Peningkatan Kompetensi SDM Unggul dengan Program Prioritas: a. Peningkatan Kapasitas SDM b. Penguatan Kemiskinan c. Revitalisasi Balai Latihan Kerja d. Link and Match dgn BUMN/BUMD/Swasta e. Penguatan Kewirausahaan & KUKM f. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja & Penciptaan Lapangan Kerja	(4) Perwujudan ketahanan pangan dan energi dengan Program Prioritas: a. Pembentukan desa mandiri pangan b. Area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai basis ketahanan pangan Kabupaten



d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		
X. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan Program Prioritas: a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang		(3) Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan dengan Program Prioritas: a. Pembinaan bina kelompok industri kreatif b. Peningkatan promosi dan pelayanan investasi c. Pemulihan Ekonomi Masyarakat



b. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif c. memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan d. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.		
X. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Program Prioritas: h. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan i. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial j. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan k. Peningkatan pemerataan	(2) Perluasan Akses Pendidikan Menengah dengan Program Prioritas: a. Peningkatan Akses & Kualitas Tenaga Pendidik Vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Industri a. Revitalisasi Sekolah Menengah Umum & Kejuruan b. Sarana & Prasarana Pendidikan Menengah c. Pemerataan Akses & Layanan Pendidikan Khusus	(3) Pengurangan Angka Pengangguran dengan Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha dengan Program Prioritas: b. Peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. c. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial (2) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia dengan



layanan pendidikan berkualitas l. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda m. Pengentasan kemiskinan n. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	a. Distribusi Guru Bidang Studi (4) Peningkatan jangkauan layanan kesehatan dengan Program Prioritas: g. Peningkatan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan h. Sarana Prasarana Kesehatan i. Penanganan Stunting j. Peningkatan Gizi Masyarakat k. Kesehatan Ibu Dan Anak l. Pemberdayaan Keluarga	Program Prioritas: c. Peningkatan Produktivitas SDM termasuk warga miskin d. Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal e. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting
KI. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Program Prioritas: a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk		



Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter		
II. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan Program Prioritas: b. Infrastruktur Pelayanan Dasar c. Infrastruktur Ekonomi d. Infrastruktur Perkotaan e. Energi Dan Ketenagalistrikan f. Transformasi Digital	(3) Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat - pusat produktivitas dengan Program Prioritas: f. Aksesibilitas Jalan Ke Daerah Pariwisata & Agraris g. Peningkatan Sarana & Prasarana Transportasi h. Peningkatan Kuantitas, Kualitas & Akses Sumber Daya Air i. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan &	(5) Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur dengan Program Prioritas: a. Peningkatan pembangunan jalan/jembatan Kabupaten b. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah c. Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman d. Peningkatan sarana prasarana air bersih



	Pedesaan j. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	dan sanitasi.
II. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan Program Prioritas: a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim c. Pembangunan Rendah Karbon.	(5) Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan dengan Program Prioritas: a. Peningkatan Destinasi Wisata b. Peningkatan Sdm Pariwisata c. Promosi Wisata Akses & Kualitas Pangan d. Peningkatan Investasi, Produksi, Nilai Tambah (Hilirisasi Produk Pertanian) & Promosi	
V. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik dengan Program Prioritas: a. Konsolidasi Demokrasi b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri c. Penegakan Hukum Nasional d. Reformasi Birokrasi Dan Tata		(6) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan Program Prioritas: a. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui e-Planning dan e-Budgeting b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik c. One stop service pelayanan publik



Kelola		
		berbasis elektronik d. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
		(7) Mendukung kebijakan nasional dan provinsi dengan Program Prioritas: i. Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. ii. Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. iii. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastruktur publik. iv. Belanja APDP sebesar 0,75 persen dari



		total belanja daerah	
		v. Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	



Sementara itu Program Prioritas, kegiatan prioritas dan lokasi kegiatan pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 4.7
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Lokasi
RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2021

NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
1	Pengurangan Angka Pengangguran dengan Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Padang Lawas	Dinas Tenaga Kerja
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Padang Lawas	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Padang Lawas	Dinas Tenaga Kerja
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Padang Lawas	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Padang Lawas	Dinas Sosial
2	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Lawas	Dinas Kesehatan



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Padang Lawas	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Padang Lawas	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Padang Lawas	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
4	Perwujudan ketahanan pangan dan energi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Padang Lawas	Dinas Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Padang Lawas	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Padang Lawas	Dinas Perikanan Dan Peternakan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Padang Lawas	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Perikanan Dan Peternakan
5	Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Padang Lawas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh	Padang Lawas	Dinas Perumahan,



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
6	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perencanaan Pendanaan	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Lawas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Padang Lawas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Padang Lawas	Inspektorat
7	Mendukung kebijakan nasional	Program Penunjang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
	dan provinsi	Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		Kebudayaan
			Administrasi Keuangan	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Administrasi Umum	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			Administrasi Keuangan	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			Administrasi Umum	Padang Lawas	Dinas Kesehatan



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
			Administrasi Umum	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
		Sistem Penyediaan Air Minum	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Padang Lawas	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Padang Lawas	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Padang Lawas	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Padang Lawas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Padang Lawas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Padang Lawas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



NO	Prioritas RKPD 2021	Program Prioritas RKPD 2021	Kegiatan Prioritas RKPD 2021	Lokasi	OPD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Administrasi Umum	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Asistensi dan Pendampingan	Padang Lawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan Kapasitas ASN	Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengembangan Karir ASN	Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



4.3. Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah. Bappeda Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinator perencanaan pembangunan di daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2019 dan 2020, diantaranya yaitu :

1. Implementasi Aplikasi E-Musrenbang
2. Implementasi Aplikasi e-Pokir
3. Implementasi Aplikasi e-RKPD
4. Integrasi Eplanning dan Ebudgeting melalui Aplikasi SIPD

Sedangkan inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

1. Aplikasi Pajak dan Retribusi Secara Android

Akses dan transaksi Pajak dan Retribusi dapat dilakukan menggunakan android, memudahkan masyarakat dan Wajib Pajak dalam bertransaksi sekaligus menghemat dalam penggunaan waktu.

2. Online Pembayaran Pajak dan Retribusi

Pembayaran yang dapat dilakukan secara online melalui indomaret, kantor pos, dan bank online lainnya.

3. Pajak dan Retribusi yang terintegrasi dengan APP telegram

Dalam Pengaksesan pajak dan retribusi dapat menggunakan telegram, dimana dari segi keamanan dan kapasitas penyimpanan yang lebih baik.

4. I-note (Sistem Database Pengawas Daerah Padang Lawas)

Suatu sistem yang menghimpun semua Tugas dan fungsi Apip baik itu Pengawasan, Reviu, audit dll.





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Padang Lawas

5.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Lawas perlu dukungan pendanaan dari berbagai pihak baik swasta maupun nasional, berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas :

Tabel 5.1
Rencana Dukungan Pendanaan Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Lokasi	Skema pendanaan
Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Padang Lawas	APBN
	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas	Padang Lawas	APBN
	Pembangunan dan rehabilitasi RS	Padang Lawas	APBN
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)	Padang Lawas	APBN
	Penggantian Jembatan (Khusus Kabupaten)	Padang Lawas	APBN
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan	Padang Lawas	APBN



	Kemiskinan		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Kematian Ibu dan Stunting	Padang Lawas	APBN
	Pembangunan Jaringan irigasi	Padang Lawas	APBN
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)	Padang Lawas	APBD Provinsi Sumatera Utara
	Penggantian Jembatan (Khusus Kabupaten)	Padang Lawas	APBD Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020

5.2. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas

Rencanan Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencapai target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD pada tahun ke-2. selain itu kegiatan pembangunan disinkronisasikan berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan dan Kabupaten/Kota, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara, Program Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Program Prioritas Perangkat Daerah Pemerintah Padang Lawas Tahun 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pengembangan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penanggulangan Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
Badan kesatuan bangsa dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
Dinas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat



	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Dinas Perikanan dan Perternakan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



Kabupaten	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Administrasi Umum
Sekretariat DPRD Kabupaten	Program Layanan Dan Administrasi Keuangan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
	Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
	Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020.



Tabel 5.2
Program Perangkat Daerah Tahun 2021

No	OPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	14	60	186.036.247.296
2	DINAS KESEHATAN	3	7	34	75.844.298.339
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3	6	26	49.225.261.931
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	9	15	49	136.787.168.163
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	5	12	24	12.888.306.943
6	SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	7	29	8.697.227.404
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	6	27	4.526.486.168
8	DINAS SOSIAL	5	9	31	10.070.649.166
9	DINAS TENAGA KERJA	3	6	20	4.315.232.641
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	7	23	3.394.143.617
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7	11	29	7.141.141.399
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	4	19	4.940.703.699
13	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3	4	24	5.802.587.351
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	17	33	6.176.044.239
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	9	32	5.605.245.843
16	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11	11	27	4.975.328.057
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	5	19	3.101.478.203
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5	12	26	8.473.534.328
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	10	24	2.371.540.674
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	7	13	26	3.994.900.803
21	DINAS PERTANIAN	5	7	19	11.651.910.487
22	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	4	14	60	30.780.680.400
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	3	8	24	43.798.101.034
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6	17	69	12.396.467.642
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	4	9	50	32.870.000.831
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	5	46	10.688.009.463
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	10	37	10.114.970.341



No	OPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
28	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	3	6	28	12.369.653.169
29	KECAMATAN BARUMUN	3	6	16	4.556.574.701
30	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2	5	16	2.439.326.201
31	KECAMATAN HURISTAK	4	5	14	1.954.412.441
32	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	3	5	13	1.642.078.832
33	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	3	6	17	2.752.481.183
34	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	3	6	20	3.624.997.714
35	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	4	6	16	2.194.075.337
36	KECAMATAN SOSA	2	6	17	3.706.377.972
37	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	4	6	16	2.776.221.626
38	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	3	6	19	2.025.547.503
39	KECAMATAN ULU BARUMUN	3	5	15	2.035.624.655
40	KECAMATAN SOSOPAN	2	5	16	1.862.010.969
41	KECAMATAN BARUMUN BARU	4	6	19	1.922.792.031
42	KECAMATAN BARUMUN BARAT	4	6	18	1.923.160.972
43	KECAMATAN SOSA JULU	4	6	18	1.923.102.387
44	KECAMATAN ULU SOSA	3	6	20	1.923.082.273
45	KECAMATAN SOSA TIMUR	5	8	24	1.922.971.117
46	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	9	31	3.373.422.366

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020.

Adapun rincian program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 yang disertai dengan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021.

5.3. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

Rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional Tahun 2021. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap prioritas nasional disajikan pada tabel di bawah:



Tabel 5.3
Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021			OPD Penanggung jawab
		Program	Kegiatan	Anggaran	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	94,999,948	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	573,512,514	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	117,893,896	Dinas Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian	194,590,290	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	251,443,400	Dari Dinas Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	89,981,580	Dari Dinas Perikanan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,999,220	Dari Dinas Perikanan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	331,496,070	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	88,359,892	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	99,996,612	Dinas Tenaga Kerja
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	680,000,000	Dinas Tenaga Kerja



No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021			OPD Penanggung jawab
		Program	Kegiatan	Anggaran	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	219,810,076	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106,849,992	Dinas Kesehatan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1,362,673,528	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	37,360,725,000	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	64,837,059,087	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1,160,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	49,738,800	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,538,745,272	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	99,996,612	Dinas Tenaga Kerja
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	680,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	219,810,076	Dinas Tenaga Kerja



No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021			OPD Penanggung jawab
		Program	Kegiatan	Anggaran	
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4,244,388,490	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	83,573,181	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	470,167,630	Dinas Sosial
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	444,166,259	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	194,006,188	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	31,294,004	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	85,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	242,834,650	Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38,968,944,345	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,425,301,434	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,213,053,966	Dinas Pendidikan dan



No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021			OPD Penanggung jawab
		Program	Kegiatan	Anggaran	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,751,008,514	Kebudayaan
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,264,049,038	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	159,962,226	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	92.485.724	Dinas Kesehatan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Hidup	92,485,724	Dinas lingkungan hidup
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	125,534,942	Dinas lingkungan hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204,914,843	Dinas lingkungan hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	129,998,164	Badan Penangulungan Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	394,939,274	Badan Penangulungan Bencana Daerah
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	240,697,668	Badan Penangulungan Bencana Daerah
7	Memperkuat Stabilitas	Program Peningkatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	417,499,760	Satuan Polisi Pamong Praja



No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021			OPD Penanggung jawab
		Program	Kegiatan	Anggaran	
	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63,300,000	dan Pemadam Kebakaran
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	350,495,536	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	227,936,040	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020.

5.4. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 yang diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Unggul akan berfokus pada penciptaan UMKM dan IKM berkualitas yang mandiri, serta mampu berinovasi didukung dengan SDM yang mumpuni melalui pelatihan - pelatihan keterampilan yang menjadi kebutuhan dunia usaha.

2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;

Bidang Pendidikan akan difokuskan pada penyediaan Guru Lintas Sekolah ke daerah - daerah terpencil dan sulit dijangkau, Pembangunan Sekolah SMA / SMK, Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas, Laboratorium Komputer dan Bahasa, Perpustakaan, Sanitasi Sekolah dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar Siswa

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

Bidang Infrastruktur akan difokuskan pada program peningkatan akses Infrastruktur Olahraga dan transportasi menuju daerah wisata dan agraris

seperti daerah Wisata. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan akses jalan ke daerah penghasil komoditas pertanian, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara) antara lain melalui pengembangan Bandara dan Peningkatan Akses menuju Pelabuhan.

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

Bidang Kesehatan difokuskan pada program penyediaan tenaga medis dan Dukungan Layanan Medis Bergerak, Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah sulit/rawan bencana, terpencil, dan sangat terpencil, Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurus, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Bidang Pariwisata difokuskan kepada program pengembangan daerah destinasi wisata, berupa paket wisata daerah Wisata Mangrove, dengan konsep kawasan sekitar hutan dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 memberikan dukungan sebagai berikut :

Tabel 5.9
Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Prioritas Provinsi	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Kompetensi SDM Unggul	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	99,996,612
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	680,000,000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	250,000,000
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	219,810,076
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4,244,388,490
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	83,573,181



No	Prioritas Provinsi	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	470,167,630
2	Perluasan Akses Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	38,968,944,345
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,425,301,434
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,213,053,966
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,751,008,514
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	373,873,766
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	54,976,652
3	Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat - pusat produktivitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1,362,673,528
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	37,460,725,000
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	64,837,059,087
		Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1,160,000,000
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	49,738,800
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,538,745,272
4	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1,400,000,000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,264,049,038
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	159,962,226



No	Prioritas Provinsi	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	106,849,992
5	Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	117,893,896
			Pembangunan Prasarana Pertanian	194,590,290
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	99,660,000
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	331,496,070

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Proyeksi	
			(2021)	(2022)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	67,00	68,00
2.	IPM	Poin	67,78	68,00
3.	Persentase Kemiskinan	Persen	8,00	7,75
4.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,55	87,00
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,50	6,50
6.	Indeks Gini	Poin	0.2385	0.2185
7.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71,52	72,04
8.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	85	90
9.	Indeks kepuasan masyarakat	Predikat	Baik	Baik
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,55	9,75
11.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5.35	5.20
12.	Indeks Resiko Bencana	Poin	150	145

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2020

6.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan



penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah indikator kinerja kunci Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 - 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	Rupiah	8.864.971,97	9.307.863,89
2	PDRB Per Kapita	Rupiah	42.001.113,15	44.024.434,86
3	Indeks Gini	Poin	0.2385	0.2185
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	89,95	89,13
5	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Persen	1.05	1.04
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,78	68,00
7	Angka Melek Huruf	Persen	99	99
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.15	8.15
9	Angka Usia Harapan Sekolah	Tahun	13.07	13.15
10	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0.02	0.02
11	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Bayi	2	1
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	86,2	89,2
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	13.09	13.48
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76.53	78.82
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.35	5.20
16	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	97.02	97.25
17	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas	Persen	125.395	129.156
18	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	25.778	20.132
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik
20	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	7.45	8.31
21	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	Persen	74,9	75,9
22	Penguatan Cadangan Pangan		10	10
23	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	8.2	8.5
24	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	36.00	37.00
25	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	4.20	4.30
26	Produksi Sektor Pertanian			
26.1	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	46.26	48.26
27	Produksi Sektor Perkebunan			
27.1	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	1.59	1.62
27.2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	6.10	6.17
27.3	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	0.56	0.42
27.4	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	0.35	0.82



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	7.18	7.25
27.6	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	16.74	17.89
27.7	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	Persen	56.596,21	59.973,31
27.8	Pertumbuhan Industri	Persen	5,27	5,50
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah	950.550	960.772
2	Nilai Tukar Petani	Persen	106,56	107,84
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	45,20	46,24
4	Rasio Ketergantungan	Persen	67.42	67.12
C. ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	135	136
1.2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	97.76	97.39
1.3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	Siswa	4.169	4.243
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,5	94,6
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	86,5	86,5
1.5	Angka Partisipasi Sekolah			
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	93,6	97,2
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	92,4	92,3
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	97.52	97.25
1.6	Angka Putus Sekolah			
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,1	0,1
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,5	0,3
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Persen	2.15	2.42
1.7	Angka Kelulusan			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	Persen	100,0	100,0
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Persen	99,9	99,9
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	Persen	93,3	94,5
1.8	Angka Melanjutkan (AM)			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98.88	98.89
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	93.25	94.50
1.9	Fasilitas Pendidikan			
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Unit	972	992



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Unit	287	302
1.9.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	196	204
1.9.4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	60	60
1.9.5	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	432	462
1.9.6	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Persen	931	976
1.9.7	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	Persen	52	52
1.9.8	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	Persen	495	496
1.9.10	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasi Menamatkan Sekolah Dasar	Persen	99	99
1.9.11	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	Penduduk	50,354	51,543
1.9.12	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Penduduk	10232	10352
1.9.13	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Guru	3120	3.240
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	10.01	9.71
2.2	Jumlah Kelangsungan Hidup Bayi	Persen	67.55	67.63
2.3	Jumlah Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	25	25
2.4	Jumlah Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	12	12
2.5	Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Persen	70	70
2.6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Persen	16.30	18.30
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Persen	0.32	0.36
2.8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Persen	0.03	0.03
2.9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Persen	0.45	0.45
2.10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Persen	0.12	0.14
2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Persen	16.1	16.3
2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	100	100
2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	51.7	51.9
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100
2.15	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)	Persen	100	100
2.16	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	Persen	94	94.5
2.17	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Persen	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	Persen	100	100
2.19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	70	70
2.20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Persen	395	450
2.21	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Persen	0.02	0,1
2.22	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	Persen	0.04	0.05
2.23	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	Persen	95	95
2.24	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100
2.25	Penderita Diare Yang Ditangani	Persen	100	100
2.26	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektidisa	Persen	100	100
2.27	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	Persen	100	100
2.28	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	Persen	100	100
2.29	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	Persen	100	100
2.30	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	Persen	100	100
2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	7.10	7.11
2.32	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	75.26	75.35
2.33	Cakupan Puskesmas	Persen	118.07	118.27
2.34	Cakupan Pembantu Puskesmas	Persen	13.47	13.67
2.35	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	100	100
2.36	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	100	100
2.37	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	100	100
2.38	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100	100
2.39	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Persen	100	100
2.40	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	Persen	100	100
2.41	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100
2.42	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	Persen	100	100
2.43	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum			
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	309.12	375.36
3.1.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Persen	3.84	3.75
3.1.3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Persen	28	34
3.1.4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen	0.78	0.85
3.1.5	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	Persen	0.19	0.20
3.1.6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	94	96
3.1.7	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	Tempat	34,335	36,880
3.1.8	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persen	69.69	73.2
3.1.9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	48	53
3.1.10	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	30.90	35.10
3.1.11	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	80	90
3.1.12	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Persen	20	10
3.1.13	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Persen	88	86
3.1.14	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Persen	0.19	0.21
3.2	Penataan Ruang			
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	Persen	38.9	42.35
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	62	64
4.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rumah	12,180	12,080
4.3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Rumah	200	200
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	1450	1450
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	Menit	> 15	> 15
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	Persen	1	1
6.2	Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	Persen	1	1
6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	Persen	2	2
6.4	Persentas Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya (%)	Persen	1	1
6.5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	Persen	100	100
6.6	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	Persen	100	100
6.7	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	Persen	1	1
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus	3	2
1.2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	3	3
1.3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Orang	560	620
1.4	Keselamatan Dan Perlindungan (%)	Persen	98	98
1.5	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Peserta	8,835	9,510
1.6	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Perkara	5	5
1.7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	Orang	88	88
1.8	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (orang)	Orang	22	23
1.9	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Persen	57	62
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga	Persen	7.25	7.25



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintah (%)			
2.2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	Persen	3	3
2.3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	Persen	96	96.50
2.4	Rasio KDRT	Persen	0.002	0.002
2.5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	Persen	0.50	0.50
2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	50	50
2.7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
2.8	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit (%)	Persen	48.70	49
2.9	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	Persen	97.50	97.70
2.10	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (%)	Persen	97.50	97.70
2.11	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	Persen	93	94
2.12	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	Persen	87	86.50
2.13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	Persen	93	94
2.14	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SD (%)	Persen	3	3
2.15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMP (%)	Persen	2	2.10
2.16	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMA (%)	Persen	1.50	2
2.17	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di Perguruan Tinggi (%)	Persen	2.10	2
2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun (%)	Persen	1.20	1
2.19	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian (%)	Persen	5.50	6
3	Pangan			
3.1	Ketersediaan Bahan Pangan	Kg	240,431.34	245,239.96
3.2	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hr;) Dan Protein (gram/kab/hr) Perkapita	Perkapita	energi = 2030 protein=58,00	energi = 2315 protein=63,00
3.3	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	PPH	88	89
3.4	Penguatan Cadangan Pangan (%)	Persen	20	20



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	8.2	8.5
3.6	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (desa)	Desa	34	36
4	Pertanahan			
4.1	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	5	6
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Persen	80.5	81.5
5.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Persen	63	64
5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	32	33
5.4	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketataan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	Persen	100	100
5.5	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Unit	2	2
5.6	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Unit	2	2
5.7	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (penghargaan)	Kegiatan	1	1
5.8	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persen	100	100
5.9	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	Persen	1.50	2
5,10	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	Persen	5.67	5.67
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	Persen	81.34	83.78
6.2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	82.16	84.62
6.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	22.01	23.11
6.4	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		
6.6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	KTP	164.765	173.003
6.7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Akte	114.731	120.468
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik	Persen	15,0	18,7
7.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	20,4	25,0
7.3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Persen	40.00	45.00
7.4	Persentase LSM Aktif	Persen	18.00	22.00
7.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	18.00	20.00



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.6	Persentase PKK Aktif	Persen	82.00	82.00
7.7	Persentase Posyandu Aktif	Persen	82.00	83.00
7.8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	24.00	25,6
7.9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	10.00	15.00
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	Persen	2.15	2.13
8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	Persen	2.17	2.13
8.3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Dengan 5 Aspek (%)	Persen	70	75
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	Persen	70	75
8.5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendali Penduduk (%)	Persen	70	75
8.6	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	Persen	2	2
8.7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	Persen	80	85
8.8	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	Persen	8	8
8.9	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	Persen	6	6
8.10	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	Persen	15	16
8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	Persen	60	60
8.12	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	Persen	55	58
8.13	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	Persen	95	96
8.14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	Persen	95	95
8.15	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	Persen	98	98
8.16	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (%)	Persen	70	72
8.17	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	Persen	40	45
8.18	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	Persen	30	635



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.19	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (%)	Persen	100	100
8.20	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	Persen	85	86
8.21	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	Persen	25	30
8.22	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	Persen	100	100
8.23	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa (%)	Persen	100	100
8.24	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	Persen	82	85
8.25	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	Persen	83	86
8.26	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	Persen	25	25
8.27	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	Persen	10	20
9	Perhubungan			
9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		14,948.00	15,281.00
9.2	Rasio Ijin Trayek	Persen	0.00116	0.00118
9.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kir	4.02	4.11
9.5	Persentase Layanan Angkutan darat	Persen	28,397.47	29,030.74
9.6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	27.14	27.75
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	52.25	53.42
9.8	Rasional Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Persen	4.23	4.33
9.9	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	18,350,025	18,759,230
10	Komunikasi Dan Informatika			
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan (%)	Persen	19	23
10.2	Cakupan layanan Telekomunikasi (%)	Persen	84	100
10.3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	Persen	38	43
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet (%)	Persen	24	29
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi (%)	Persen	22	27
10.6	jumlah KIM		58	69
10.7	jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Padang Lawas	Desa	303	303



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.8	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik milik pmda	PD	6	6
10.9	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik sewa	PD	6	4
10.10	jumlah kantor OPD d Kabupaten Padang Lawas yang terkoneksi jaringan radiolink	PD	26	30
10.11	jumlah SMP di ibu kota kecamatan terkoneksi jaringan	Sekolah	8	12
10.12	jumlah Puskesmas di ibukota kecamatan terkoneksi jaringan	Unit	8	12
10.13	kapasitas bandwidth internet berlangganan (mbps)	Mbps	180	197
10.14	jumlah data center	DataBase	1	1
10.15	jumlah comand center	DataBase	1	1
10.16	jumlah kantor OPD, Puskesmas di ibukota kecamatan dan SLTP ibu kota kecamatan	Kantor	69	69
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
11.1	Persentase Usaha Miko Dan Kecil	Persen	81.65	81.80
11.2	persentasi koperasi aktif	Persen	1.07	2
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	10	15
12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	USD	506.232.855.671.60 (PMDN) US 1.376.822.55 (PMA)	606.232.855.671.60 (PMDN) US 1.426.822.55 (PMA)
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	2.05	2.15
12.4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Rupiah	3,000,000,000,000	3.500,000,000,000
13	Kepemudaan Dan Olahraga			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	Persen	100	100
13.2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabang	8	10
13.3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	Pelatih	10	12
13.4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Atlit	9	11
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlit	8	10
13.6	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlit	8	11
14	Statistik			
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	Status	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
14.2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Status	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Status	Ada	Ada
15	Persandian			



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	Persen	2	5
15.2	jumlah opd yang memiliki kegiatan (Aplkas) yang disandakan	PD	1	2
15.3	jumlah OPD di kabupaten padang lawas	PD	43	43
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Festival	2	2
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Situs	10	10
16.3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Situs	5	5
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (orang)	Orang	201.436	402.873
17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (%)	Persen	70	75
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (%)	Persen	2.54	2.90
17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (orang)	Orang	16.786	33.573
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (exemplar)	Exemplar	3.857	4.147
17.6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat (orang)	Pegawai	2	3
18	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	Persen	15	16
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	Pegawai	7	6
	Layanan Urusan Pilihan			
1	Kunjungan Wisata	Wisatawan	1000	1000
1.1	Lama Kunjungan Wisata (hari)	Hari	1	1
1.2	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2,500,000	3,000,000
2	Pertanian			
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	36.00	37.00
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	4.20	4.30
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	44.46	45.06
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	1.74	1.84
2.5	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Ton	51.00	53.00
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Kelompok	25.00	30.00



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral			
3.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	79.20	80.10
3.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	77.32	81.99
3.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persen	21.96	14.66
4	Perdagangan			
4.1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	63.55	63.60
4.2	Revitalisasi Pasar tradisional	Pasar	4	3
5	Perindustrian			
5.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0.06	0.08
6	Kelautan dan Perikanan			
6.1	Produksi Perikanan	Kg	4,345.35	4562.6
6.2	Konsumsi Ikan	Kg	40	40.2
6.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	225	240
6.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya	Kg	4235.35	4362.6
6.5	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman (%)	Persen	70	70
	Penunjang Urusan			
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Status	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Status	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Status	Ada	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Status	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	98.67	99.00
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Persen	100	100
2	Keuangan			
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	4.15	4.17
2.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7.45	8.31
2.4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	22.6	22.8
2.5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	12	11
2.6	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	74.28	74.04
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Rupiah	63.432.864.716,61	64.050.224.485,81



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.8	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan			
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Bulan	+4 Bulan	+4 Bulan
3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal (%)	Persen	10	10
3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural (%)	Persen	10.00	10.00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instasi Pemerintah	Pegawai	32	32
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instasi Pemerintah	Pegawai	155	155
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	Pegawai	2697	2797
4	Pengawasan			
4.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	85	90
4.2	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	Mengacu pada LHP BPK RI	Mengacu pada LHP BPK RI
5	Sekretariat Dewan			
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Status	Ada	Ada
5.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Status	Ada	Ada
5.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Status	Ada	Ada

